

KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI JAWA BARAT

TRIWULAN IV-2009

KANTOR BANK INDONESIA BANDUNG

Kantor Bank Indonesia Bandung
Jl. Braga No. 108
BANDUNG
Telp : 022 – 4230223
Fax : 022 – 4214326

Visi Bank Indonesia

Menjadi lembaga bank sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

Misi Bank Indonesia

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

Nilai-nilai Strategis Bank Indonesia

Nilai-nilai yang menjadi dasar organisasi, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

Visi Kantor Bank Indonesia Bandung

Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

Misi Kantor Bank Indonesia Bandung

Mendukung pencapaian kebijakan Bank Indonesia di bidang moneter, perbankan dan sistem pembayaran secara efisien dan optimal serta memberikan saran kepada Pemda & lembaga terkait lainnya di daerah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi daerah.

Tugas Pokok Bank Indonesia Bandung adalah sebagai berikut :

1. Memberikan masukan kepada Kantor Pusat tentang kondisi ekonomi dan keuangan daerah di wilayah kerjanya;
2. Melaksanakan kegiatan operasional sistem pembayaran tunai dan/atau non tunai sesuai dengan kebutuhan ekonomi daerah di wilayah kerjanya;
3. Melaksanakan pengawasan terhadap perbankan di wilayah kerjanya;
4. Memberikan saran kepada Pemerintah Daerah mengenai kebijakan ekonomi daerah, yang didukung dengan penyediaan informasi berdasarkan hasil kajian yang akurat;
5. Mengelola sumber daya internal yang dibutuhkan sebagai faktor pendukung terlaksananya fungsi-fungsi utama.

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, buku “Kajian Ekonomi Regional Provinsi Jawa Barat Triwulan IV-2009” ini akhirnya dapat diselesaikan. Hasil kajian atas perkembangan ekonomi regional Provinsi Jawa Barat pada triwulan laporan memberi gambaran bahwa pemulihan perekonomian Jawa Barat terus berlanjut, seiring dengan terus membaiknya perekonomian global.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV-2009 diperkirakan mencapai 4,9% (yoy), atau meningkat dibandingkan triwulan III-2009 yang sebesar 4,0%. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Jawa Barat untuk keseluruhan tahun 2009 diperkirakan masih mampu tumbuh 3,9%, walaupun masih lebih lambat dibandingkan pertumbuhan 5,8% pada tahun 2008. Dari sisi permintaan, peningkatan perekonomian pada triwulan IV-2009 diperkirakan terutama didorong oleh membaiknya kinerja ekspor serta investasi. Sementara itu, dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan laporan terutama didukung oleh membaiknya kinerja sektor industri pengolahan, seiring dengan peningkatan permintaan ekspor dan stabilnya permintaan domestik.

Di sisi perkembangan harga, laju inflasi Jawa Barat mulai meningkat, yakni dari 1,87% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 2,02% pada triwulan IV-2009. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya faktor khusus yang mampu menurunkan laju inflasi secara signifikan seperti penurunan harga BBM bersubsidi (pada bulan Desember 2008). Pasokan yang cukup baik pada beberapa komoditas strategis, terutama daging ayam ras serta ikan segar/diawetkan, khususnya selama triwulan IV-2009 dapat menahan peningkatan laju inflasi ke arah yang lebih tinggi. Dengan ditunjang oleh penurunan harga *volatile foods* tersebut, inflasi pada triwulan IV-2009 secara triwulanan tercatat menurun dari 1,87% (qtq) menjadi 0,29%.

Pemulihan perekonomian juga disertai dengan mulai membaiknya pembiayaan dari perbankan, terutama yang berasal dari kredit konsumsi dan investasi. Penyaluran kredit oleh perbankan Jawa Barat mencatat pertumbuhan sebesar 17% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kredit nasional yang sebesar 10%. Sementara itu, penghimpunan dana pihak ketiga tumbuh cukup baik, yakni sebesar 13,18% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, intermediasi perbankan di Jawa Barat mengalami peningkatan yang tercermin pada naiknya angka *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Di sisi lain, risiko kredit juga semakin menurun seperti yang tercermin pada *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* yang turun dari 3,64% di triwulan III-2009 menjadi 3,24% pada triwulan IV-2009.

Besarnya dukungan pembiayaan APBN maupun APBD di Jawa Barat selama triwulan IV-2009 turut berperan pada kenaikan laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Pertumbuhan realisasi anggaran pemerintah di Jawa Barat naik lebih tinggi dari triwulan sebelumnya. Hal ini diindikasikan oleh tingginya tingkat realisasi belanja pemerintah pusat (APBN) di Jawa Barat maupun besarnya realisasi APBD yang tercermin dari penurunan pertumbuhan posisi simpanan milik pemerintah daerah di perbankan Jawa Barat.

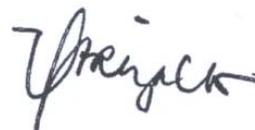
Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat diperkirakan terus menunjukkan perbaikan, yang didorong oleh membaiknya kondisi usaha di Jawa Barat. Perbaikan tersebut tampak dari menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka. Peningkatan jumlah pekerja terutama terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan dan sektor industri pengolahan. Sementara itu, perbaikan kesejahteraan didorong oleh meningkatnya penghasilan masyarakat, yang didukung pula oleh rendah dan stabilnya inflasi di Jawa Barat.

Uraian di atas merupakan hasil analisa kami terhadap berbagai data dan informasi, yang selain berasal dari Bank Indonesia, laporan perbankan, serta hasil-hasil survei yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia Bandung, juga kami peroleh dari berbagai pihak, seperti Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dinas-dinas terkait, Badan Pusat Statistik Jawa Barat, BULOG Divre III Jawa Barat, Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), PT. PLN, Distribusi Jabar dan Banten, PT. Angkasa Pura II, PT. Jasa Marga, serta PT. Kereta Api. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak tersebut yang telah membantu penyusunan buku ini.

Kami menyadari bahwa cakupan serta kualitas data dan informasi yang disajikan dalam buku ini masih perlu terus disempurnakan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak yang berkepentingan dengan buku ini. Kiranya kerjasama yang sangat baik dengan berbagai pihak selama ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan ridha-Nya dan melindungi setiap langkah kita.

Bandung, Februari 2010 



Yang Ahmad Rizal
Pemimpin

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Grafik.....	x
Tabel Indikator Ekonomi Jawa Barat.....	xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB 1 KONDISI MAKRO EKONOMI REGIONAL	7
1. Sisi Permintaan.....	9
1.1. Konsumsi	10
1.2. Investasi	13
1.3. Ekspor	18
2. Sisi Penawaran.....	20
2.1. Sektor Pertanian.....	21
2.2. Sektor Industri Pengolahan.....	23
2.3. Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.....	24
2.4. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan	26
2.5. Sektor Bangunan / Konstruksi.....	27
2.6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	28
2.7. Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih	29
2.8. Sektor Jasa-jasa.....	30
Boks 1. Penghargaan Wilayah-wilayah Jawa Barat dari Segi Investasi dan Kemudahan Usaha ..	31
BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH	35
1. Perkembangan Inflasi	37
1.1. Inflasi Menurut Kelompok Barang dan Jasa	38
Inflasi Tahunan.....	38
a. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau.....	39
b. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar.....	40
c. Kelompok Sandang.....	40
b. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.....	41
Inflasi Triwulan.....	41
a. Kelompok Bahan Makanan	42
b. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan.....	43
1.2. Inflasi Menurut Kota	43
Inflasi Tahunan.....	43
Inflasi Triwulan.....	45
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Inflasi Triwulanan.....	46
2.1. Fundamental.....	46
a. Interaksi Permintaan dan Penawaran	46
b. Eksternal	47
c. Ekspektasi Inflasi	48
2.2. Non Fundamental.....	49
a. <i>Volatile Foods</i>	49
b. <i>Administered Price</i>	51
Boks 2. Pertemuan Tingkat Tinggi Forum Koordinasi Pengendalian Inflasi (FKPI) Jawa Barat...	52
BAB 3 PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH	57
1. Struktur Perbankan di Jawa Barat	57
2. Bank Umum Konvensional	58
2.1. Pendanaan dan Risiko Likuiditas	58
Perkembangan Dana Pihak Ketiga	58
Ekses Likuiditas	60
2.2. Perkembangan Kredit dan Risikonya	60
Perkembangan Kredit	60

Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)	63
Kredit dengan Lokasi Proyek di Jawa Barat	64
Risiko Kredit	65
2.3. Risiko Pasar	68
3. Bank Umum Syariah.....	68
4. Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jawa Barat.....	69
5. Bank Perkreditan Rakyat	70
Boks 3. Perkembangan Kredit Usaha Rakyat (KUR) DI Jawa Barat.....	71
BAB 4 KEUANGAN DAERAH.....	73
1. Pendapatan Pemerintah Pusat di Jawa Barat.....	75
2. Belanja Daerah.....	76
2.1. Belanja APBN di Jawa Barat	77
Belanja Dana Dekonsentrasi.....	77
Belanja Dana Tugas Pembantuan.....	78
Belanja APBN yang Berasal dari Pinjaman Luar Negeri.....	79
2.2. Belanja APBD Provinsi Jawa Barat	80
3. Simpanan Milik Pemerintah Daerah di Bank Umum	81
Boks 4. Transfer Keuangan Daerah di Jawa Barat Tahun 2010.....	82
Boks 5. Riset Peran Belanja Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat.....	85
BAB 5 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN	89
1. Pengedaran Uang Kartal.....	91
1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (<i>Inflow/Outflow</i>)	91
1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar	93
1.3. Uang Palsu	93
2. Sistem Pembayaran Non Tunai.....	93
2.1 Kliring Lokal.....	93
2.2 <i>Real Time Gross Settlement</i> (RTGS).....	94
BAB 6 PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH.....	95
1. Ketenagakerjaan	97
Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Barat	97
2. Kesejahteraan.....	100
BAB 7 PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH	103
1. Prospek Ekonomi Makro.....	105
2. Prakiraan Inflasi	107
Faktor Fundamental	107
Faktor Non Fundamental	108
Boks 6. Hasil Survel Dampak ASEAN-China <i>Free Trade Agreement</i> (ACFTA) terhadap Kinerja Usaha di Jawa Barat.....	109
LAMPIRAN.....	113
DAFTAR ISTILAH	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Permintaan (%)	10
Tabel 1.2.	Nilai Realisasi Investasi di Jawa Barat Menurut Sektor Usaha Tahun 2009 (Rp Miliar).....	16
Tabel 1.3.	Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Benua Pembeli	20
Tabel 1.4.	Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat dari Sisi Penawaran.....	21
Tabel 1.5.	Indikator Perhotelan di Jawa Barat.....	25
Tabel 1.6.	Nilai Tambah Bank Umum di Jawa Barat (Rp Miliar).....	26
Tabel 1.7.	Perkembangan Persewaan Bangunan.....	26
Tabel 1.8.	Perkembangan Properti Komersial.....	27
Tabel 1.9.	Jumlah Kendaraan yang Melintasi 12 Gerbang Tol di Jawa Barat.....	28
Tabel 1.10.	Pemakaian Listrik di Jawa Barat (Juta Kwh).....	29
Tabel 2.1.	Inflasi Tahunan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%).....	39
Tabel 2.2.	Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%).....	42
Tabel 2.3.	Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota (%).....	44
Tabel 2.4.	Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota & Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009 (qtq, %).....	44
Tabel 2.5.	Inflasi Triwulanan Jawa Barat Menurut Kota (qtq,%).....	45
Tabel 2.6.	Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota & Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009 (qtq, %).....	45
Tabel 2.7.	Inflasi Tahunan Menurut Faktor Penyebab (yoy, %).....	46
Tabel 2.8.	Inflasi Triwulanan Menurut Faktor Penyebab (qtq, %).....	46
Tabel 3.1.	Jumlah Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Triwulan IV-2009.....	63
Tabel 3.2.	NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/ Kota.....	67
Tabel 4.1.	Perkembangan Pendapatan Pemerintah Pusat di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I.....	76
Tabel 4.2.	Realisasi Dana Dekonsentrasi Jawa Barat di Lima Dinas Penerima Alokasi Anggaran Terbesar	77
Tabel 4.3.	Realisasi Dana Dekonsentrasi Jawa Barat Antar Tahun di Lima Dinas Penerima Alokasi Anggaran Terbesar	78
Tabel 4.4.	Realisasi Dana Tugas Pembantuan Jawa Barat di Lima Dinas Penerima Alokasi Anggaran Terbesar....	78
Tabel 4.5.	Realisasi Dana Tugas Pembantuan Jawa Barat di Lima Dinas Penerima Alokasi Anggaran Terbesar....	79
Tabel 4.6.	Perkembangan Belanja yang Berasal dari Pinjaman Luar Negeri	79
Tabel 4.7.	Realisasi Belanja Langsung Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat	80
Tabel 4.8.	Perkembangan Pertumbuhan Simpanan Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Jenis Rekening (yoy, %).....	81
Tabel 4.9.	Perkembangan Pertumbuhan Simpanan Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Lokasi Rekening (yoy, %)	81
Tabel 5.1.	Perkembangan <i>Outflow</i> Uang Kertas dan Uang Logam melalui KBI Bandung.	92
Tabel 5.2.	Perkembangan Transaksi Kliring Lokal Rata-rata per Bulan di Jawa Barat	94
Tabel 5.3.	Perkembangan Transaksi RTGS di Jawa Barat	94
Tabel 6.1.	Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama.....	98
Tabel 6.2.	Nilai Tukar Petani di Jawa Barat Bulan Juni dan September 2009 (2007=100).....	101

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat	9
Grafik 1.2.	Indeks Keyakinan Konsumen	10
Grafik 1.3.	Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini	11
Grafik 1.4.	Komponen Indeks Ekspektasi	11
Grafik 1.5.	Indeks Penjualan Eceran	12
Grafik 1.6.	Indeks Penjualan Pakaian dan Perlengkapan	12
Grafik 1.7.	Posisi Baki Debet Kredit Konsumsi Bank Umum di Jawa Barat	12
Grafik 1.8.	Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Konsumsi oleh Bank Umum di Jawa Barat	12
Grafik 1.9.	Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Nilai Proyek	13
Grafik 1.10.	Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Proyek	13
Grafik 1.11.	Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Nilai Investasi	14
Grafik 1.12.	Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek	14
Grafik 1.13.	Distribusi Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah Dati II di Jawa Barat Tahun 2009	14
Grafik 1.14.	Minat Investasi di Jawa Barat Tahun 2009 Berdasarkan Bidang Usaha	16
Grafik 1.15.	Minat Investasi di Jawa Barat Tahun 2009 Berdasarkan Lokasi Usaha	17
Grafik 1.16.	Minat Investasi di Jawa Barat Tahun 2009 Berdasarkan Asal Negara PMA	17
Grafik 1.17.	Penjualan Semen di Jawa Barat	17
Grafik 1.18.	Posisi Penyaluran Kredit investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat	18
Grafik 1.19.	Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat	18
Grafik 1.20.	Nilai Ekspor Jawa Barat	18
Grafik 1.21.	Volume Ekspor Jawa Barat	18
Grafik 1.22.	Nilai Ekspor TPT	19
Grafik 1.23.	Volume Ekspor TPT	19
Grafik 1.24.	Nilai Ekspor Alat Telekomunikasi	19
Grafik 1.25.	Volume Ekspor Alat Telekomunikasi	19
Grafik 1.26.	Nilai Ekspor Mesin Elektrik	20
Grafik 1.27.	Volume Ekspor Mesin Elektrik	20
Grafik 1.28.	Volume Ekspor Jawa Barat Berdasarkan Benua Pembeli	20
Grafik 1.29.	Produksi padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat	21
Grafik 1.30.	Luas Panen Padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat	21
Grafik 1.31.	Produksi Tanaman Pangan Non Padi di Jawa Barat	22
Grafik 1.32.	Luas Panen Tanaman Pangan Non Padi di Jawa Barat	22
Grafik 1.33.	Luas Panen Padi Jawa Barat	22
Grafik 1.34.	Penjualan Motor Nasional	23
Grafik 1.35.	Penjualan Mobil Nasional	23
Grafik 1.36.	Nilai Ekspor Kendaraan	24
Grafik 1.37.	Volume Ekspor Kendaraan	24
Grafik 1.38.	Indeks Penjualan Eceran	24
Grafik 1.39.	Perkembangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Jawa Barat	25
Grafik 1.40.	Asal Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Jawa Barat	25
Grafik 1.41.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran	26
Grafik 1.42.	Posisi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA)	27
Grafik 1.43.	Posisi Kredit Kepemilikan Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)	27
Grafik 1.44.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Konstruksi	28
Grafik 1.45.	Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional di Bandara Husein Sastranegara	28
Grafik 1.46.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum ke Sektor Pengangkutan dan Komunikasi	29
Grafik 1.47.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih	29
Grafik 1.48.	Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Jasa Dunia Usaha dan Sosial	30
Grafik 2.1.	Inflasi Tahunan Jawa Barat dan Nasional	37
Grafik 2.2.	Inflasi Triwulanan Jawa Barat dan Nasional	37
Grafik 2.3.	Inflasi Bulanan Jawa Barat dan Nasional	38

Grafik 2.4.	Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009.....	39
Grafik 2.5.	Inflasi dan Andil Inflasi Triwulanan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009.....	40
Grafik 2.6.	Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau di Jawa Barat.....	40
Grafik 2.7.	Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009.....	40
Grafik 2.8.	Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Jawa Barat.....	40
Grafik 2.9.	Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009.....	40
Grafik 2.10.	Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Jawa Barat	41
Grafik 2.11.	Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009.....	41
Grafik 2.12.	Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Jawa Barat	41
Grafik 2.13.	Inflasi Tahunan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009.....	41
Grafik 2.14.	Inflasi dan Andil Inflasi Triwulanan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009.....	42
Grafik 2.15.	Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat.....	43
Grafik 2.16.	Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009.....	43
Grafik 2.17.	Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Jawa Barat.....	43
Grafik 2.18.	Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009.....	43
Grafik 2.19.	Kapasitas Terpakai dan Persediaan Industri di Jawa Barat.....	46
Grafik 2.20.	Laju Inflasi di Negara Mitra Dagang.....	47
Grafik 2.21.	Perkembangan Harga Emas dan Tekstil di Pasar Internasional.....	47
Grafik 2.22.	Perkembangan Harga Gula di Pasar Internasional.....	47
Grafik 2.23.	Perkembangan Kurs Rupiah.....	47
Grafik 2.24.	Perkembangan Harga Barang dan Jasa Menurut Pengusaha di Jawa Barat.....	48
Grafik 2.25.	Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	48
Grafik 2.26.	Ekspektasi Konsumen terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	49
Grafik 2.27.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pada Subkelompok Daging-dagingan.....	50
Grafik 2.28.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pada Subkelompok Ikan Segar.....	50
Grafik 2.29.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas Pada Subkelompok Sayur-sayuran.....	50
Grafik 2.30.	Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Bumbu-bumbuan	50
Grafik 3.1.	Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat Triwulan IV-2009.....	57
Grafik 3.2.	Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Simpanan.....	58
Grafik 3.3.	Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Valuta ...	59
Grafik 3.4.	Perkembangan DPK Valuta Asing & Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD	59
Grafik 3.5.	Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Kelompok Bank	59
Grafik 3.6.	DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Triwulan IV-2009 berdasarkan Golongan Kepemilikan	59
Grafik 3.7.	Perkembangan SBI Bank Umum Konvensional di Jawa Barat dan SBI Perbankan Nasional.....	60
Grafik 3.8.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat	60
Grafik 3.9.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	61
Grafik 3.10.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	61
Grafik 3.11.	Pangsa Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan IV-2009.....	61

Grafik 3.12.	Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank	66
Grafik 3.13.	Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank	62
Grafik 3.14.	Perkembangan Persetujuan Plafon Kredit Baru Bank Umum Konvensional di Jawa Barat..	62
Grafik 3.15.	Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Skala Usaha	64
Grafik 3.16.	Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Jenis Penggunaan.....	64
Grafik 3.17.	Perkembangan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor.....	64
Grafik 3.18.	Perkembangan Jumlah Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional di Jawa Barat.....	65
Grafik 3.19.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank.....	65
Grafik 3.20.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan	66
Grafik 3.21.	Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Beberapa Sektor Ekonomi Utama.....	66
Grafik 3.22.	Perkembangan NPL Gross Kredit MKM dan Total Kredit.....	67
Grafik 3.23.	Perkembangan Indikator Bank Umum Syariah Di Jawa Barat.....	68
Grafik 3.24.	Perkembangan Indikator Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jawa Barat.	69
Grafik 3.25.	Perkembangan Indikator BPR Konvensional di Jawa Barat	70
Grafik 4.1.	<i>Tax Ratio</i> dan Total Penerimaan Pajak di Provinsi Jawa Barat	75
Grafik 4.2.	Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat	76
Grafik 4.3.	Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat dari Pinjaman Luar Negeri.....	79
Grafik 4.4.	Perkembangan Simpanan Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat.....	81
Grafik 5.1.	Perkembangan <i>Inflow</i> dan <i>Outflow</i> Uang Kartal di Jawa Barat	92
Grafik 5.2.	Perkembangan PTTB Kantor Bank Indonesia Bandung.....	93
Grafik 6.1.	Perkembangan Ketenagakerjaan di Jawa Barat	97
Grafik 6.2.	Penyerapan Tenaga Kerja dari Realisasi Investasi PMA dan PMDN.....	99
Grafik 6.3.	Indikator Jumlah Karyawan.....	100
Grafik 6.4.	Indeks Penghasilan dan Indeks Ekspektasi Penghasilan	100
Grafik 6.5.	Nilai Tukar Petani.....	101
Grafik 7.1.	Ekspektasi Kegiatan Dunia Usaha.....	105
Grafik 7.2.	Indeks Keyakinan Konsumen	106
Grafik 7.3.	Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini.....	106
Grafik 7.4.	Perkembangan dan Prakiraan Inflasi Jawa Barat Tahun 2009.....	107
Grafik 7.5.	Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung.....	107

TABEL INDIKATOR EKONOMI JAWA BARAT

I. MAKRO

INDIKATOR	2008		2009			
	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
PDRB - harga konstan (Rp Miliar)*	74.384	74.020	72.980	73.390	77.310	77.620
- Pertanian	9.053	8.096	11.380	9.080	9.350	8.470
- Pertambangan & Penggalian	1.730	1.719	1.720	1.780	1.910	1.960
- Industri Pengolahan	34.264	35.083	31.590	32.940	33.860	35.450
- Listrik, Gas, dan Air Bersih	1.492	1.536	1.580	1.650	1.830	1.890
- Bangunan	2.620	2.603	2.330	2.460	2.680	2.680
- Perdagangan, Hotel, dan Restoran	14.826	14.711	14.250	14.980	16.660	16.610
- Pengangkutan dan Komunikasi	3.154	3.098	3.180	3.270	3.480	3.180
- Keuangan, Persewaan, dan Jasa	2.425	2.309	2.140	2.350	2.550	2.460
- Jasa	4.827	4.879	4.820	4.870	4.990	4.930
Pertumbuhan PDRB (yoy %)*	6,8	4,5	4,4	3,2	4,0	4,9
Ekspor-Impor**	3.143,58	2.430,58	2.967,76	3.119,55	3.459,90	2.748,74
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	5.505,69	5.057,99	4.063,09	4.681,69	5.053,79	3.572,2
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	2.007,70	1.767,00	1.434,01	1.921,40	1.727,67	1.431,84
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	2.362,11	2.627,41	1.095,33	1.562,14	1.593,9	823,48
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	448,87	621,75	193,08	246,97	272,10	145,72
Indeks Harga Konsumen***	113,37	113,54	113,54	113,37	115,49	115,83
- Kota Bandung	112,78	112,70	112,82	112,66	114,51	115,08
- Kota Bekasi	112,68	112,71	118,25	112,43	114,41	114,88
- Kota Bogor	115,47	116,00	116,92	116,60	118,60	118,50
- Kota Sukabumi	112,83	114,32	116,23	116,64	118,10	118,31
- Kota Cirebon	116,96	117,18	118,25	118,30	121,25	122,00
- Kota Tasikmalaya	113,68	115,07	115,97	117,23	118,51	119,87
- Kota Depok	113,70	113,91	112,92	112,69	115,43	115,39
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)***	12,30	11,11	7,45	3,13	1,87	2,02
- Kota Bandung	10,31	10,23	6,31	2,17	1,61	2,11
- Kota Bekasi	10,07	10,10	6,68	3,59	1,51	1,93
- Kota Bogor	13,67	14,20	6,17	2,57	2,24	2,16
- Kota Sukabumi	9,94	11,39	8,25	3,38	3,31	3,49
- Kota Cirebon	13,93	14,14	8,22	5,23	3,47	4,11
- Kota Tasikmalaya	10,71	12,07	9,18	6,91	2,99	4,17
- Kota Depok	11,49	11,70	N/A	6,87	1,33	1,30

Keterangan:

* Proyeksi KBI Bandung untuk Triwulan IV-2009

** Data Ekspor-Impor Triwulan IV-2009 adalah data bulan Oktober s.d. November 2009

*** Data IHK Triwulan II-2008 hingga Triwulan II-2009 menggunakan Tahun Dasar 2007

II. PERBANKAN

No	Indikator	2008		2009			
		Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
A Bank Umum							
1	Total Aset (Rp Triliun)	145,03	154,91	162,80	170,85	178,02	181,92
2	DPK (Rp Triliun)	107,03	117,76	123,03	126,97	129,53	133,28
	- Tabungan (Rp Triliun)	39,94	42,09	41,63	45,06	47,31	53,05
	- Giro (Rp Triliun)	21,88	22,99	27,48	27,61	27,14	25,32
	- Deposito (Rp Triliun)	45,22	52,68	53,91	54,31	55,08	54,91
3	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek*)	151,22	161,93	167,13	171,39	174,16	177,76
	- Investasi	22,68	25,01	24,28	24,25	24,74	26,43
	- Modal Kerja	70,37	77,04	79,79	81,36	81,55	81,71
	- Konsumsi	58,18	59,87	63,06	65,77	67,87	69,62
4	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang	82,86	87,35	87,58	95,46	98,77	102,62
	- Modal Kerja	36,97	39,95	39,39	44,00	44,95	46,68
	- Investasi	8,69	9,22	9,18	9,50	9,69	10,36
	- Konsumsi	37,20	38,18	39,02	41,96	44,13	45,58
5	- LDR (%)	77,42	74,18	71,19	75,18	76,25	77,00
6	Rasio NPL Gross (%)	3,57	3,52	3,99	3,91	3,82	3,37
7	Rasio NPL Net (%)	1,5	1,43	1,63	1,60	1,58	1,60
8	Kredit MKM (triliun Rp)	63,85	65,27	66,18	71,97	75,29	78,04
9	Kredit Mikro (< Rp50 juta) (triliun Rp)	26,28	26,14	26,49	28,42	29,92	30,40
	- Kredit Modal Kerja	4,22	4,21	4,48	5,26	5,79	5,99
	- Kredit Investasi	0,45	0,45	0,46	0,56	0,57	0,57
	- Kredit Konsumsi	21,61	21,47	21,56	22,60	23,57	23,84
10	Kredit Kecil (Rp50 juta s.d. Rp 500 juta) (triliun Rp)	20,19	21,33	22,04	24,97	26,42	27,24
	- Kredit Modal Kerja	6,25	6,36	6,39	6,85	7,09	7,13
	- Kredit Investasi	0,96	0,98	0,99	1,15	1,28	1,41
	- Kredit Konsumsi	12,98	13,99	14,66	16,97	18,05	18,71
11	Kredit Menengah (Rp500 juta s.d.Rp5 miliar) (triliun Rp)	17,37	17,81	17,65	18,57	18,95	20,39
	- Kredit Modal Kerja	12,38	12,76	12,66	13,46	13,67	14,77
	- Kredit Investasi	2,66	2,73	2,73	2,83	2,89	2,99
	- Kredit Konsumsi	2,33	2,31	2,26	2,28	2,38	2,64
12	Pangsa Kredit MKM	77%	75%	76%	75%	76%	76%
13	Rasio NPL MKM gross (%)	3,32	3,06	3,69	3,62	3,60	3,23
B Bank Umum Syariah*)							
1	Total Aset (Rp Triliun)	4,91	5,52	5,20	5,66	5,61	6,02
2	DPK (Rp Triliun)	3,65	3,97	4,03	4,49	4,38	4,63
	- Giro (Rp Triliun)	0,32	0,38	0,33	0,34	0,40	0,37
	- Deposito (Rp Triliun)	1,63	1,82	1,87	1,90	2,14	2,26
	- Tabungan (Rp Triliun)	1,71	1,79	1,89	2,25	2,06	2,00
3	Pembiayaan (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi kantor cabang	3,37	3,43	3,41	3,53	3,72	3,91
	- Modal Kerja	1,86	1,81	1,86	1,89	2,07	2,06
	- Investasi	0,57	0,61	0,54	0,55	0,57	0,58
	- Konsumsi	0,93	1,00	1,01	1,09	1,19	1,27
4	- FDR	92,21	86,26	86,26	78,50	84,83	84,52
C BPR Konvensional							
1	Total Aset (Rp Triliun)	5,71	5,86	6,21	6,49	6,67	7,06
2	DPK (Rp Triliun)	3,88	4,03	4,40	4,62	4,78	5,08
	- Tabungan (Rp Triliun)	0,79	0,90	0,96	1,03	1,03	1,16
	- Deposito (Rp Triliun)	3,09	3,13	3,44	3,59	3,75	3,93
3	Kredit (Rp Triliun) - berdasarkan lokasi proyek	4,43	4,40	4,49	4,59	4,72	4,81
	- Modal Kerja	2,46	2,43	2,42	2,45	2,48	2,64
	- Investasi	0,16	0,15	0,14	0,14	0,14	0,13
	- Konsumsi	1,80	1,82	1,93	2,00	2,08	2,03
4	Kredit MKM (triliun Rp)	4,43	4,40	4,49	4,59	4,72	4,81

*) Posisi November 2009

III. SISTEM PEMBAYARAN

Indikator	2008		2009			
	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV
Transaksi Tunai						
Posisi Kas Gabungan (Rp Triliun)	0,95	3,11	5,77	7,42	6,65	4,10
Inflow (Rp Triliun)	4,75	5,68	7,02	3,34	3,71	6,00
Outflow (Rp Triliun)	3,75	2,03	0,81	2,01	3,14	2,05
Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)	114,05	155,88	118,24	76,42	178,98	509,36
Transaksi Non Tunai						
BI-RTGS						
Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp Triliun)	140,44	156,30	130,57	138,64	159,53	147,18
Volume Transaksi BI-RTGS	164.434	217.398	188.863	196.533	232.945	238.919
Rata-rata Harian Nominal Transaksi BI-RTGS (Rp Triliun)	2,27	2,69	2,18	2,24	2,57	2,37
Rata-rata Harian Volume Transaksi BI-RTGS	2.652	3.748	3.148	3.170	3.757	3.854
Kliring						
Nominal Perputaran Kliring (triliun Rp)	11,48	10,93	9,94	10,38	10,64	11,70
Volume Perputaran Kliring	544.327	479.764	504.311	476.875	484.106	481.440
Rata-rata Harian Nominal Perputaran Kliring (triliun Rp)	0,19	0,19	0,17	0,17	0,17	0,19
Rata-rata Harian Volume Perputaran Kliring	8.779	8.272	8.405	7.692	7.808	7.765

Halaman ini sengaja dikosongkan

RINGKASAN EKSEKUTIF

PERKEMBANGAN EKONOMI MAKRO

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV-2009 diperkirakan mencapai 4,9% (yoy).

Perekonomian Jawa Barat diperkirakan semakin menunjukkan perbaikan, seiring dengan pulihnya perekonomian global. Pertumbuhan pada triwulan IV-2009 diperkirakan mencapai 4,9% (yoy), meningkat dibandingkan 4,0% pada triwulan sebelumnya. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Jawa Barat selama tahun 2009 diperkirakan masih mampu tumbuh sebesar 3,9%, walaupun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2008 yang sebesar 5,8%.

Dari sisi permintaan, peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat ditopang oleh pertumbuhan pada seluruh komponen permintaan

Dari sisi permintaan, pada triwulan IV-2009, membaiknya seluruh komponen permintaan, terutama kinerja ekspor, mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tumbuh lebih tinggi. Pemulihan ekonomi global, yang terjadi pada negara-negara maju sekaligus mitra dagang utama Jawa Barat, membawa dampak positif terhadap peningkatan kinerja ekspor Jawa Barat pada triwulan laporan. Selanjutnya, di samping keyakinan konsumen terhadap kondisi perekonomian yang terus meningkat, naiknya pendapatan yang berasal dari ekspor berdampak terhadap stabilnya pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Sementara itu, investasi juga mengalami peningkatan, sebagai akibat dari meningkatnya optimisme investor dan pelaku usaha dalam memandang prospek perekonomian ke depan.

Dari sisi penawaran, peningkatan kinerja pada ketiga sektor dominan di Jawa Barat menopang peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat

Dari sisi penawaran, pertumbuhan tiga sektor dominan di Jawa Barat, yaitu sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR), serta sektor pertanian pada triwulan laporan menunjukkan adanya peningkatan. Faktor utama pendorong peningkatan kinerja sektor industri pengolahan, sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar di Jawa Barat, adalah tren kenaikan permintaan luar negeri terhadap produk-produk industri di Jawa Barat, di samping konsumsi domestik yang masih tumbuh stabil. Pertumbuhan sektor PHR ditunjang daya beli masyarakat yang terjaga, terutama pasca krisis keuangan global. Sementara itu, sektor pertanian tumbuh sedikit meningkat, seiring kenaikan produksi tanaman pangan, khususnya padi.

PERKEMBANGAN INFLASI

Jawa Barat mulai mengalami peningkatan laju inflasi tahunan pada triwulan IV-2009

Secara tahunan, laju Inflasi Jawa Barat meningkat tipis dari 1,87% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 2,02% pada triwulan IV-2009. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh tidak adanya penurunan harga/tarif barang/jasa secara signifikan sepanjang tahun 2009, sebagaimana pernah dialami pada tahun sebelumnya (penurunan harga BBM bersubsidi pada Desember 2008).

Secara tahunan, hilangnya pengaruh penurunan harga BBM pada akhir 2008 dan faktor eksternal menjadi penyebab utama kenaikan laju inflasi

Hilangnya pengaruh penurunan harga BBM dan kenaikan harga emas perhiasan yang telah terjadi sejak triwulan II-2009 merupakan pendorong kenaikan laju inflasi. Namun demikian, pasokan yang cukup baik pada beberapa komoditas strategis, terutama daging ayam ras serta ikan segar/diawetkan, dapat menahan peningkatan laju inflasi ke arah yang lebih tinggi.

Secara triwulanan, laju inflasi mengalami penurunan terutama akibat faktor non fundamental

Sementara itu, inflasi Jawa Barat secara triwulanan turun drastis dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yaitu dari 1,87% (qtq) menjadi 0,29%. Sumbangan penurunan laju inflasi pada triwulan IV-2009 terutama berasal dari sisi non fundamental, yaitu penurunan harga *volatile foods* serta penurunan tarif angkutan antar kota.

PERKEMBANGAN PERBANKAN

Perkembangan perbankan di Jawa Barat masih tumbuh melambat.

Pada triwulan IV-2009, secara umum, perkembangan perbankan di Jawa Barat masih mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, namun dengan tren yang semakin membaik. Perlambatan ini tercermin dari perkembangan beberapa indikator utama perbankan seperti total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) maupun *outstanding* kredit. Namun di sisi lain, intermediasi perbankan yang dicerminkan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sedikit mengalami peningkatan. Sementara itu, risiko kredit semakin terkendali, tercermin dari angka *Non Performing Loan* (NPL) yang semakin menurun.

Aset perbankan Jawa Barat tumbuh 2,23% (qtq) atau 17,41% (yoy).

Total aset perbankan di Jawa Barat pada triwulan IV-2009, tumbuh 2,23% (qtq) atau 17,41% (yoy) menjadi Rp193,57 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mencapai 2,89% (qtq) atau 20,97% (yoy), sebagai akibat melambatnya pertumbuhan kredit yang disalurkan. Jika dibandingkan dengan nasional, aset perbankan di Jawa Barat memiliki pangsa sebesar 7,9%.

DPK tumbuh melambat, terutama giro dan deposito

Pada triwulan IV-2009, DPK tumbuh 13,58% (yoy) menjadi sebesar Rp142,21 triliun atau melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 21,02%. Jika dilihat dari jenis simpanannya, peningkatan pertumbuhan terjadi pada tabungan, sementara giro dan deposito mengalami pertumbuhan yang melambat. Hal ini diperkirakan sebagai akibat dari turunnya suku bunga deposito seiring dengan penurunan BI rate. Sejalan dengan hal tersebut, pangsa deposito pada triwulan IV-2009 semakin menurun dari sekitar 42 pada triwulan sebelumnya menjadi sekitar 41%.

Kredit yang disalurkan juga tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya

Pertumbuhan kredit pada triwulan IV-2009 masih terus mengalami tren perlambatan, seperti yang terjadi pada tiga triwulan terakhir. *Outstanding* kredit yang disalurkan sampai dengan posisi Desember 2009 adalah sebesar Rp110,36 triliun. Secara tahunan, kredit tumbuh 17,01% (yoy), lebih lambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 20,03%. Sementara itu, secara triwulanan, kredit tumbuh 3,90% (qtq) atau sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 4,00% (qtq). Perlambatan kredit tersebut diperkirakan sebagai akibat dari masih belum kuatnya permintaan kredit seiring dengan kondisi perekonomian yang belum sepenuhnya pulih.

Risiko kredit menurun

Risiko kredit bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Persentase jumlah kredit bermasalah kotor atau *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* menurun dari 3,82% di triwulan III-2009 menjadi 3,37% pada triwulan IV-2009. Selain itu, seiring dengan membaiknya prospek perekonomian di tahun 2010, diperkirakan risiko kredit perbankan akan semakin terkendali.

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Perkembangan transaksi sistem pembayaran bervariasi

Kegiatan sistem pembayaran di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 menunjukkan perkembangan yang bervariasi. Jumlah aliran uang masuk (*inflow*) ke Kantor Bank Indonesia di wilayah Jawa Barat, meningkat 61,73% (qtq) menjadi Rp6,00 triliun. Sebaliknya jumlah aliran uang keluar (*outflow*) turun 34,71% menjadi Rp2,05 triliun. Sementara itu, untuk transaksi kliring, rata-rata nominal per bulan naik 9,96% (qtq) menjadi Rp11,70 triliun, sebaliknya rata-rata volume transaksi per bulan turun 0,55% menjadi 481.440 warkat. Di sisi lain, rata-rata nominal transaksi pembayaran melalui BI-RTGS per bulan turun sebesar 7,74%

(qtq) menjadi Rp147 triliun, sebaliknya volumenya naik sebesar 2,56% (qtq) atau sebanyak 238.919 transaksi. Perkembangan kegiatan sistem pembayaran tunai selama periode laporan, merupakan siklus setelah tingginya transaksi pada lebaran yang lalu.

PERKEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Realisasi belanja pemerintah pada triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh lebih tinggi, meskipun relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya

Realisasi APBD maupun APBN di Provinsi Jawa Barat diperkirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari sisi APBD, peningkatan realisasi belanja terbesar mencakup pos anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan pertanian. Sementara itu, realisasi APBN yang disalurkan di wilayah Jawa Barat juga mengalami kenaikan, terutama berupa dana tugas pembantuan dan dana dekonsentrasi, serta realisasi proyek yang dibiayai oleh pinjaman luar negeri.

Pertumbuhan penerimaan pajak di Jawa Barat mengalami peningkatan cukup tinggi

Di sisi penerimaan, selama triwulan IV-2009, baik penerimaan pemerintah pusat maupun daerah diperkirakan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun masih tumbuh negatif, kinerja penerimaan pajak pemerintah pusat naik cukup tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Peningkatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) terjadi sejalan dengan membaiknya perekonomian Jawa Barat. Namun demikian, evaluasi atas pertumbuhan tersebut belum dapat menyamai kinerja penerimaan pajak yang sangat baik pada tahun 2008.

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik

Memasuki akhir tahun 2009, perkembangan ketenagakerjaan di Jawa Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik, tercermin dari angka Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami penurunan. Perkembangan tersebut seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian, sehingga mendorong pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan bersiap mengantisipasi kenaikan permintaan. Dilihat dari lapangan usaha, sektor jasa kemasyarakatan serta sektor industri pengolahan merupakan dua sektor terbesar dalam peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Kesejahteraan masyarakat diindikasikan mengalami perbaikan

Perbaikan kesejahteraan masyarakat didorong oleh meningkatnya penghasilan masyarakat yang didukung oleh rendah dan stabilnya inflasi Jawa Barat. Kesejahteraan di tingkat petani juga diindikasikan mengalami peningkatan, seiring dengan kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV-2009.

PROSPEK PEREKONOMIAN

Perbaikan perekonomian Jawa Barat diperkirakan akan terus berlanjut pada triwulan I-2010

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, memasuki awal tahun 2010, diperkirakan berpotensi terus meningkat, yaitu dari perkiraan tumbuh 4,9% (yoy) pada triwulan IV-2009, menjadi tumbuh pada batas atas kisaran 4,8% s.d. 5,4% (yoy). Dari sisi permintaan, potensi peningkatan pertumbuhan ekonomi ditopang oleh perbaikan pada komponen ekspor serta investasi, seiring dengan pemulihan perekonomian global. Sementara itu, konsumsi pemerintah juga diperkirakan sedikit meningkat, yang didorong antara lain oleh inisiatif Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi proyek seawal mungkin. Dari sisi penawaran, perbaikan pada sektor industri pengolahan diperkirakan

mampu menopang perekonomian Jawa Barat, walaupun menghadapi tantangan dari implementasi ACFTA.

Baik laju tahunan maupun triwulanan Jawa Barat pada triwulan I-2010 diperkirakan akan meningkat.

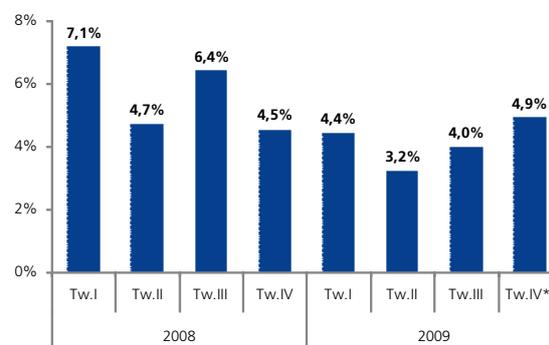
Secara tahunan laju inflasi Jawa Barat pada triwulan I-2010 diperkirakan meningkat dibandingkan dengan triwulan IV-2009, yaitu berkisar 2,7%-3,7% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan sasaran inflasi nasional ($5\% \pm 1\%$). Kenaikan laju inflasi triwulan I-2010 disebabkan oleh faktor cuaca yang kurang kondusif bagi kelancaran distribusi serta produksi pangan, tekanan eksternal, serta pemulihan perekonomian. Sementara itu, secara triwulanan, laju inflasi Jawa Barat diperkirakan meningkat menjadi 0,8%-1,3% (qtq). Faktor penyebab kenaikan laju inflasi triwulanan antara lain adalah musim tanam padi, ekspektasi inflasi masyarakat, tekanan eksternal dari kenaikan harga komoditas di pasar internasional, serta kenaikan permintaan.

BAB 1

KONDISI
MAKRO EKONOMI REGIONAL

Berlanjutnya proses pemulihan perekonomian global serta masih relatif kuatnya daya beli masyarakat mendukung kinerja perekonomian Jawa Barat. Perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh 4,9% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III-2009 yang tercatat sebesar 4,0% (yoy). Dengan perkembangan tersebut, maka selama tahun 2009, perekonomian Jawa Barat diperkirakan tumbuh 3,9% (yoy), atau melambat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2008 yang mencapai 5,8%. Perlambatan tersebut merupakan dampak krisis keuangan global sejak pertengahan tahun 2008.

Grafik 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
*) Proyeksi KBI Bandung

Dilihat dari sisi permintaan, membaiknya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV-2009 ditopang oleh perbaikan pada seluruh komponen permintaan. Membaiknya kondisi perekonomian global, seperti diindikasikan oleh pertumbuhan positif ekonomi beberapa negara utama dunia (seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang) sejak triwulan III-2009, telah mendorong pertumbuhan ekspor Jawa Barat. Kondisi tersebut selanjutnya meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh lebih tinggi pada triwulan laporan. Sementara itu, seiring perbaikan kondisi perekonomian global serta meningkatnya optimisme pelaku usaha terhadap prospek usaha ke depan, investasi juga diperkirakan mengalami peningkatan.

Di sisi penawaran, peningkatan kinerja di tiga sektor dominan di Jawa Barat mendorong perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan IV-2009. Peningkatan permintaan luar negeri serta permintaan domestik yang stabil terhadap produk industri di Jawa Barat merupakan faktor utama yang menopang membaiknya kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan laporan. Pertumbuhan sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sebagai sektor kedua terbesar penyumbang PDRB Jawa Barat, sedikit meningkat. Hal tersebut terutama ditopang oleh subsektor perdagangan, yang mengalami peningkatan pasca redanya krisis keuangan global. Sementara itu, sektor pertanian, mengalami peningkatan pertumbuhan pada triwulan laporan karena membaiknya kinerja subsektor tanaman pangan.

1. SISI PERMINTAAN

Kondisi perekonomian global yang semakin membaik mendorong peningkatan pertumbuhan seluruh komponen sisi permintaan pada triwulan IV-2009, baik konsumsi rumah tangga, investasi, maupun ekspor Jawa Barat. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh relatif stabil masih menjadi penggerak utama perekonomian Jawa Barat pada tahun 2009. Pangsa konsumsi rumah tangga pada tahun 2009 diperkirakan sebesar 66% dari PDRB Jawa Barat, meningkat dibandingkan pangsa pada tahun 2008 yang sebesar 61%. Di samping itu, perekonomian Jawa Barat

ditopang oleh ekspor, impor, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercermin dari investasi. Adapun pangsa ekspor terhadap perekonomian Jawa Barat sedikit menurun dibandingkan kondisi tahun 2008, akibat pengaruh krisis keuangan global, yang menyebabkan turunnya permintaan luar negeri secara tajam, khususnya pada semester I-2009. Demikian juga halnya dengan investasi, yang didominasi oleh investasi Penanaman Modal Asing (PMA), yang mengalami penurunan pangsa dibandingkan tahun 2008.

Tabel 1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan (yoy) Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Permintaan (%)

Komponen	2007				2008				2009			
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV*)
Konsumsi rumah tangga	5,2%	8,1%	9,0%	6,3%	8,0%	4,8%	7,8%	4,3%	7,1%	5,6%	8,0%	8,3%
Konsumsi pemerintah	11,9%	5,9%	2,9%	25,9%	-2,9%	-14,5%	11,0%	5,0%	4,5%	7,0%	3,2%	3,3%
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6,0%	4,9%	7,4%	8,1%	10,4%	8,5%	14,0%	7,9%	12,7%	4,4%	-9,0%	-3,8%
Ekspor	8,2%	3,0%	2,7%	-10,5%	-14,2%	-10,5%	-20,8%	-8,4%	-13,7%	-13,0%	9,5%	11,5%
Impor	3,7%	3,4%	9,3%	-6,0%	-5,5%	-14,3%	-19,8%	-3,9%	-8,8%	-2,8%	5,8%	8,8%
PDRB	5,7%	6,2%	6,4%	7,3%	7,1%	4,7%	6,4%	4,5%	4,4%	3,2%	4,0%	4,9%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat (data s.d. triwulan III-2009)

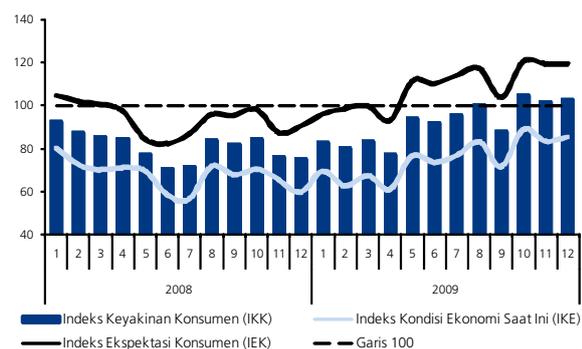
*) Proyeksi KBI Bandung

1.1. Konsumsi

Konsumsi rumah tangga diperkirakan terus menunjukkan peningkatan, sehingga pada triwulan IV-2009 tumbuh 8,3% (yoy), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 8,0% (yoy). Relatif tingginya pertumbuhan konsumsi rumah tangga tersebut didorong oleh peningkatan penghasilan serta peningkatan optimisme dan tingkat keyakinan konsumen. Peningkatan penghasilan tersebut diindikasikan antara lain oleh meningkatnya ekspor, berkurangnya PHK, serta peningkatan penyerapan tenaga kerja akibat kondisi usaha di Jawa Barat yang membaik.

Peningkatan keyakinan konsumen tercermin dari hasil Survei Konsumen di Kota Bandung. Nilai Indeks Keyakinan Konsumen selama triwulan IV-2009 mengalami peningkatan, yaitu dari rata-rata 94,31 pada triwulan III-2009 menjadi 102,80 pada triwulan IV-2009, atau sudah meningkat ke level optimis (di atas 100). Bahkan, nilai tersebut merupakan IKK tertinggi sejak tahun 2008. Apabila dibandingkan dengan kondisi di

Grafik 1.2. Indeks Keyakinan Konsumen



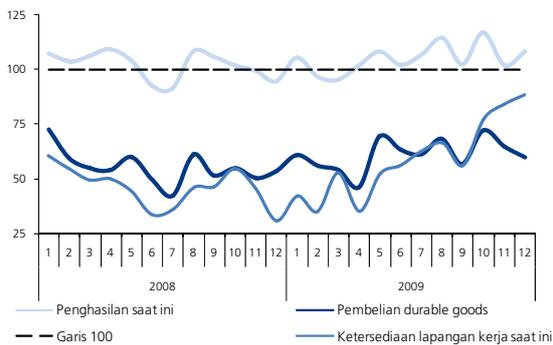
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung.

periode yang sama tahun 2008, pertumbuhan IKK pada triwulan laporan meningkat dari 19% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 31%. Kedua komponen penyusun IKK mengalami kenaikan, baik Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) maupun Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK). Walaupun masih berada di bawah level optimis, IKE mengalami peningkatan cukup signifikan dari rata-rata 77,15 pada triwulan III-2009 menjadi 85,86 pada triwulan IV-2009, atau dengan pertumbuhan yang meningkat dari 18% (yoy) menjadi 32% (yoy). Sementara itu, IEK, yang sudah berada di level optimis, terus

meningkat dari rata-rata 111,48 menjadi 119,75, atau tumbuh membaik dari 20% (yoy) menjadi 30% (yoy).

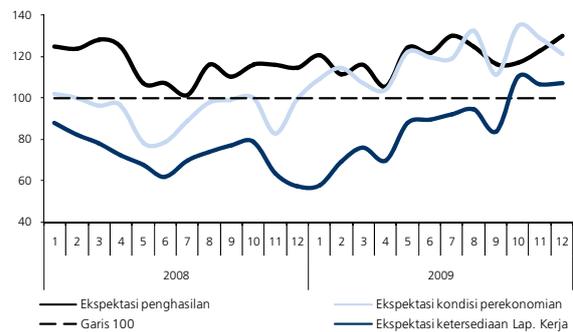
Indeks yang terkait dengan ketenagakerjaan, baik pada komponen IKE maupun IEK, merupakan faktor utama pendorong peningkatan nilai IKE serta IEK pada triwulan laporan, di samping faktor-faktor lainnya yang juga mengalami peningkatan. Pada IKE, indeks ketersediaan lapangan kerja saat ini dibandingkan dengan kondisi 6 bulan yang lalu meningkat signifikan dari rata-rata 61,56 pada triwulan III-2009 menjadi 83,21 pada triwulan IV-2009, atau tumbuh meningkat drastis dari 44% (yoy) menjadi 90% (yoy). Peningkatan pertumbuhan indeks ketersediaan lapangan kerja tersebut salah satunya disebabkan peningkatan penyerapan tenaga kerja baru, seiring optimisme kondisi usaha pada akhir tahun 2009 ini. Situasi ini berbeda dengan triwulan IV-2008, yaitu saat PHK maupun perumahan tenaga kerja banyak dilakukan akibat krisis keuangan global. Selain itu, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja 6 bulan yang akan datang juga terus mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari rata-rata 90,00 selama triwulan III-2009 menjadi 107,80 pada triwulan IV-2009, atau berada di atas level optimis. Adapun pertumbuhannya meningkat dari 23% (yoy) menjadi 62% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 1.3. Komponen Indeks Kondisi Ekonomi Saat ini



Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung

Grafik 1.4. Komponen Indeks Ekspektasi



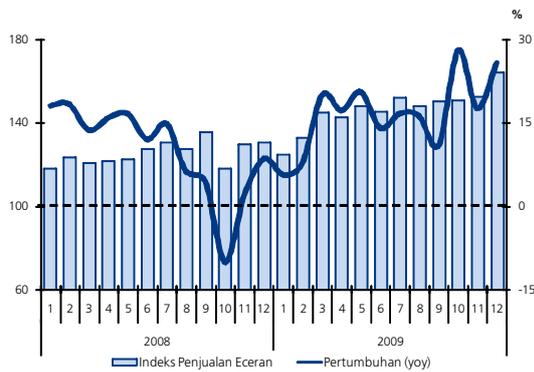
Sumber: Survei Konsumen Bank Indonesia Bandung.

Meningkatnya konsumsi rumah tangga juga diindikasikan oleh peningkatan indeks penghasilan serta indeks pembelian *durable goods*. Berdasarkan hasil Survei Konsumen di Kota Bandung, indeks penghasilan saat ini meningkat tipis dari rata-rata 107,8 selama triwulan III-2009 menjadi 108,9 selama triwulan IV-2009, atau tumbuh membaik dari 6% (yoy) menjadi 10% (yoy). Meningkatnya penghasilan tersebut diperkirakan salah satunya akibat peningkatan pendapatan ekspor, yang selanjutnya akan mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, indeks pembelian *durable goods* juga mengalami peningkatan dari rata-rata 62,11 menjadi 65,50, atau mengalami peningkatan pertumbuhan dari 20% (yoy) menjadi 24% (yoy) pada triwulan laporan.

Peningkatan indeks penjualan eceran pada triwulan IV-2009 juga mengindikasikan peningkatan konsumsi rumah tangga. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran di Kota Bandung, secara keseluruhan, indeks penjualan selama triwulan IV-2009 adalah sebesar 467,78, atau meningkat

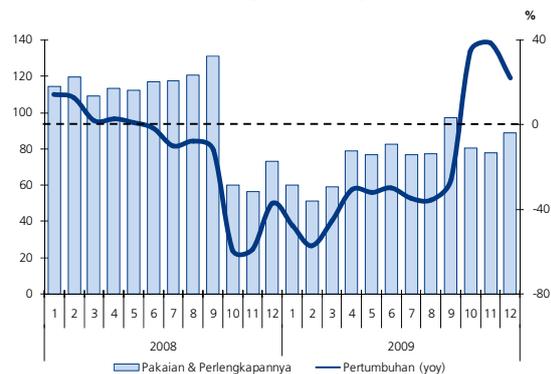
dari indeks pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 450,56. Dilihat dari sisi pertumbuhan tahunannya, indeks tumbuh meningkat dari 15% (yoy) selama triwulan III-2009 menjadi 24% (yoy) selama triwulan IV-2009. Bila dilihat lebih detail, peningkatan indeks penjualan eceran tersebut dipicu oleh kenaikan penjualan pakaian dan perlengkapannya, yang tumbuh meningkat drastis dari turun 32% (yoy) selama triwulan III-2009 menjadi tumbuh positif 31% (yoy) selama triwulan IV-2009.

Grafik 1.5. Indeks Penjualan Eceran



Sumber: Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

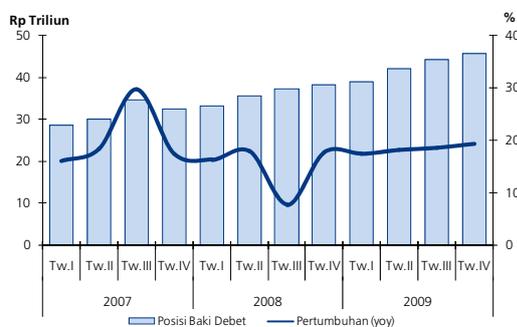
Grafik 1.6. Indeks Penjualan Pakaian dan Perlengkapannya



Sumber: Survei Penjualan Eceran, Bank Indonesia

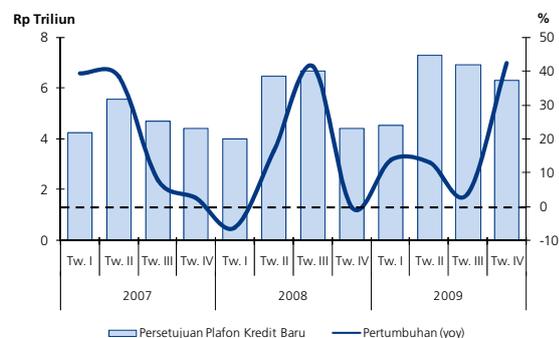
Peningkatan intermediasi perbankan menjadi salah satu sumber penopang tingginya konsumsi rumah tangga. Berdasarkan posisi baki debit, kredit konsumsi mengalami peningkatan pertumbuhan, yaitu dari 18,6% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 19,4% (yoy) pada triwulan IV-2009. Demikian pula halnya dengan angka persetujuan plafon kredit baru untuk penggunaan konsumsi, yang mengalami peningkatan signifikan, dari tumbuh hanya 3,8% (yoy) selama triwulan III-2009 menjadi 42,3% (yoy) selama triwulan IV-2009. Kenaikan kredit konsumsi tersebut diperkirakan antara lain akibat tren penurunan suku bunga pinjaman yang diberikan oleh perbankan.

Grafik 1.7. Posisi Baki Debit Kredit Konsumsi Bank Umum di Jawa Barat



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

Grafik 1.8. Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Konsumsi oleh Bank Umum di Jawa Barat



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

1.2. Investasi

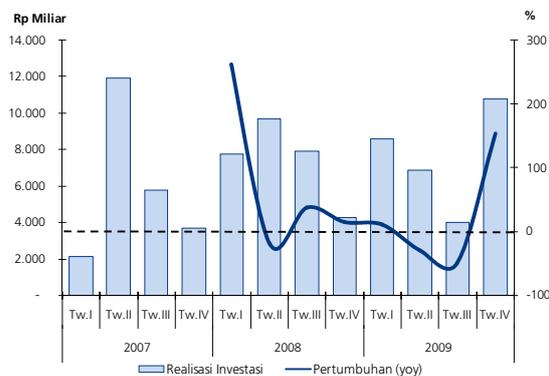
Pertumbuhan investasi (PMTB) diindikasikan relatif membaik pada triwulan IV-2009.

Walaupun diperkirakan masih mengalami kontraksi, investasi di Jawa Barat tumbuh membaik, dari turun 9,0% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi turun 3,8% (yoy) pada triwulan IV-2009. Aktivitas perekonomian yang mulai bergerak menuju pemulihan, meningkatkan optimisme pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka, yang selanjutnya mendorong peningkatan investasi dalam rangka memenuhi kenaikan permintaan yang datang, baik dari domestik maupun luar negeri. Selain itu, sudah terbentuknya pemerintahan Indonesia yang baru turut mendukung iklim usaha lebih kondusif.

Indikasi perbaikan investasi terlihat dari meningkatnya realisasi investasi di Jawa Barat, baik dari sisi nilai realisasi investasi maupun jumlah proyek.

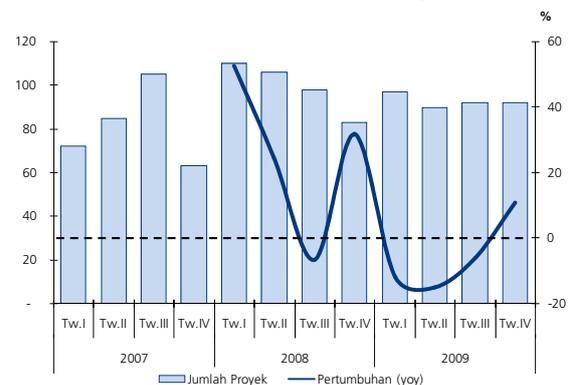
Selama triwulan IV-2009, realisasi investasi tercatat senilai Rp10,76 triliun, meningkat drastis dari pencapaian pada triwulan sebelumnya yang sebesar Rp4,01 triliun. Dengan demikian, pertumbuhan investasi yang pada triwulan III-2009 sebesar -49% (yoy), pada triwulan IV-2009 justru menunjukkan perkembangan yang sangat baik, dengan mencatat pertumbuhan positif sebesar 154% (yoy). Demikian pula halnya dengan jumlah proyek yang direalisasikan pada triwulan IV-2009, yang juga mengalami kenaikan signifikan. Jumlah proyek yang terealisasikan tercatat sebanyak 92 buah proyek, dengan pertumbuhan 11% (yoy), atau meningkat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan III-2009 yang mengalami penurunan 6% (yoy).

Grafik 1.9. Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Nilai Proyek



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Grafik 1.10. Realisasi Investasi di Jawa Barat Berdasarkan Jumlah Proyek



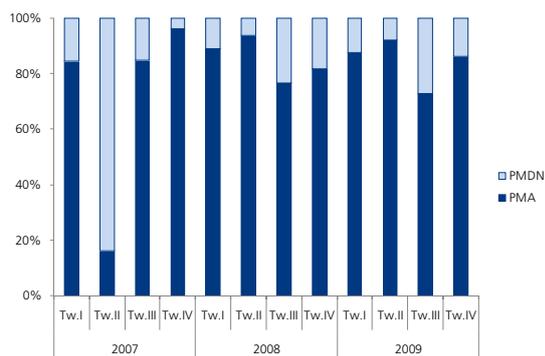
Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Membaiknya kondisi perekonomian global diperkirakan menjadi salah satu faktor utama peningkatan investasi di Jawa Barat pada triwulan laporan.

Kondisi tersebut terjadi akibat naiknya kesejahteraan serta daya beli masyarakat internasional, sehingga meningkatkan investasi asing atau PMA (Penanaman Modal Asing), termasuk di Jawa Barat. Hal ini terlihat dari meningkatnya porsi investasi PMA, dibandingkan investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) pada realisasi investasi di Jawa Barat selama triwulan IV-2009. Pangsa investasi yang bersumber dari PMA

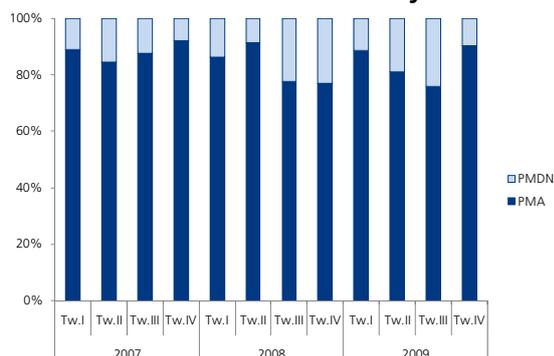
meningkat dari sebelumnya sebesar 73% dari keseluruhan nilai investasi selama triwulan III-2009, menjadi 86% selama triwulan IV-2009. Investasi PMA pada triwulan IV-2009 mencapai Rp9,28 triliun meliputi 83 proyek, sementara investasi PMDN mencapai Rp1,48 triliun meliputi 9 proyek. Selain itu, pertumbuhan investasi PMA meningkat, dari sebelumnya turun 52% (yoy) menjadi tumbuh 168% (yoy) pada triwulan IV-2009. Sementara itu, walaupun pangasanya menurun, investasi PMDN juga mengalami peningkatan signifikan, yaitu dari turun 41% (yoy) pada triwulan sebelumnya menjadi tumbuh 90% (yoy) selama triwulan laporan.

Grafik 1.11. Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Nilai Investasi



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

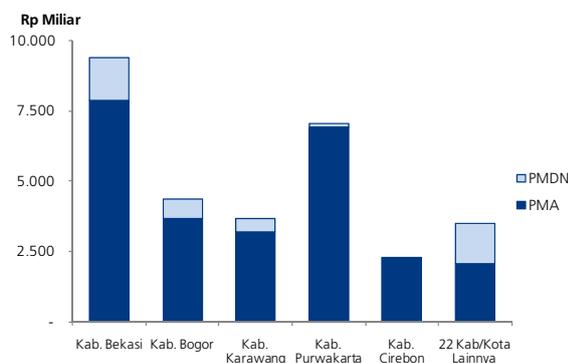
Grafik 1.12. Porsi Realisasi Investasi Berdasarkan Jumlah Proyek



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Kabupaten Bekasi masih menjadi daerah tujuan realisasi investasi terbesar di Jawa Barat selama tahun 2009. Total nilai realisasi investasi di Kabupaten Bekasi tercatat sebesar Rp9,37 triliun, atau 31,0% dari keseluruhan investasi di Jawa Barat. Adapun investasi PMA menguasai investasi di daerah tersebut, dengan pangsa sebesar 84,0%. Selanjutnya, investasi tertinggi diikuti oleh Kabupaten Purwakarta (23,3%), Kabupaten Bogor (14,4%), Kabupaten Karawang (12,2%), serta Kabupaten Cirebon (7,6%).

Grafik 1.13. Distribusi Realisasi Investasi Berdasarkan Wilayah Dati II di Jawa Barat Tahun 2009



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Dilihat dari sektor ekonomi bidang usahanya, mayoritas investasi di Jawa Barat selama tahun 2009 direalisasikan pada sektor sekunder, dengan pangsa sebesar 72,2%. Sementara itu, bila dilihat lebih detail dalam subsektornya, investasi paling besar direalisasikan pada subsektor listrik, gas, dan air, dengan pangsa 14,6% dari keseluruhan realisasi. Kondisi ini menunjukkan tingginya potensi investasi pada subsektor listrik, gas, dan air, khususnya listrik, di Jawa Barat. Contohnya adalah proyek pembangunan konstruksi PLTU Indramayu Unit 1 dan Unit 2 (masing-

masing 330 MW), yang merupakan bagian dari pembangunan proyek listrik 10.000 MW. Sementara itu, PLTU Indramayu Unit 2 dan Unit 3 ditargetkan akan mulai beroperasi pada Desember 2010. Selain itu, salah satu perusahaan Jepang, Marubeni Corp, akan berinvestasi membangun pembangkit listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*) berkapasitas 600 MW di Cirebon, Jawa Barat, dan ditargetkan untuk mulai beroperasi pada tahun 2010. Diperkirakan, investasi yang akan direalisasikan adalah sekitar USD600 juta. Sebelumnya, pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wayang Windu II (117 MW) di Pangalengan, Kabupaten Bandung, juga telah berjalan, dengan nilai investasi mencapai USD210 juta. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Kanci, Kabupaten Cirebon yang saat ini tengah dibangun oleh perusahaan swasta, setelah beroperasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan energi listrik di Jawa Barat. PLTU Kanci yang ditargetkan menghasilkan pasokan listrik sebesar 6.900 MW sudah dapat beroperasi pada tahun 2010 mendatang.

Jawa Barat tercatat sebagai provinsi pemasok listrik dari energi panas bumi yang terbesar di Indonesia, dengan total pasokan mencapai 1.000 MW, atau 88,5% dari kapasitas terpasang total pembangkit listrik tenaga panas bumi. Provinsi Jabar bahkan memiliki potensi energi panas bumi mencapai sekitar 6.000 MW yang tersebar di 40 lokasi di 10 kabupaten, yaitu Sukabumi, Bogor, Cianjur, Bandung, Garut, Subang, Sumedang, Tasikmalaya, Kuningan dan Majalengka. Dalam Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II, pemanfaatan potensi panas bumi direncanakan sebesar 48% atau sekitar 4.733 MW.

Selain subsektor listrik, subsektor industri logam, mesin, dan elektronik serta subsektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain juga mencatat realisasi investasi yang tinggi selama tahun 2009. Realisasi investasi pada subsektor industri logam, mesin, dan elektronik tercatat sebesar Rp4,3 triliun (pangsa 14,2%), sementara realisasi pada subsektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain tercatat bernilai Rp4,2 triliun (pangsa 14,0%). Peningkatan pada subsektor tersebut terealisasi karena besarnya potensi yang besar terhadap pasar kendaraan bermotor di Indonesia. Salah satunya adalah melalui investasi yang dilakukan oleh PT Hino Motor Manufacturing, yang melakukan ekspansi pabrik truk di Purwakarta, Jawa Barat, yaitu dari 10.000 unit/tahun menjadi 35.000 unit/tahun. Selain itu, beberapa produsen kendaraan pun telah menyatakan minatnya untuk berinvestasi di Indonesia. Sementara itu, apabila dilihat dari kenaikannya dibandingkan triwulan III-2009, peningkatan investasi terutama direalisasikan pada subsektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, subsektor industri kimia dan farmasi, serta subsektor listrik, gas, dan air.

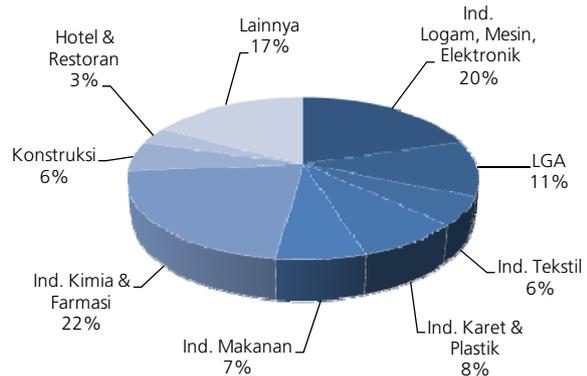
Tabel 1.2. Nilai Realisasi Investasi Di Jawa Barat Menurut Sektor Usaha Tahun 2009 (Rp Miliar)

Sektor Usaha	PMA	PMDN	Total
Sektor Primer	65,0	161,3	226,4
Tanaman Pangan & Perkebunan	-	-	-
Peternakan	65,0	147,6	212,7
Kehutanan	-	-	-
Perikanan	-	-	-
Pertambangan	-	13,7	13,7
Sektor Sekunder	18.383,3	3.420,7	21.804,0
Industri Makanan	680,3	187,8	868,1
Industri Tekstil	2.811,5	1.032,5	3.844,0
Ind. Barang Dari Kulit & Alas Kaki	765,9	-	765,9
Industri Kayu	74,8	-	74,8
Industri Kertas & Percetakan	307,7	507,8	815,5
Industri Kimia & Farmasi	2.545,6	638,4	3.183,9
Industri Karet & Plastik	2.325,9	626,1	2.952,0
Industri Mineral Non Logam	40,7	310,2	350,9
Ind. Logam, Mesin, & Elektronik	4.181,5	113,5	4.295,0
Ind. Instrumen, Kedokteran, Presisi, & Optik dan Jam	94,9	-	94,9
Ind. Kendaraan Bermotor & Alat Transportasi Lain	4.232,1	-	4.232,1
Industri Lainnya	322,4	4,5	326,9
Sektor Tersier	7.597,1	585,4	8.182,5
Listrik, Gas, dan Air	4.417,8	-	4.417,8
Konstruksi	-	37,0	37,0
Perdagangan & Reparasi	733,6	56,4	790,0
Hotel & Restoran	44,9	60,0	104,9
Transportasi, Gudang, dan Komunikasi	3,9	246,9	250,8
Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran	2.334,7	117,6	2.452,3
Jasa Lainnya	62,2	67,4	129,7
Total	26.045,4	4.167,4	30.212,8

Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Peningkatan realisasi investasi juga sejalan dengan kenaikan minat investasi di Jawa Barat. Minat investasi selama tahun 2009, yang ditunjukkan oleh Surat Persetujuan Penanaman Modal (SPPM) yang dikeluarkan pemerintah, tercatat bernilai Rp44,6 triliun, atau tumbuh 8,1% (yoy). Dari sisi jumlah proyek, terdapat total 543 proyek, namun mengalami pertumbuhan negatif sebesar -7,2% (yoy). Mayoritas minat investasi dilakukan pada subsektor industri kimia dan farmasi serta subsektor industri logam, mesin, dan elektronik.

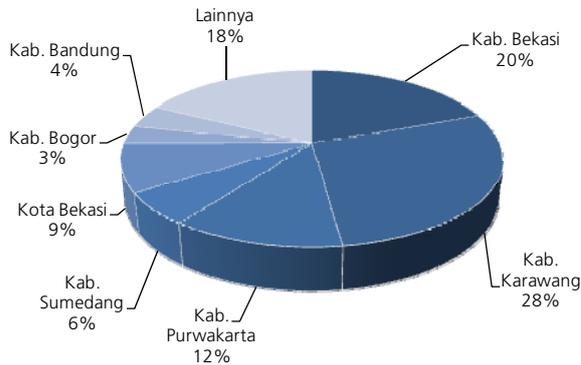
Grafik 1.14. Minat Investasi di Jawa Barat Tahun 2009 Berdasarkan Bidang Usaha



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

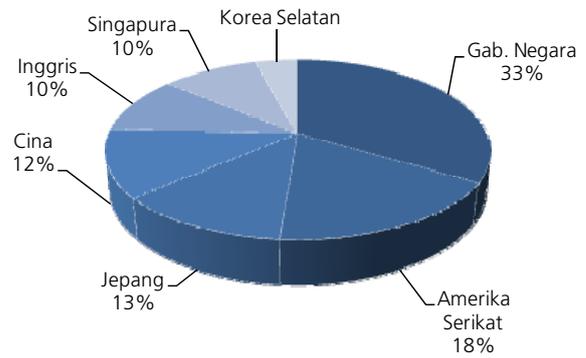
Mayoritas minat investasi berlokasi di daerah-daerah sentra industri. Sebanyak 28% minat investasi berlokasi di Kabupaten Karawang (28%) dan Kabupaten Bekasi (20%). Sementara itu, apabila dilihat dari asal negara calon investor, Amerika Serikat merupakan negara yang menerima SPPM terbanyak selama tahun 2009, dengan pangsa sebesar 18%, diikuti oleh Jepang dengan pangsa 13%, serta Cina dengan pangsa 12%.

Grafik 1.15. Minat Investasi di Jawa Barat Tahun 2009 Berdasarkan Lokasi Usaha



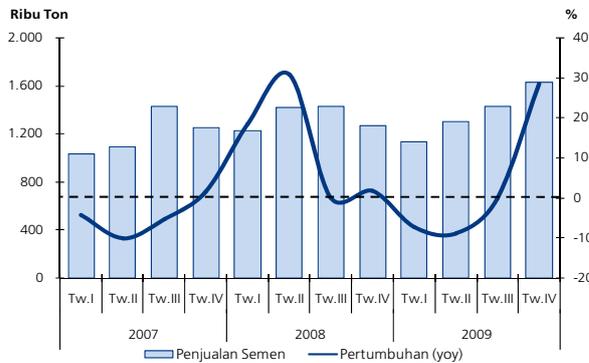
Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Grafik 1.16. Minat Investasi di Jawa Barat Tahun 2009 Berdasarkan Asal Negara PMA



Sumber: Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat

Grafik 1.17. Penjualan Semen di Jawa Barat

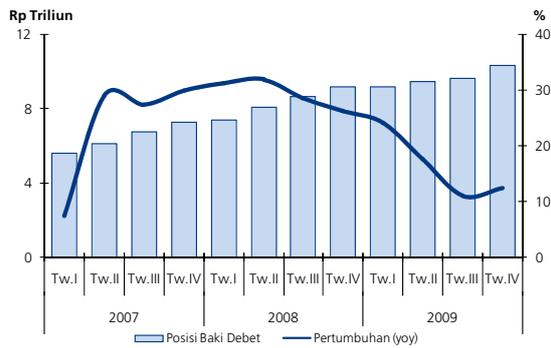


Sumber: Asosiasi Semen Indonesia.

Maraknya investasi bangunan tercermin dari kenaikan penjualan semen di Jawa Barat. Penjualan semen selama triwulan IV-2009 mencatat rekor penjualan tertinggi selama 4 tahun terakhir, yaitu sejumlah 1.626 ribu ton. Di samping itu, setelah selalu tumbuh negatif pada triwulan-triwulan sebelumnya di tahun 2009, penjualan semen mampu tumbuh positif pada triwulan IV-2009 sebesar 28,3% (yoy).

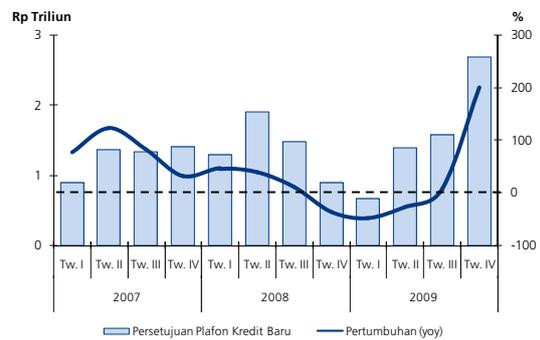
Kenaikan investasi di Jawa Barat didukung pula oleh pembiayaan dari perbankan (lihat Bab. 3. Perbankan). Posisi kredit yang disalurkan perbankan di Jawa Barat tumbuh meningkat dari 11,1% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 12,4% (yoy) pada triwulan IV-2009. Sementara itu, tingginya minat investasi juga ditunjukkan oleh kenaikan yang signifikan dari persetujuan plafon kredit baru untuk penggunaan investasi oleh bank umum di Jawa Barat, yang mencatat nilai sebesar Rp2,69 triliun, jauh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar Rp1,58 triliun. Pertumbuhan persetujuan plafon kredit baru juga mengalami kenaikan drastis, dari sebelumnya 7,1% (yoy) menjadi 201,2% (yoy).

Grafik 1.18 Posisi Penyaluran Kredit Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

Grafik 1.19. Angka Persetujuan Plafon Kredit Baru untuk Penggunaan Investasi oleh Bank Umum di Jawa Barat



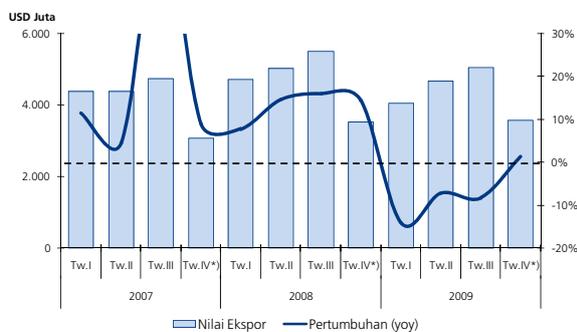
Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung.

1.3. Ekspor

Selama triwulan IV-2009, pemulihan ekonomi global tercermin dari pertumbuhan ekonomi negara-negara maju serta stabilnya pertumbuhan di negara-negara Asia. Ekonomi negara-negara utama dunia, yang juga merupakan mitra dagang utama Jawa Barat, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang, telah melewati masa kontraksi dan menunjukkan pertumbuhan positif. Perkembangan tersebut meningkatkan daya beli masyarakat internasional, yang selanjutnya membawa dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, tidak terkecuali Jawa Barat. Perbaikan tersebut tampak dari meningkatnya permintaan ekspor Jawa Barat selama triwulan IV-2009 sebesar 11,5% (yoy), lebih tinggi daripada triwulan sebelumnya yang tumbuh 9,5% (yoy).

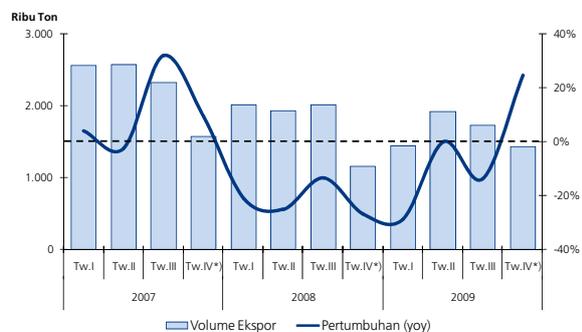
Nilai ekspor Jawa Barat terus menunjukkan peningkatan sejak pertengahan tahun 2009. Realisasi nilai ekspor selama triwulan IV-2009 (periode Oktober-November 2009) tercatat tumbuh 1,4% (yoy), meningkat dibandingkan realisasi pada triwulan sebelumnya (periode Juli-September 2009) yang tercatat mengalami penurunan sebesar 8,2% (yoy). Volume ekspor Jawa Barat bahkan tercatat tumbuh lebih tinggi, dari turun 13,9% (yoy) menjadi tumbuh 24,6% (yoy) pada triwulan IV-2009.

Grafik 1.20. Nilai Ekspor Jawa Barat



Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

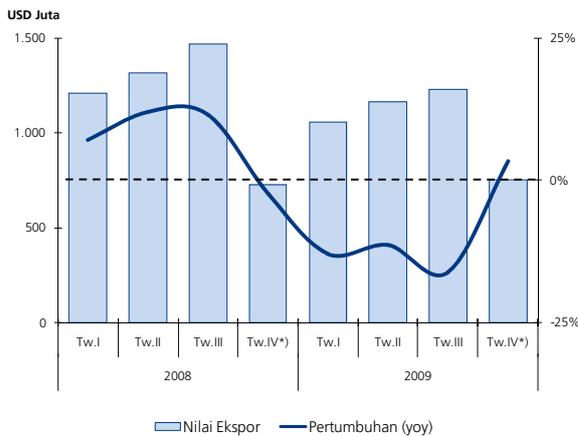
Grafik 1.21. Volume Ekspor Jawa Barat



Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

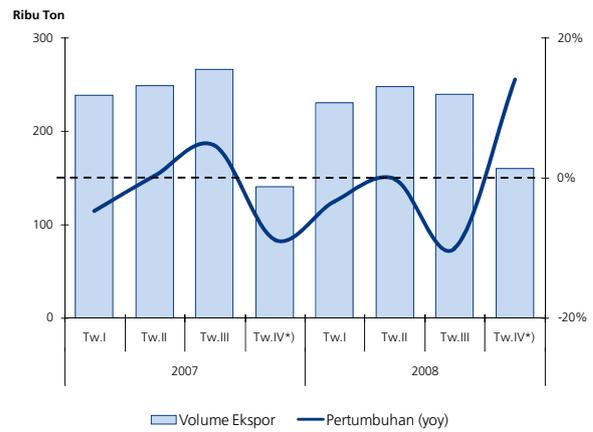
Ekspor Jawa Barat, apabila dilihat dari klasifikasi SITC 2 *digit*, terutama terdiri dari Tekstil dan Produk Tekstil (TPT)¹ dengan pangsa pada tahun 2008 sebesar 25%, alat telekomunikasi (pangsa 12%), serta mesin elektrik (pangsa 9%). Nilai ekspor selama triwulan IV-2009 untuk kelompok TPT meningkat 3,4% (yoy), setelah turun 16,1% (yoy) pada periode sebelumnya. Sementara itu, volume ekspornya mengalami peningkatan 14,1% (yoy), setelah turun 10,1% (yoy) pada triwulan sebelumnya. Nilai ekspor mesin elektrik juga mengalami kenaikan sebesar 4,4%, walaupun volumenya masih turun sebesar 10,7%. Di sisi lain, baik nilai maupun volume ekspor alat telekomunikasi mengalami perlambatan.

Grafik 1.22. Nilai Ekspor TPT



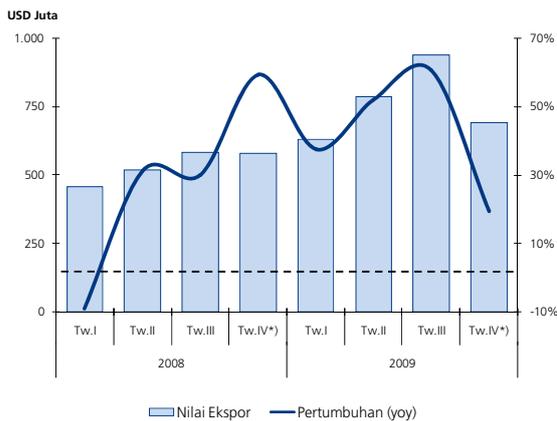
Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

Grafik 1.23. Volume Ekspor TPT



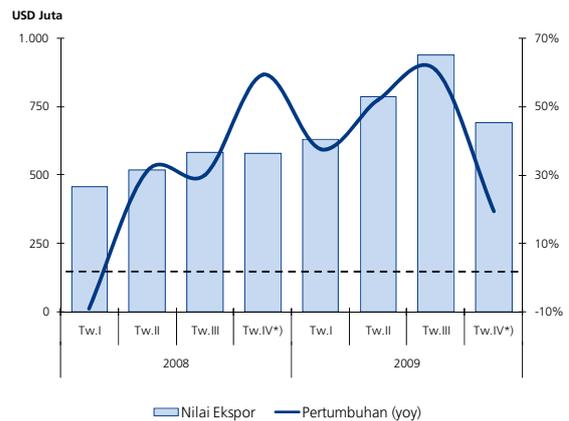
Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

Grafik 1.24. Nilai Ekspor Alat Telekomunikasi



Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

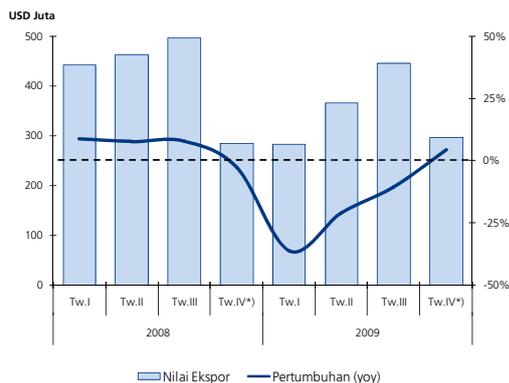
Grafik 1.25. Volume Ekspor Alat Telekomunikasi



Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

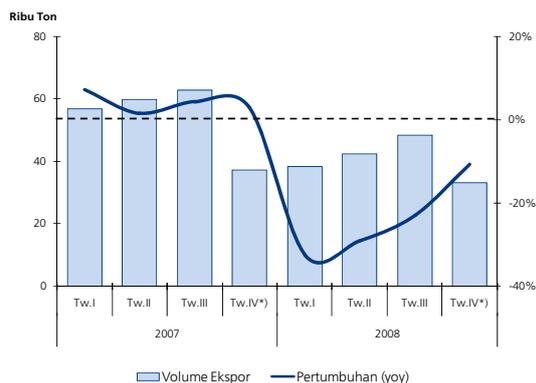
¹ TPT terdiri dari *textile fibres, yarn and fabric*, serta *clothing*

Grafik 1.26. Nilai Ekspor Mesin Elektrik



Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

Grafik 1.27. Volume Ekspor Mesin Elektrik



Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

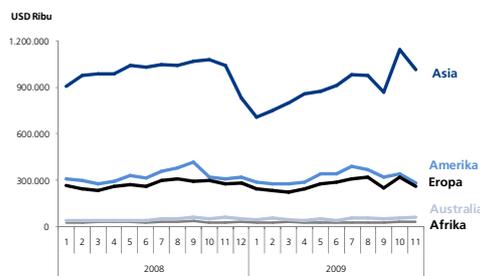
Berdasarkan benua, nilai ekspor keempat dari lima benua tujuan ekspor Jawa Barat mencatat pertumbuhan positif selama triwulan IV-2009 ini. Pertumbuhan paling signifikan terjadi pada nilai ekspor ke Afrika, yaitu sebesar 12,1% (yoy). Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah dan pelaku usaha di Jawa Barat dalam kegiatan promosi dagang ke pasar non-tradisional, seperti Afrika dan Eropa Timur, sehingga ekspor ke Afrika melonjak secara signifikan. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh hasil wawancara langsung dengan pelaku usaha di Jawa Barat, khususnya perusahaan tekstil, yang menyatakan upaya mereka dalam mengalihkan penjualan, dari Amerika Serikat dan Eropa, ke pasar non tradisional lainnya.

Tabel 1.3. Pertumbuhan Nilai Ekspor Berdasarkan Benua Asal Pembeli

Benua	Pertumbuhan Tw.III-209	Pertumbuhan Tw.IV-209
Afrika	-23,3%	12,1%
Amerika Serikat	-7,1%	-1,6%
Asia	-10,4%	1,7%
Australia & Oceania	0,0%	6,6%
Eropa	-1,9%	1,7%

Sumber: Bank Indonesia
Keterangan: untuk sementara, hanya periode Oktober – November

Grafik 1.28. Volume Ekspor Jawa Barat Berdasarkan Benua Pembeli



Sumber: Bank Indonesia

2. SISI PENAWARAN

Peningkatan perekonomian Jawa Barat pada triwulan IV-2009 ditopang oleh perbaikan tiga sektor dominan. Sektor industri pengolahan, sebagai sektor penyumbang PDRB terbesar di Jawa Barat, bahkan sudah menunjukkan pertumbuhan positif pada triwulan IV-2009, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya permintaan dari masyarakat internasional yang sudah mengalami pemulihan daya beli, serta permintaan di pasar domestik yang relatif terjaga. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran juga mengalami peningkatan pertumbuhan, didorong oleh membaiknya subsektor perdagangan. Sementara itu, sektor pertanian mampu tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan

sebelumnya, terutama akibat meningkatnya produksi tanaman pangan, sebagai sumber utama penggerak sektor pertanian.

Tabel 1.4. Pertumbuhan Ekonomi Tahunan Provinsi Jawa Barat Dari Sisi Penawaran

Sektor	2007				2008				2009			
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV*)
Pertanian	-17,6%	-0,5%	2,4%	35,4%	34,8%	-2,0%	-3,5%	-11,2%	2,7%	9,7%	3,3%	4,6%
Pertambangan & Penggalian	-2,9%	-6,2%	-5,5%	-14,6%	-15,3%	-15,9%	-8,8%	2,4%	1,0%	4,6%	10,9%	8,4%
Industri Pengolahan	7,1%	4,8%	3,6%	4,2%	5,5%	9,5%	10,5%	10,8%	4,3%	-1,6%	-1,2%	1,1%
Listrik, Gas, & Air Bersih	7,2%	4,9%	2,7%	6,7%	4,7%	5,4%	3,7%	3,3%	4,5%	11,0%	22,6%	2,1%
Bangunan / Konstruksi	13,4%	10,1%	10,5%	0,2%	2,1%	1,2%	13,4%	19,2%	3,9%	8,5%	2,4%	2,9%
PHR	17,1%	15,8%	18,1%	9,1%	3,6%	2,8%	6,1%	-0,8%	6,5%	6,8%	12,4%	12,9%
Pengangkutan & Komunikasi	19,9%	12,1%	8,6%	-0,8%	0,5%	7,0%	3,5%	0,7%	7,7%	11,1%	10,5%	11,5%
Kuangan, Persewaan, Jasa Perusahaan	11,4%	12,9%	10,1%	1,2%	-1,8%	3,5%	8,6%	9,9%	2,5%	4,3%	5,0%	6,5%
Jasa-jasa	4,3%	0,9%	1,2%	0,4%	1,1%	-0,1%	2,4%	3,8%	2,7%	4,0%	3,4%	4,1%
PDRB	5,7%	6,2%	6,4%	7,3%	7,1%	4,7%	6,4%	4,5%	4,4%	3,2%	4,0%	4,9%

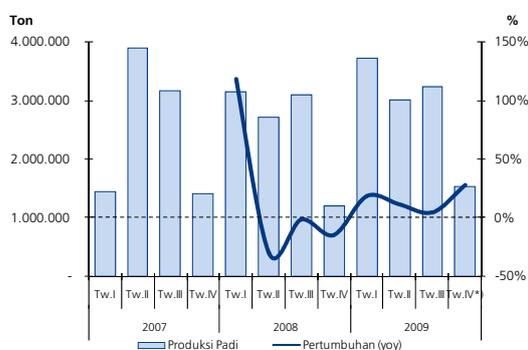
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat
*) Proyeksi KBI Bandung

2.1. Sektor Pertanian

Sektor pertanian pada triwulan IV-2009 diperkirakan tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya, yaitu dari 3,3% (yoy) menjadi 4,6% (yoy). Perkembangan tersebut ditopang terutama oleh membaiknya subsektor tanaman bahan pangan, khususnya padi, yang merupakan kontributor utama sektor pertanian di Jawa Barat.

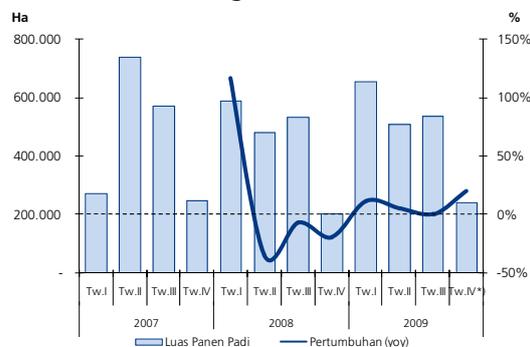
Berdasarkan data sementara dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat, produksi padi serta luas panen padi pada triwulan IV-2009 mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2008. Produksi padi sawah dan ladang selama triwulan IV-2009 mencapai 1,5 juta ton, atau tumbuh 28,1% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III-2009 yang sebesar 4,3% (yoy). Sementara itu, luas panen padi selama triwulan IV-2009 juga meningkat, dari sebelumnya hanya tumbuh 0,5% (yoy), menjadi tumbuh 19,8% (yoy) atau mencapai 241 ribu hektar.

Grafik 1.29. Produksi Padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat
*) Angka Sementara

Grafik 1.30. Luas Panen Padi Sawah dan Ladang di Jawa Barat

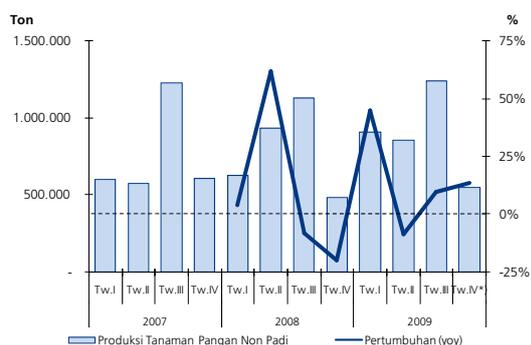


Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat
*) Angka Sementara

Produksi beberapa produk pertanian lainnya juga mengalami perkembangan yang baik.

Produksi tanaman pangan lainnya selain padi, meliputi komoditas jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar tumbuh meningkat selama triwulan IV-2009. Berdasarkan data Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat Total produksi yang dicapai selama triwulan IV-2009 adalah sebesar 551.840 ton, atau tumbuh 13,7% (yoy). Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan III-2009 yang sebesar 13,7% (yoy). Salah satu penyebab peningkatan produksi tersebut adalah bertambahnya luas panen pada triwulan IV-2009, yang tumbuh sebesar 23,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh 22,6% (yoy).

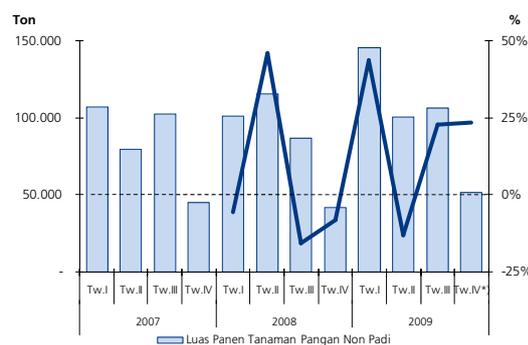
Grafik 1.31. Produksi Tanaman Pangan Non Padi di Jawa Barat



Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat

*) Angka Sementara

Grafik 1.32. Luas Panen Tanaman Pangan Non Padi di Jawa Barat



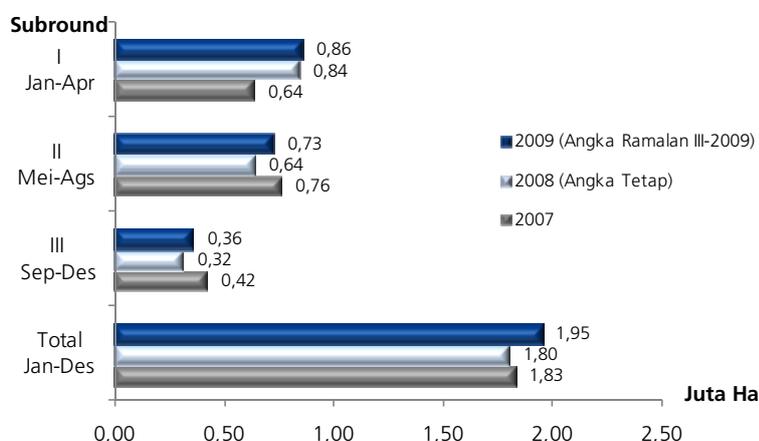
Sumber: Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jawa Barat

*) Angka Sementara

Dilihat dari periodenya, kenaikan luas panen padi di Jawa Barat mengalami pertumbuhan yang relatif tinggi, khususnya selama subround III-2009.

Berdasarkan Angka Ramalan III (ARAM III) BPS, luas panen padi diperkirakan meningkat cukup signifikan pada subround III (September-Desember 2009), yaitu sebesar 14,3% (yoy). Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi selama tahun 2009, apabila dibandingkan pertumbuhan pada subround I dan subround II yang masing-masing sebesar 1,9% (yoy) dan 13,3% (yoy). Perkiraan tersebut mendukung perkiraan produksi Dinas Pertanian, yang mencatat pertumbuhan yang meningkat pada triwulan IV-2009.

Grafik 1.33. Luas Panen Padi Jawa Barat



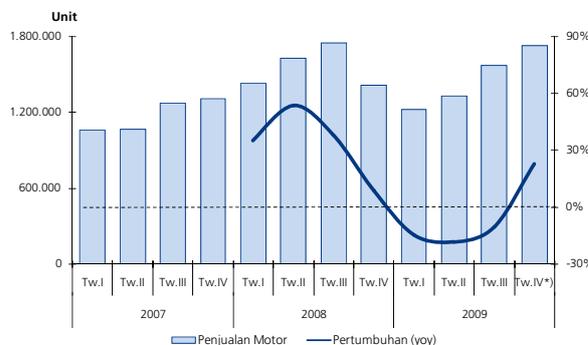
Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

2.2. Sektor Industri Pengolahan

Pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan mengalami perbaikan pada triwulan IV-2009, setelah turun berturut-turut selama dua periode sebelumnya. Sektor tersebut diperkirakan tumbuh sebesar 1,1% (yoy), membaik dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun 1,2% (yoy). Perbaikan tersebut terutama disebabkan oleh mulai meningkatnya permintaan, khususnya dari luar negeri, terhadap produk-produk industri pengolahan yang berorientasi ekspor. Selain itu, permintaan dalam negeri juga diperkirakan relatif terjaga, sehingga turut mendukung perbaikan kinerja industri pengolahan.

Peningkatan kinerja industri pengolahan pada subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya tercermin dari pertumbuhan positif penjualan kendaraan bermotor secara nasional. Pada triwulan IV-2009 ini, penjualan motor maupun mobil secara nasional masing-masing diperkirakan tumbuh sebesar 23% (yoy) dan 6%, setelah mengalami penurunan sebesar 10% dan 27% pada triwulan III-2009. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa permintaan masyarakat terhadap kendaraan bermotor mulai pulih setelah sempat anjlok pada paruh pertama tahun 2009 akibat pelemahan daya beli serta kenaikan harga kendaraan bermotor. Penurunan suku bunga pembiayaan juga diperkirakan turut meningkatkan minat konsumen untuk membeli kendaraan. Penjualan motor selama triwulan IV-2009 diperkirakan 1,7 juta unit, sementara penjualan mobil mencapai sekitar 148 ribu unit.

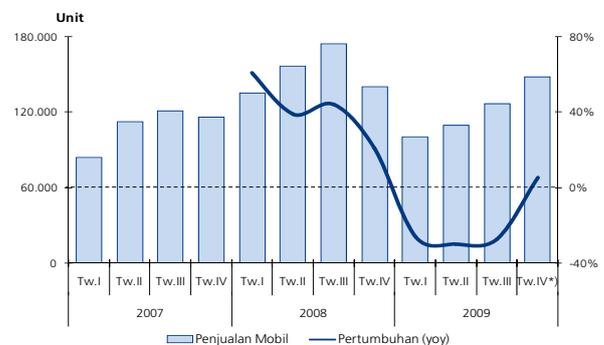
Gambar 1.34. Penjualan Motor Nasional



Sumber: Bank Indonesia

*) Prediksi Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia

Gambar 1.35. Penjualan Mobil Nasional

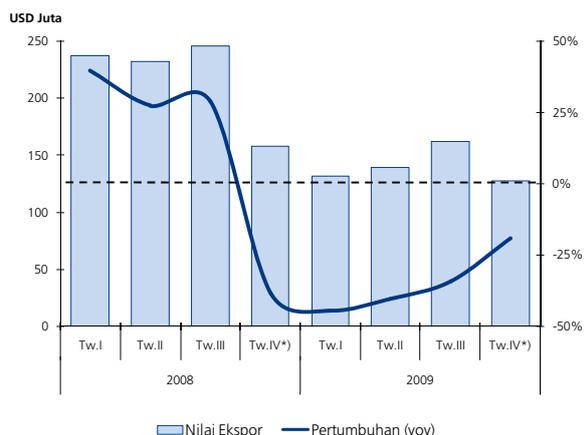


Sumber: Bank Indonesia

*) Prediksi Gaikindo

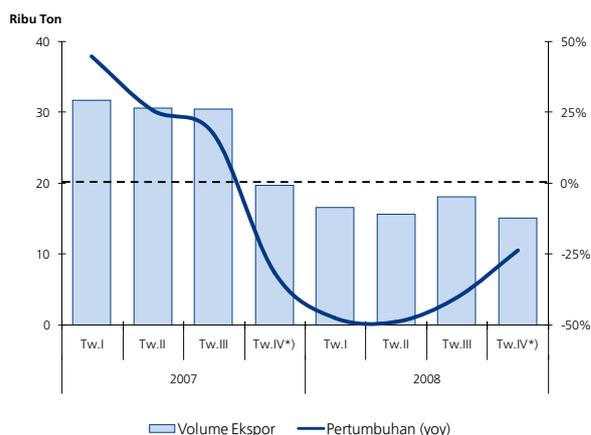
Perbaikan kinerja subsektor alat angkutan, mesin, dan peralatannya juga terlihat dari volume ekspor kendaraan (road vehicle) yang relatif membaik. Sebelumnya, nilai ekspor kendaraan mengalami penurunan 34,2% (yoy), sementara volumenya turun sebesar 40,3% (yoy). Sementara pada triwulan IV-2009 (Oktober s.d. November 2009), nilai ekspor kendaraan tumbuh membaik menjadi -19,0% (yoy) untuk nilai ekspor, dan -23,6% (yoy) untuk volume ekspor.

Gambar 1.36. Nilai Ekspor Kendaraan



Sumber: Bank Indonesia
*) Meliputi periode Oktober s.d. November

Gambar 1.37. Volume Ekspor Kendaraan



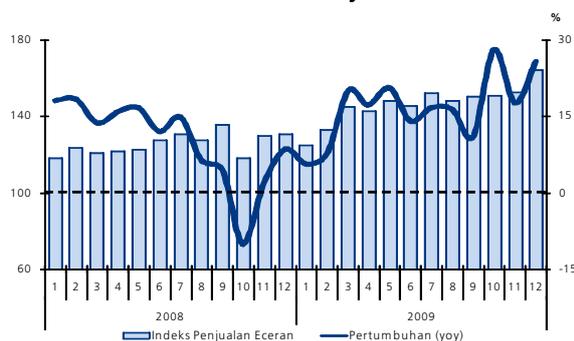
Sumber: Bank Indonesia
*) Meliputi periode Oktober s.d. November

Penjualan elektronik juga diyakini terus membaik pada triwulan IV-2009. Bahkan, penjualan elektronik selama tahun 2009 diyakini mampu tumbuh positif, yaitu sekitar 10% (yoy). Berdasarkan data dari Electronic Marketer Club, pertumbuhan penjualan elektronik secara nasional terus meningkat sejak paruh kedua tahun 2009, terutama Oktober 2009, yang diyakini merupakan penjualan tertinggi sejak Januari s.d. Oktober 2009. Adapun penjualan barang elektronik yang mengalami peningkatan antara lain *video player*, televisi LCD, AC, dan mesin cuci.

2.3. Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran

Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) di Jawa Barat diperkirakan tumbuh sedikit meningkat pada triwulan IV-2009. Peningkatan tersebut terjadi baik pada subsektor perdagangan, kontributor terbesar pada sektor PHR, maupun subsektor hotel. Peningkatan pada subsektor perdagangan tercermin dari indeks penjualan eceran. Berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran di Kota Bandung, indeks penjualan eceran meningkat, dari tumbuh 15% (yoy) selama triwulan III-2009, menjadi tumbuh 24% (yoy) selama triwulan IV-2009. Peningkatan terutama terjadi pada penjualan pakaian dan perlengkapannya.

Grafik 1.38. Indeks Penjualan Eceran



Sumber: Survei Penjualan Eceran, KBI Bandung

Sementara itu, subsektor hotel di Jawa Barat juga mengalami peningkatan. Kondisi tersebut terlihat dari meningkatnya pertumbuhan rata-rata Tingkat Hunian Kamar (THK) hotel selama Oktober-November 2009 dibandingkan triwulan sebelumnya, dari 13,7% (yoy) menjadi 26,2% (yoy). Saat ini, terdapat 1.235 hotel yang terdiri dari 175 hotel berbintang dan 1.060 hotel melati di Jawa Barat, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 26.551 orang. Sedangkan jumlah restoran di Jawa Barat saat ini

sebanyak 635 unit dan 2.725 rumah makan yang mampu menyerap 21.959 orang. Mayoritas perhotelan dan restoran di Jawa Barat berlokasi di Kota Bandung, disusul oleh kawasan Bogor serta beberapa kawasan wisata lainnya yang tersebar di Jawa Barat.

Tabel 1.5. Indikator Perhotelan di Jawa Barat

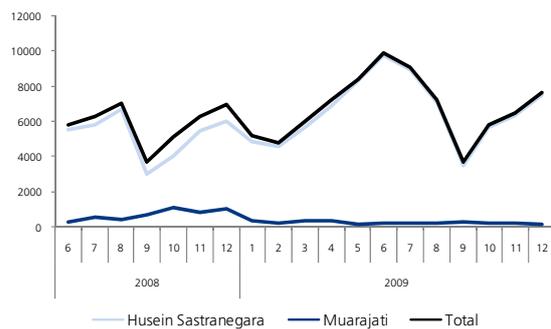
Tingkat Hunian Kamar	2008				2009				Pertumbuhan Tw.III-09 (yoy)	Pertumbuhan Tw.IV-09 (yoy)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Hotel Bintang	42,31	41,40	40,03	40,45	43,65	43,10	46,93	49,67	17,2%	22,8%
Hotel Non Bintang	24,54	25,24	25,18	27,13	24,96	28,08	27,40	32,35	8,8%	19,3%
Hotel Bintang & Non Bintang	36,01	31,22	32,84	33,87	35,23	36,75	37,33	42,75	13,7%	26,2%

Sumber: BPS Provinsi Jabar

Keterangan: data merupakan rata-rata dari data THK bulanan

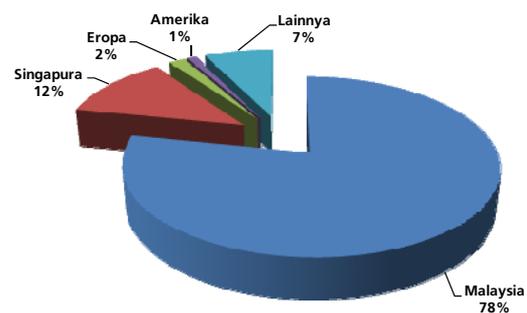
Perkembangan sektor PHR tidak terlepas dari banyaknya kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara. Besarnya wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jawa Barat salah satunya diindikasikan oleh jumlah wisman yang langsung berkunjung melalui pintu masuk yang ada di Jawa Barat, yaitu melalui Bandara Husein Sastranegara di Kota Bandung serta Pelabuhan Muarajati di Kota Cirebon. Kedatangan wisman pada kedua pintu tersebut mengalami tren peningkatan pada triwulan IV-2009, setelah terus turun sepanjang triwulan III-2009. Peningkatan terutama terjadi pada jumlah wisman yang melalui Bandara Husein Sastranegara, sementara jumlah yang datang melalui Pelabuhan Muarajati mengalami tren penurunan, karena jumlah crew kapal yang menurun. Dilihat dari asalnya, mayoritas wisman berkebangsaan Malaysia dan Singapura, yang memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia, diikuti oleh Eropa dan Amerika. Peningkatan jumlah wisman pada triwulan laporan terutama didorong oleh kenaikan jumlah wisman berkebangsaan Singapura.

Grafik 1.39. Perkembangan Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jabar

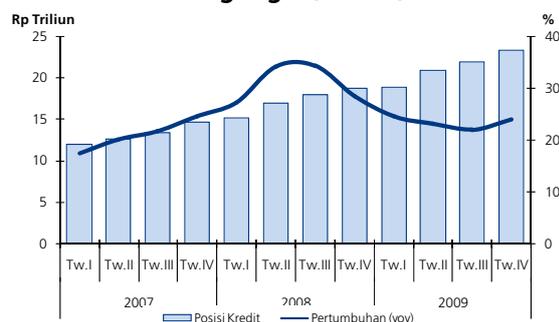
Grafik 1.40. Asal Wisatawan Mancanegara yang Berkunjung ke Jawa Barat



Sumber: BPS Provinsi Jabar

Dukungan pembiayaan diperkirakan membantu sektor PHR untuk tumbuh lebih tinggi pada triwulan IV-2009. Posisi kredit yang disalurkan oleh perbankan di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 mengalami peningkatan. Setelah sebelumnya melambat dengan laju pertumbuhan sebesar 22,0% (yoy), kredit ke sektor PHR meningkat 23,29% (yoy) selama triwulan IV-2009.

Grafik 1.41. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

2.4. Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan

Sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan diperkirakan mengalami pertumbuhan yang meningkat pada triwulan IV-2009. Pertumbuhan sektor tersebut diperkirakan sebesar 6,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 5,0% (yoy). Peningkatan tersebut didukung oleh perbaikan, khususnya pada subsektor keuangan. Nilai tambah bank umum, meningkat sebesar 25,90% (yoy) pada triwulan IV-2009, cukup tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang tumbuh 4,15% (yoy).

Tabel 1.6. Nilai Tambah Bank Umum di Jawa Barat (Rp Miliar)

Nilai Tambah	2008				2009				Pertumbuhan Tw.III-2009 (yoy)	Pertumbuhan Tw.IV-2009 (yoy)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Bank Umum Pemerintah	870	1.878	3.040	4.182	1.213	2.742	3.397	5.938	11,73%	41,98%
Bank Swasta Nasional	544	1.158	1.757	2.246	504	1.105	1.680	2.246	-4,37%	0,02%
Bank Asing dan Campuran	37	72	100	104	(11)	8	23	40	-76,77%	-61,78%
Total	1.452	3.108	4.897	6.532	1.707	3.856	5.100	8.224	4,15%	25,90%

Sumber: LBU KBI Bandung

Sementara itu, kondisi subsektor persewaan diperkirakan masih tumbuh relatif stabil. Hal tersebut terlihat dari masih stabilnya pertumbuhan pada persewaan bangunan, meliputi sewa kantor, sewa pusat perbelanjaan, serta sewa apartemen. Jumlah area yang disewakan untuk pusat perbelanjaan sedikit mengalami perbaikan, namun total area kantor yang disewakan tumbuh sedikit menurun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya, walau masih meningkat secara triwulanan. Sementara itu, apartemen yang disewakan masih tumbuh stabil.

Tabel 1.7. Perkembangan Persewaan Bangunan

Jenis Properti	2008				2009				Pertumbuhan Tw.III-2009 (yoy)	Pertumbuhan Tw.IV-2009 (yoy)
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Sewa Kantor	18.230	26.563	25.181	25.528	25.181	25.181	25.181	25.205	0,00%	-1,27%
Sewa Pusat Perbelanjaan	57.880	58.325	58.437	58.580	58.482	53.754	53.817	53.956	-7,91%	-7,89%
Sewa Apartemen	474	474	474	474	468	468	468	468	-1,27%	-1,27%

Sumber: Survei Properti Komersial Kota Bandung

2.5. Sektor Bangunan/Konstruksi

Peningkatan pertumbuhan diperkirakan terjadi pada sektor bangunan/konstruksi di Jawa Barat pada triwulan IV-2009. Dari sisi pelaku usaha, investasi pada komponen bangunan diperkirakan mengalami perbaikan, seiring dengan optimisme pelaku usaha dalam memandang kondisi usaha ke depan. Kondisi tersebut diindikasikan oleh pertumbuhan konsumsi semen yang meningkat sebesar 28,3% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun 0,2% (yoy). Berdasarkan hasil Survei Properti Komersial, properti di Kota Bandung masih tumbuh relatif stabil, baik sewa maupun jual.

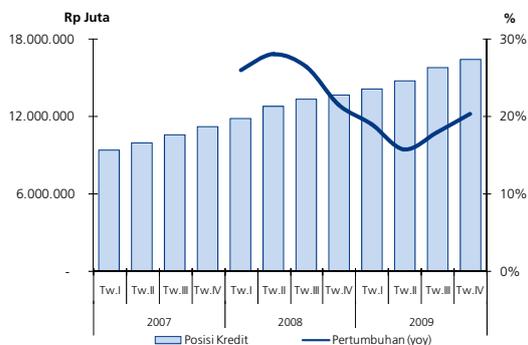
Tabel 1.8. Perkembangan Properti Komersial

Jenis Properti	2008				2009				Pertumbuhan Tw.III-2009 yoy	Pertumbuhan Tw.IV-2009 yoy
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Perkantoran Sewa (m ²)	18.230	26.563	25.181	25.528	25.181	25.181	25.181	25.205	0,0%	-1,3%
Pusat Perbelanjaan Sewa dan Jual (m ²)	106.260	107.040	107.152	105.252	105.555	101.139	101.217	101.356	-5,5%	-3,7%
Apartemen Jual (unit)	558	558	558	558	558	558	558	558	0,0%	0,0%
Hotel Bintang 3,4, dan 5 (jumlah kamar)	1.274	1.420	1.436	1450	1.432	1.535	1.550	1.561	7,9%	7,7%

Sumber: Survei Properti Komersial Kota Bandung

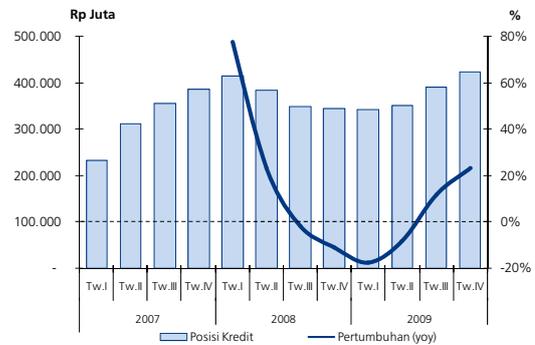
Peningkatan di sektor bangunan/konstruksi juga terindikasikan oleh pembiayaan perbankan untuk konsumsi dalam hal kepemilikan bangunan. Posisi kredit kepemilikan rumah (KPR) dan kepemilikan apartemen (KPA) tumbuh 20,3% (yoy) pada triwulan IV-2009, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 18,0% (yoy). Peningkatan tersebut juga diikuti oleh kenaikan pertumbuhan kredit kepemilikan ruko/rukan dari sebelumnya tumbuh 11,9% (yoy), menjadi tumbuh 23,1% (yoy). Hal ini menandakan tingginya minat kepemilikan bangunan oleh masyarakat, yang pada umumnya diikuti oleh meningkatnya pertumbuhan pada sektor bangunan/konstruksi.

Grafik 1.42. Posisi Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Kepemilikan Apartemen (KPA)



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

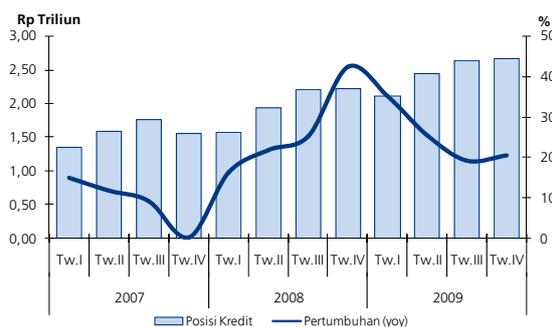
Grafik 1.43. Posisi Kredit Kepemilikan Rumah Toko (Ruko) dan Rumah Kantor (Rukan)



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

Meningkatnya sektor konstruksi diikuti oleh bergerak naiknya pembiayaan. Posisi kredit yang disalurkan perbankan Jawa Barat ke sektor konstruksi mengalami pertumbuhan 20,5% (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang sebesar 19,2% (yoy). Minat investasi di sektor konstruksi yang semakin meningkat diperkirakan menjadi faktor utama yang mendorong perbankan dalam penyaluran kreditnya ke sektor yang bersangkutan.

Grafik 1.44. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Konstruksi

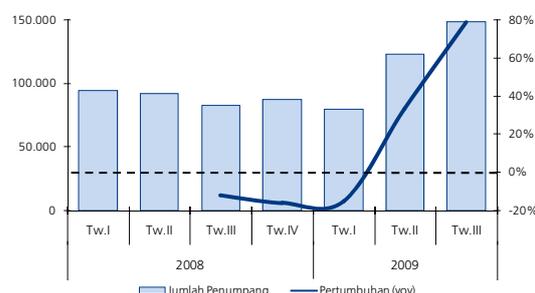


Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

2.6. Sektor Pengangkutan dan Komunikasi

Sektor pengangkutan dan komunikasi diperkirakan terus menunjukkan peningkatan pada triwulan IV-2009, diindikasikan antara lain oleh kenaikan jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara serta jumlah kendaraan yang melalui 12 gerbang tol di Jawa Barat. Jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara meningkat signifikan pada triwulan IV-2009, yaitu dari sebelumnya tumbuh 79,0% (yoy), menjadi tumbuh 91,3% (yoy) pada triwulan IV-2009 ini. Sementara itu, pertumbuhan arus lalu lintas pada gerbang tol di Jawa Barat sedikit meningkat. Selama triwulan III-2009, rata-rata pertumbuhan jumlah kendaraan yang keluar-masuk 12 gerbang tol adalah sebesar 5,6% (yoy). Sementara itu, pada triwulan IV-2009 ini, pertumbuhan meningkat menjadi rata-rata sebesar 6,4% (yoy).

Grafik 1.45. Jumlah Penumpang Domestik dan Internasional di Bandara Husein Sastranegara



Sumber: PT Persero Angkasa Pura II

Tabel 1.9. Jumlah Kendaraan yang Melintasi 12 Gerbang Tol di Jawa Barat

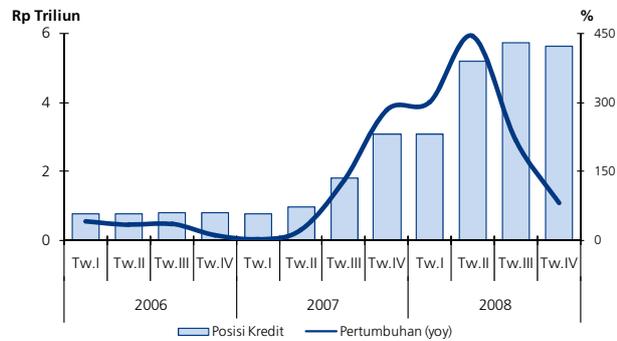
Gerbang Tol	Tw.IV-08		Tw.IV-09		Pertumbuhan (yoy)	
	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar	Masuk	Keluar
Sadang	446.371	413.020	473.818	488.949	6,1%	18,4%
Jatiluhur	328.005	331.526	349.968	355.772	6,7%	7,3%
Padalarang Barat	1.819.660	2.058.589	2.024.122	2.213.513	11,2%	7,5%
Padalarang	1.537.293	1.416.627	1.679.417	1.516.782	9,2%	7,1%
Baros 1	490.337	736.889	492.841	791.899	0,5%	7,5%
Baros 2	732.411	519.015	777.330	521.162	6,1%	0,4%
Pasteur	2.471.023	2.409.460	2.630.558	2.565.438	6,5%	6,5%
Pasir Koja	1.369.504	1.097.510	1.452.330	1.200.466	6,0%	9,4%
Kopo	999.108	1.072.985	1.047.872	1.114.475	4,9%	3,9%
M Toha	790.689	857.701	869.180	953.327	9,9%	11,1%

Buah Batu	1.237.695	1.340.628	1.247.096	1.336.397	0,8%	-0,3%
Cileunyi	1.852.876	1.833.189	1.916.523	1.945.335	3,4%	6,1%
TOTAL	14.074.972	14.087.139	14.961.055	15.003.515	6,3%	6,5%

Sumber: PT Jasa Marga Kantor Cabang Purbaleunyi

Penyaluran kredit ke sektor transportasi dan komunikasi mengalami perlambatan, yaitu dari tumbuh 216,6% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 82,1% (yoy) pada triwulan IV-2009. Namun demikian, pertumbuhan tersebut masih tergolong cukup tinggi, dan terlihat kembali ke kondisi normal tahun 2006.

Grifik 1.46. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum ke Sektor Pengangkutan dan Komunikasi



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

2.7. Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih

Sektor listrik, gas, dan air bersih di Jawa Barat diperkirakan mengalami perlambatan pada triwulan IV-2009. Perlambatan tersebut terutama disebabkan oleh melambatnya subsektor listrik, yang diindikasikan oleh melambatnya laju pertumbuhan pemakaian listrik di Jawa Barat, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun industri. Khusus untuk listrik rumah tangga, konsumsi listrik melambat dari sebelumnya tumbuh 27,04% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi tumbuh 20,03% (yoy) pada triwulan laporan.

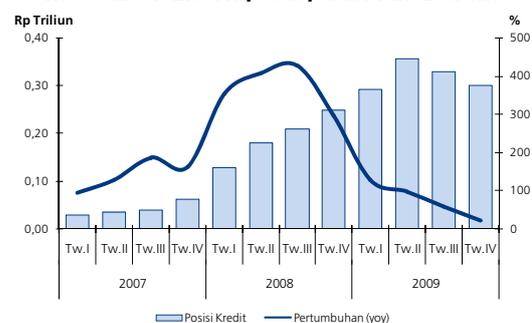
Tabel 1.10. Pemakaian Listrik di Jawa Barat (Juta Kwh)

Penggunaan	2008			2009				Pertumbuhan Tw.III-09 (yoy)	Pertumbuhan Tw.IV-09 (yoy)
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV		
Rumah Tangga	2.419	2.513	2.611	2.682	2.903	3.000	3.058	19,41%	17,10%
Industri	3.807	3.918	4.083	4.202	4.794	5.169	4.977	31,93%	21,91%
Total	6.226	6.431	6.694	6.884	7.697	8.170	8.035	27,04%	20,03%

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Perlambatan juga terlihat dari melambatnya laju pertumbuhan pembiayaan. Penyaluran kredit bank umum di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 tumbuh 20,8% (yoy), jauh melambat apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 58,2% (yoy). Walaupun melambat, investasi pada subsektor listrik di Jawa Barat masih sangat diminati, seperti PLTU Indramayu Unit 1, 2, dan 3, rencana investasi oleh perusahaan Jepang untuk membangun pembangkit listrik di Cirebon, Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Wayang

Grifik 1.47. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

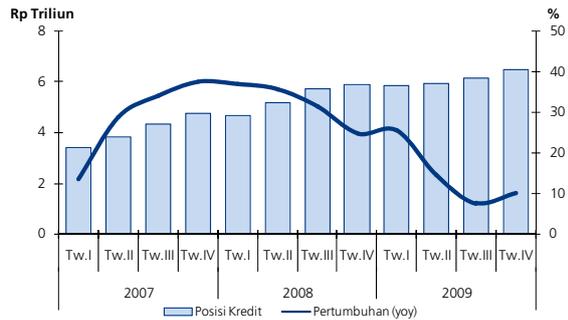
Windu II di Pengalengan, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di Kanci (Kabupaten Cirebon).

2.8. Sektor Jasa-Jasa

Sektor jasa-jasa diperkirakan tumbuh meningkat pada triwulan IV-2009.

Peningkatan tersebut diperkirakan terjadi akibat meningkatnya aktivitas industri serta perdagangan di wilayah Jawa Barat, yang selanjutnya akan mendorong peningkatan permintaan akan jasa-jasa, terutama jasa dunia usaha. Kondisi tersebut tercermin dari meningkatnya penyaluran kredit perbankan oleh bank umum di Jawa Barat ke sektor jasa, yaitu dari tumbuh 7,5% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 9,9% (yoy) pada triwulan IV-2009.

Grafik 1.48. Penyaluran Kredit oleh Bank Umum di Jawa Barat ke Sektor Jasa Dunia Usaha dan Sosial



Sumber: Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), KBI Bandung

BOKS 1

PENGHARGAAN WILAYAH-WILAYAH JAWA BARAT DARI SEGI INVESTASI DAN KEMUDAHAN USAHA

Investment Awards 2009

Dalam rangka mendorong peningkatan investasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) setiap tahun memberikan penghargaan kepada pemerintahan daerah serta perusahaan yang dinilai berhasil dalam hal penanaman modal (*Investment Award*). Peningkatan dilakukan dengan menggunakan 6 indikator utama, yaitu kelembagaan instansi penanaman modal, pelayanan perizinan usaha, mekanisme pengaduan, pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, ketersediaan informasi, serta inovasi dan capaian kinerja. Adapun penilaian atas keenam indikator tersebut di setiap daerah dipertanyakan kepada 9.000 responden di seluruh Indonesia.

Dari penghargaan tersebut, empat kabupaten/kota di Jawa Barat berhasil meraih peringkat yang cukup tinggi. Kabupaten Purwakarta menjadi peringkat pertama dalam bidang pelayanan investasi, untuk kategori kabupaten. Kota Cimahi meraih juara kedua untuk kategori kota dengan pelayanan penanaman modal terbaik, sementara Kota Bandung meraih penghargaan sebagai kota terbaik ketiga dalam hal penyediaan dan peningkatan iklim investasi. Sementara itu, Kota Banjar berhasil menjadi peringkat pertama sebagai kota penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu terbaik. Penghargaan yang diperoleh keempat wilayah tersebut tidak terlepas dari berdirinya Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPT) di masing-masing wilayah.

Investor yang berusaha di Jawa Barat pada tahun 2009, juga menerima *Investment Award*, yaitu PT Hino Motors Manufacturing Indonesia serta PT Indo Bharat Rayon, yang keduanya berlokasi di Kabupaten Purwakarta.

Doing Business di Indonesia 2010

Doing Business di Indonesia 2010 memperbandingkan kebijakan usaha di 14 kota di Indonesia, untuk merekam perbedaan-perbedaan yang ada di antara peraturan-peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya di lokasi yang berbeda-beda di Indonesia, terkait dengan 3 fase siklus kehidupan perusahaan, yaitu mendirikan usaha, mengurus izin-izin mendirikan bangunan, serta mendaftarkan properti.

Berdasarkan laporan *Doing Business* di Indonesia 2010, Kota Bandung meraih beberapa peringkat yang cukup tinggi pada ketiga kategori penilaian. Kota Bandung menjadi juara pertama dalam kemudahan mendaftarkan properti, peringkat ketiga dalam kemudahan mengurus izin mendirikan bangunan, serta nomor lima dalam kemudahan mendirikan usaha.

Tabel 1. Peringkat Kota Termudah untuk Mendirikan Usaha, Mengurus Izin Mendirikan Bangunan, dan Pendaftaran Properti

Kota	Kemudahan Mendirikan Usaha	Kemudahan Mengurus Izin Mendirikan Bangunan	Kemudahan Mendaftarkan Properti
Bandung	5	3	1
Balikpapan	8	8	14
Banda Aceh	6	10	8
Denpasar	10	11	8
Jakarta	7	13	2
Makassar	9	2	10
Manado	14	12	3
Palangka Raya	3	3	5
Palembang	4	6	6
Pekanbaru	11	7	4
Semarang	13	5	11
Surabaya	11	14	6
Surakarta	2	9	13
Yogyakarta	1	1	12

Sumber: SUSENAS 2007 dan *Database Doing Business*

Perbandingan rata-rata jumlah prosedur, waktu, serta biaya yang dibutuhkan untuk masing-masing kategori, antara Kota Bandung dengan Asia Timur dan Pasifik, serta OECD (negara-negara berpendapatan tinggi) ditampilkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Indikator-indikator yang Digunakan

Indikator	Bandung	Indonesia	Asia Timur dan Pasifik	OECD
Mendirikan Usaha				
Prosedur (jumlah)	9	9	8,1	5,7
Waktu (hari)	43	50	41	13
Biaya (% pendapatan/kapita)	32,6	30,7	25,8	4,7
Memperoleh Izin untuk Mendirikan Bangunan				
Prosedur (jumlah)	11	12	18,6	15,1
Waktu (hari)	72	118	168,6	157
Biaya (% pendapatan/kapita)	149,4	161	139,6	56,1
Mendaftarkan Properti				
Prosedur (jumlah)	6	6	5	4,7
Waktu (hari)	19	31	97,5	25
Biaya (% pendapatan/kapita)	10,7	10,9	3,9	4,6

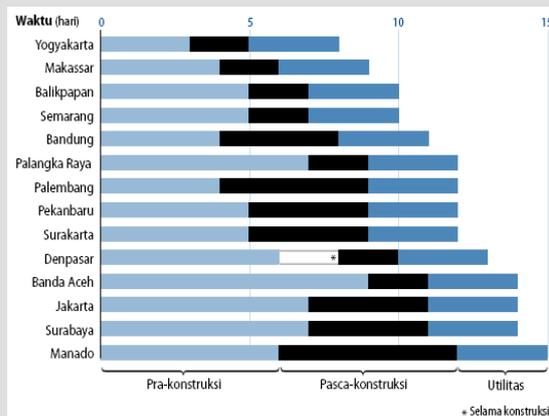
Sumber: *Database Doing Business*

Kota Bandung, bersama dengan Kota Yogyakarta, merupakan kota dengan waktu proses tersingkat untuk mendirikan usaha, yaitu selama 43 hari. Relatif cepatnya waktu pengurusan mendirikan usaha tersebut tidak terlepas dari konsolidasi perizinan melalui pelayanan terpadu, khususnya proses untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, dan izin gangguan serta lokasi usaha.

Baiknya kinerja Kota Bandung juga didukung oleh upaya-upaya kantor Jaminan Sosial Tenaga Kerja setempat yang secara proaktif mendatangi perusahaan untuk melakukan pendaftaran, sehingga proses verifikasi dan pendaftaran tenaga kerja dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari, relatif sangat pendek bila dibandingkan Jakarta yang membutuhkan waktu 7 hari.

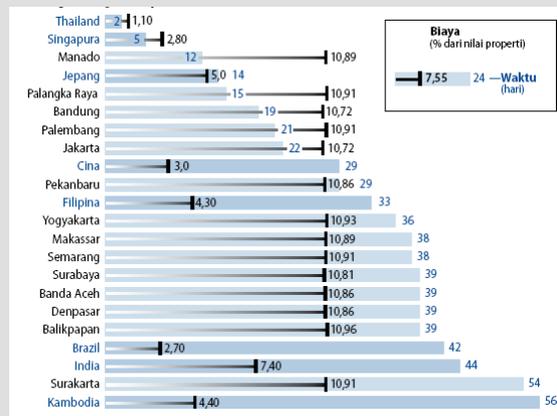
Eksperimen dengan sistem-sistem inovatif juga dilakukan di Kota Bandung dalam hal mempermudah perizinan mendirikan bangunan. Pusat pelayanan terpadu di Kota Bandung menerapkan program penyampaian informasi kepada para pihak pembangun tentang status permohonan mereka melalui pesan teks ke telepon seluler atau melalui email. Selain itu, Kota Bandung juga merupakan salah satu kota yang menerapkan peraturan kepatuhan yang lebih mudah untuk bangunan-bangunan yang sederhana dengan tingkat resiko yang rendah.

Grafik 1. Prosedur dalam Perizinan Mendirikan Bangunan



Sumber: Database Doing Business

Grafik 2. Waktu dan Biaya yang Diperlukan untuk Pendaftaran Properti di Indonesia dan Negara-negara Terpilih



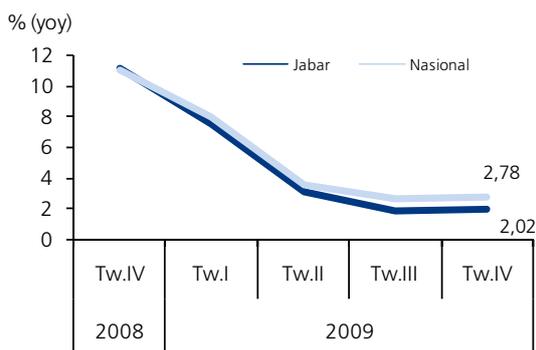
Sumber: Database Doing Business

BAB 2

PERKEMBANGAN INFLASI DAERAH

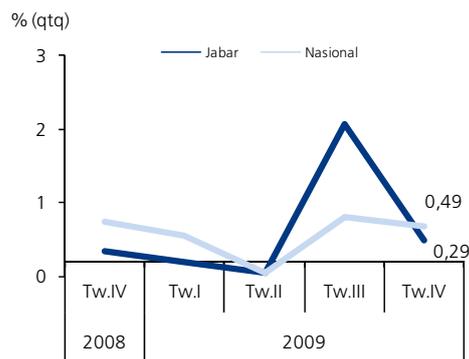
Laju inflasi tahunan Jawa Barat pada triwulan IV-2009 diperkirakan meningkat tipis dibandingkan dengan periode sebelumnya. Inflasi Jawa Barat pada triwulan IV-2009 tercatat sebesar 2,02% (yoy) lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi triwulan sebelumnya yang sebesar 1,87%. Meskipun demikian, angka inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 2,78% (Grafik 2.1). Sementara itu, secara triwulanan, Jawa Barat mengalami penurunan laju inflasi dari 1,87% (qtq) pada triwulan III-2009 menjadi 0,29% pada periode laporan (Grafik 2.2). Angka tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional yang sebesar 0,49% (qtq).

Grafik 2.1. Inflasi Tahunan Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Jawa Barat, TD 2002.
Keterangan: * Inflasi dengan Tahun Dasar 2002;
** Inflasi dengan Tahun Dasar 2007.

Grafik 2.2. Inflasi Triwulanan Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Jawa Barat, TD 2002.
Keterangan: * Inflasi dengan Tahun Dasar 2002;
** Inflasi dengan Tahun Dasar 2007.

Kenaikan laju inflasi tahunan Jawa Barat terutama disebabkan oleh faktor non fundamental, berupa hilangnya pengaruh penurunan harga BBM yang terjadi pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (*base-effect*). Faktor tersebut lebih dominan dibandingkan dengan penurunan laju inflasi triwulanan Jawa Barat. Sementara itu, faktor non fundamental lainnya berasal dari kenaikan harga emas di pasar internasional dan air kemasan, serta tarif kontrak rumah. Di sisi lain, produksi pangan (terutama padi, unggas, dan ikan) yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mampu menahan kenaikan laju inflasi. Sementara itu, dampak peningkatan permintaan relatif tidak signifikan.

Berdasarkan jenis kelompoknya, kenaikan laju inflasi tahunan Jawa Barat terutama disebabkan terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; serta sandang. Pada triwulan IV-2009 deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan semakin berkurang dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari -8,31% (yoy) menjadi -5,74%. Sementara kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, gas, listrik, dan air bersih; serta, sandang mengalami peningkatan laju inflasi masing-masing dari 4,95%, 0,45%, dan 4,09% menjadi 6,66%, 4,94%, dan 1,06%. Di sisi lain, kelompok bahan makanan mampu menahan laju inflasi sebagaimana terlihat dari penurunan laju inflasi dari 6,72% pada triwulan III-2009 menjadi 4,10% pada triwulan IV-2009.

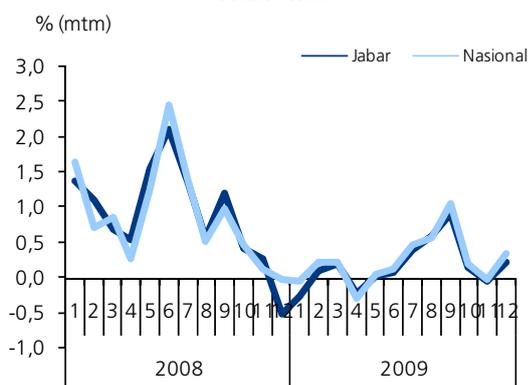
1. PERKEMBANGAN INFLASI

Secara tahunan, laju inflasi menunjukkan awal mula tren kenaikan, yakni dari 1,87% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 2,02% pada triwulan IV-2009. Kenaikan tersebut terutama

disebabkan oleh faktor teknis, yakni hilangnya pengaruh penurunan harga BBM dalam perhitungan inflasi pada periode pengamatan (*base-effect*). Selain itu, kenaikan harga emas di pasar internasional mendorong naiknya ekspektasi pedagang atas harga emas perhiasan di Jawa Barat. Kenaikan harga air kemasan yang cukup tinggi terutama di Kota Bekasi pada triwulan IV-2009 turut menyumbangkan inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau.

Secara triwulanan, inflasi Jawa Barat turun menjadi sebesar 0,29% (qtq). Penurunan laju inflasi terutama disebabkan oleh kelompok bahan makanan. Peningkatan hasil produksi sebagian besar komoditas bahan pangan di Jawa Barat, yakni ayam ras, ikan air tawar, kangkung, buncis, dan cabe merah pada triwulan IV-2009 relatif berdampak signifikan terhadap penurunan laju inflasi. Produksi ikan tawar yang meningkat terutama disebabkan oleh musim hujan yang telah tiba dan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas bibit maupun sarana prasarana produksi di sentra produksi ikan tawar di Jawa Barat. Selain itu, penurunan harga daging ayam ras juga disebabkan oleh kembali stabilnya harga setelah Idul Fitri yang berlangsung pada triwulan sebelumnya.

Grafik 2.3. Inflasi Bulanan Jawa Barat dan Nasional



Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Pasca bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri, laju inflasi Jawa Barat pada triwulan IV-2009 secara bulanan berada pada level yang rendah (Grafik 2.3). Pada bulan Oktober 2009, Jawa Barat mengalami inflasi sebesar 0,13% (mtm) yang disebabkan oleh naiknya tarif kontrak rumah dan beberapa komoditas bahan pangan. Namun demikian, pada bulan November 2009 harga beberapa komoditas bahan pangan yang sebelumnya mengalami kenaikan kembali ke harga normal menyebabkan Jawa Barat mengalami deflasi

sebesar 0,06%. Inflasi pada bulan Desember meningkat menjadi 0,22% terutama disebabkan oleh berkurangnya pasokan beras sehubungan dengan berlangsungnya musim tanam padi.

1.1. INFLASI MENURUT KELOMPOK BARANG DAN JASA

Inflasi Tahunan

Sebagian besar kelompok barang dan jasa mengalami kenaikan laju inflasi tahunan (Tabel 2.1). Kelompok yang mengalami kenaikan laju inflasi cukup tinggi, yakni transpor, komunikasi, dan jasa keuangan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar; serta, sandang. Sementara kenaikan laju inflasi pada kelompok kesehatan relatif minimal.

Di lain pihak, kelompok bahan makanan mengalami penurunan laju inflasi yang cukup besar dari 6,22% pada triwulan III-2009 menjadi 4,10% pada triwulan IV-2009. Hal ini disebabkan oleh hasil panen beberapa komoditas pangan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga juga mengalami penurunan laju inflasi tahunan meskipun demikian sumbangan inflasi kelompok tersebut relatif kecil dibandingkan dengan kelompok bahan makanan. Penurunan laju inflasi tahunan kelompok pendidikan, rekreasi, dan

olahraga disebabkan oleh ekspektasi inflasi masyarakat pada tahun 2009 lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

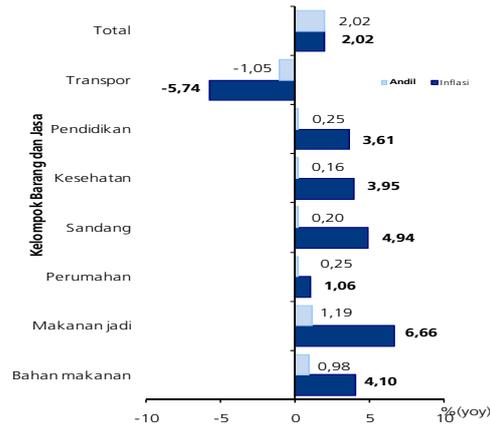
Tabel 2.1. Inflasi Tahunan Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

No.	Kelompok	2008	2009				Andil	
		Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.III	Tw.IV
1	Bahan makanan	16,11	11,67	5,96	6,22	4,10	1,46	0,98
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	12,45	10,08	7,71	4,95	6,66	1,18	1,19
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	6,76	4,97	3,59	0,45	1,06	0,11	0,25
4	Sandang	3,69	6,83	4,84	4,09	4,94	0,17	0,20
5	Kesehatan	10,52	5,43	4,57	3,83	3,95	0,15	0,16
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	8,61	7,15	6,22	4,94	3,61	0,35	0,25
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	12,78	3,53	-7,03	-8,34	-5,74	-1,57	-1,05
Umum		11,11	7,45	3,13	1,87	2,02	1,87	2,02

Sumber: BPS Jawa Barat.

Andil inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau memberikan sumbangan tertinggi, mencapai level 1% (Grafik 2.4). Besarnya andil inflasi kelompok tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan tarif air minum khususnya di Kota Bekasi serta kenaikan harga makanan jadi di Kota Tasikmalaya. Sementara itu, besaran deflasi kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Grafik 2.4. Inflasi Tahunan dan Andil Inflasi Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009

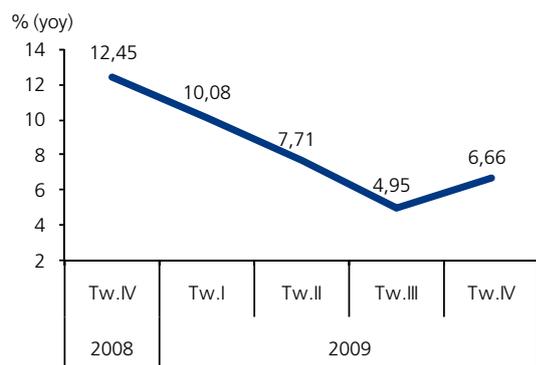


Sumber: BPS Jawa Barat, diolah.
Keterangan: nama kelompok disingkat.

a. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau

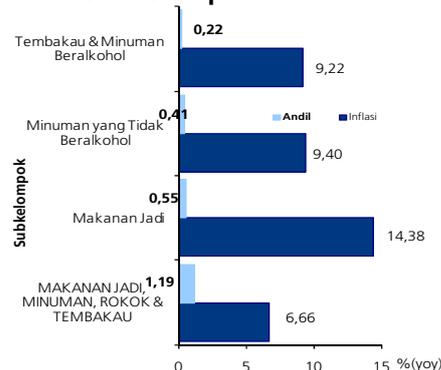
Kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau mengalami inflasi tertinggi, yakni sebesar 6,66% (yoy) dan andil sebesar 1,19% (Grafik 2.5). Inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik cukup tinggi jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 4,95% pada triwulan III-2009 menjadi 6,66% pada triwulan III-2009. Andil inflasi terbesar berasal dari subkelompok makanan jadi (0,55%) diikuti oleh subkelompok minuman yang tidak beralkohol sebesar 0,41% (Grafik 2.6). Kenaikan laju inflasi disebabkan oleh kenaikan harga air kemasan di Kota Bekasi serta harga makanan jadi di beberapa daerah terutama di Kota Tasikmalaya.

Grafik 2.5. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat.

Grafik 2.6. Inflasi Tahunan Kelompok Makanan Jadi di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009

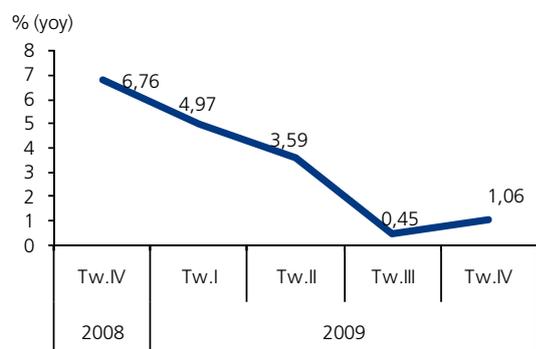


Sumber: BPS Jawa Barat.

b. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar

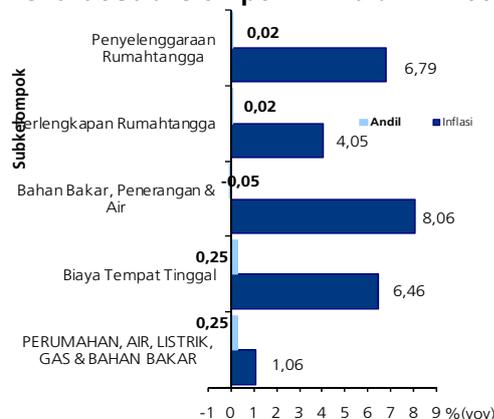
Kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar mengalami inflasi, yakni sebesar **1,06%** dan andil sebesar **0,35%** (Grafik 2.7). Subkelompok biaya tempat tinggal memberikan sumbangan inflasi yang cukup tinggi, yakni sebesar 0,25% (Grafik 2.8). Naiknya laju inflasi tahunan subkelompok tersebut disebabkan oleh kenaikan ekspektasi inflasi masyarakat sehingga tarif kontrak rumah meningkat cukup tinggi.

Grafik 2.7. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat.

Grafik 2.8. Inflasi Tahunan Kelompok Perumahan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009

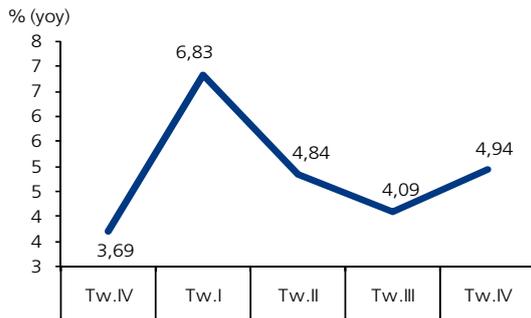


Sumber: BPS Jawa Barat.

c. Kelompok Sandang

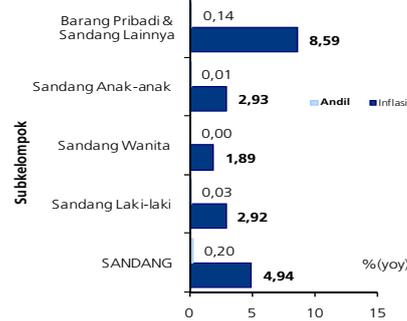
Kelompok sandang mengalami juga mengalami inflasi tertinggi setelah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau, yakni sebesar **4,94%** dan andil sebesar **0,20%** (Grafik 2.9). Inflasi tahunan kelompok meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni dari 4,09% pada triwulan III-2009 menjadi 4,95% pada triwulan IV-2009. Berdasarkan sumbangannya, inflasi subkelompok barang pribadi dan sandang lainnya relatif besar yakni sebesar 0,14%. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga emas perhiasan, akibat kenaikan harga emas di pasar internasional yang dipicu oleh persepsi investor luar negeri atas emas sebagai *safe-heaven*.

Grafik 2.9. Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat.

Grafik 2.10. Inflasi Tahunan Kelompok Sandang di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009

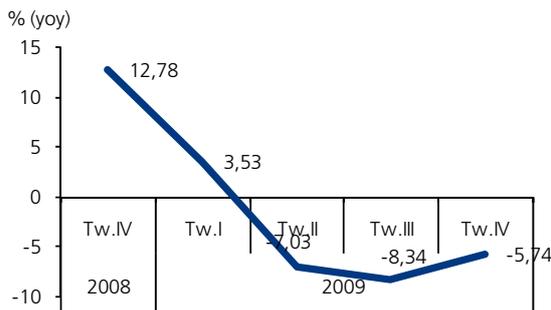


Sumber: BPS Jawa Barat.

d. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

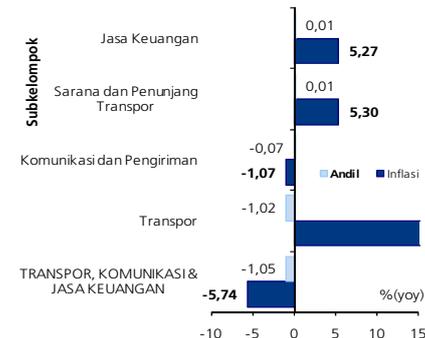
Kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan adalah satu-satunya kelompok yang masih mengalami deflasi. Namun demikian, laju deflasi kelompok transpor berkurang dari 8,34% pada triwulan sebelumnya menjadi 5,74% pada triwulan laporan (Grafik 2.11). Hal ini disebabkan oleh hilangnya pengaruh penurunan BBM bersubsidi yang terjadi pada bulan Desember 2008.

Grafik 2.11 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat.

Grafik 2.12. Inflasi Tahunan Kelompok Transpor di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009



Sumber: BPS Jawa Barat.

Inflasi Triwulanan

Secara triwulanan, terdapat dua kelompok yang mengalami deflasi, yakni kelompok bahan makanan dan transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Kelompok bahan makanan mengalami deflasi yang cukup besar, yakni 1,20% (qtq). Penurunan harga pada bahan pangan terutama disebabkan oleh pasokan pangan yang cukup baik, terutama daging-dagingan, ikan-ikanan, sayur-sayuran, dan bumbu-bumbuan. Sementara, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,45%. Deflasi kelompok tersebut disebabkan oleh turunnya tarif angkutan antar kota pasca kenaikan tushlah sehubungan Idul Fitri pada bulan Oktober 2009.

Tabel 2.2. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa (%)

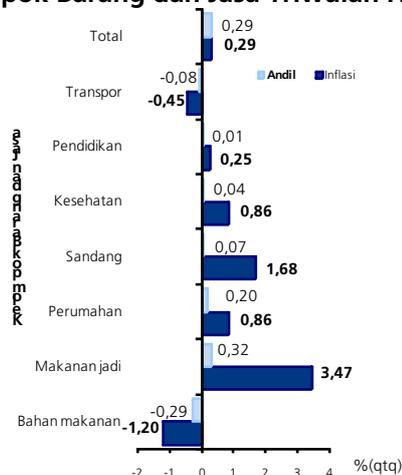
No.	Kelompok	2008	2009				Andil	
		Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.III	Tw.IV
1	Bahan makanan	0,81	2,06	-1,63	4,96	-1,20	1,17	-0,29
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1,82	2,01	0,85	0,20	3,47	0,35	0,32
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,25	-0,10	0,45	-0,15	0,86	-0,04	0,20
4	Sandang	0,86	4,44	-1,37	0,18	1,68	0,01	0,07
5	Kesehatan	0,74	1,57	0,69	0,78	0,86	0,04	0,04
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	1,54	0,14	0,08	3,12	0,25	0,23	0,01
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-3,17	-5,95	0,01	0,66	-0,45	0,11	-0,08
Umum		0,15	0,00	-0,15	1,87	0,29	1,87	0,29

Sumber: BPS Jawa Barat.

Sama halnya dengan perkembangan laju inflasi tahunan, inflasi triwulanan pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau serta perumahan, air, listrik, gas, dan air bersih juga mengalami kenaikan. Laju inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau naik dari 0,20% menjadi 3,47%. Sementara, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar setelah pada triwulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,15% mengalami inflasi sebesar 0,86%.

Relatif besarnya deflasi kelompok bahan makanan serta transpor, komunikasi, dan jasa keuangan mampu menahan inflasi triwulanan Jawa Barat (Grafik 2.5). Kelompok bahan makanan memberikan andil deflasi sebesar 0,29% sementara kelompok transpor memberikan sumbangan deflasi sebesar 0,08%. Sementara itu, kelompok makanan jadi dan perumahan menyumbang inflasi yang cukup tinggi, yakni masing-masing sebesar 0,32% dan 0,20%.

Grafik 2.13. Inflasi dan Andil Inflasi Jawa Barat Menurut Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009

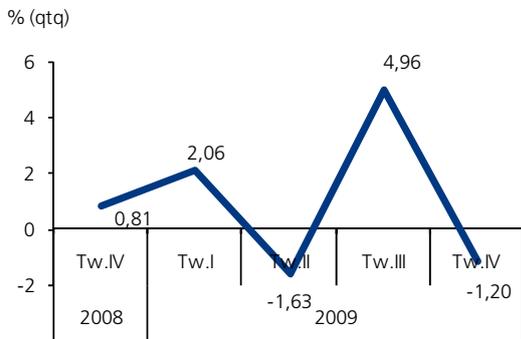


Sumber: BPS Jawa Barat, diolah.
Keterangan: nama kelompok disingkat.

a. Kelompok Bahan Makanan

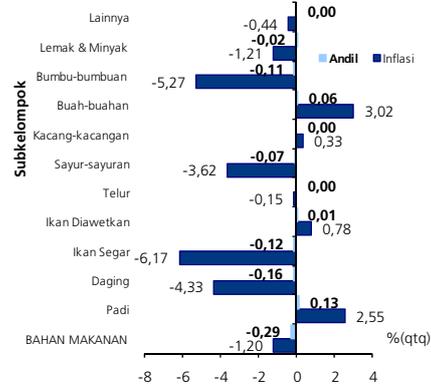
Kelompok bahan makanan mengalami deflasi sebesar 1,20% dan andil sebesar 0,29% pada triwulan IV-2009 terutama disebabkan oleh tibanya musim panen beberapa komoditas strategis (Grafik 2.14). Subkelompok yang mengalami deflasi pada periode laporan adalah daging-dagingan, ikan segar, bumbu-bumbuan, sayur-sayuran, serta lemak dan minyak (Grafik 2.15), khususnya komoditas daging ayam ras, cabe merah, buncis dan minyak goreng.

Grafik 2.14. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat.

Grafik 2.15. Inflasi Triwulanan Kelompok Bahan Makanan di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009

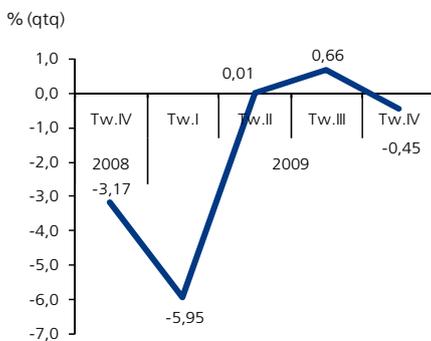


Sumber: BPS Jawa Barat.

b. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

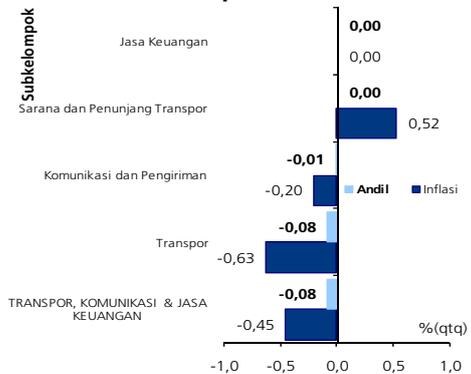
Selain itu, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi 0,45% dan andil 0,08% (Grafik 2.16). Deflasi yang terjadi pada subkelompok transpor disebabkan oleh penurunan tarif angkutan antar kota pada bulan Oktober 2009, sementara deflasi yang terjadi pada subkelompok komunikasi dan jasa pengiriman relatif kecil.

Grafik 2.16 Inflasi Tahunan Kelompok Transpor di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat.

Grafik 2.17. Inflasi Triwulanan Kelompok Transpor di Jawa Barat Menurut Subkelompok Triwulan IV-2009



Sumber: BPS Jawa Barat.

1.2. INFLASI MENURUT KOTA

Inflasi Tahunan

Berdasarkan kota, kenaikan laju inflasi tahunan terjadi di Kota Bandung, Bekasi, dan Cirebon, masing-masing sebesar 2,11% (yoy), 1,93%, dan 4,11% (Tabel 2.3). Namun demikian, diantara 7 kota di Jawa Barat yang disurvei oleh BPS, hanya Kota Cirebon dan Tasikmalaya yang memiliki angka inflasi lebih besar dari 4%. Hal ini menunjukkan persistensi inflasi yang cukup tinggi di kedua kota tersebut. Sementara, laju inflasi terendah dialami oleh Kota Depok, yakni sebesar 1,30%.

Namun demikian, andil inflasi terbesar tetap disumbangkan oleh Kota Bandung dan Bekasi, yakni sebesar 0,61% dan 0,54%. Sementara, Kota Tasikmalaya yang memiliki laju inflasi tertinggi hanya memberikan andil inflasi sebesar 0,12%. Hal ini terutama disebabkan oleh pengaruh besarnya bobot kedua kota tersebut dibandingkan 5 kota lainnya.

Tabel 2.3. Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota (yoy, %)

No.	Kota	2008	2009				Andil	
		Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.III	Tw.IV
1	Bandung	10,23	6,31	2,17	1,53	2,11	0,44	0,61
2	Bekasi	10,10	6,68	3,59	1,54	1,93	0,43	0,54
3	Depok	11,70	0,00	2,57	1,52	1,30	0,31	0,26
4	Bogor	14,20	6,17	3,38	2,71	2,16	0,32	0,26
5	Cirebon	14,14	8,22	5,23	3,67	4,11	0,15	0,17
6	Sukabumi	11,39	8,25	6,91	4,67	3,49	0,18	0,14
7	Tasikmalaya	12,07	9,18	6,87	4,25	4,17	0,12	0,12
Gabungan		11,11	7,45	3,13	1,87	2,02	1,87	2,02

Sumber: BPS Jawa Barat.

Kenaikan laju inflasi di Kota Bandung, Bekasi, dan Cirebon terutama disumbangkan oleh kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan, serta sandang (Tabel 2.4). Khusus untuk Kota Bandung, kenaikan laju inflasi kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar menyumbangkan kenaikan inflasi yang cukup tinggi. Sementara, kenaikan laju inflasi kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau terjadi di Kota Bekasi. Adapun, kenaikan laju inflasi kelompok bahan makanan hanya di Kota Cirebon.

Tabel 2.4. Inflasi Tahunan di Jawa Barat Menurut Kota & Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009 (yoy,%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	4,02	2,86	6,53	4,15	4,68	0,39	2,79	4,10
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,85	6,86	7,60	8,07	5,99	7,70	13,14	6,66
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1,74	-0,29	-0,69	1,62	3,64	11,32	6,47	1,06
4	Sandang	5,09	5,49	4,97	2,72	10,77	1,25	4,63	4,94
5	Kesehatan	5,32	3,64	0,79	9,66	5,48	2,88	0,77	3,95
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	3,31	3,56	3,91	3,33	8,15	2,83	2,45	3,61
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-5,98	-3,05	-7,41	-9,74	-2,95	-6,59	-3,85	-5,74
Umum		2,11	1,93	1,30	2,16	4,11	3,49	4,17	2,02

Relatif tingginya inflasi di Kota Cirebon dan Tasikmalaya disebabkan oleh faktor yang berbeda. Khusus untuk Kota Cirebon, angka inflasi yang cukup tinggi karena besarnya laju inflasi kelompok sandang; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; serta, relatif kecilnya deflasi yang terjadi pada kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan. Hal ini sebagaimana yang terlihat dari angka inflasi/deflasi kelompok-kelompok tersebut di Kota Cirebon yang tertinggi dibandingkan lainnya. Sementara, inflasi Kota Tasikmalaya terutama disebabkan oleh kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Pada Kota Tasikmalaya diperkirakan bukan hanya harga air kemasan yang meningkat tetapi harga produk mie siap saji.

Inflasi Triwulanan

Secara triwulanan, hampir seluruh kota di Jawa Barat mengalami penurunan laju inflasi, kecuali di Kota Tasikmalaya. Pada periode laporan, terdapat 2 kota yang mengalami deflasi yakni Kota Depok dan Bogor, masing-masing sebesar 0,03% dan 0,08% (Tabel 2.5). Kota Tasikmalaya merupakan satu-satunya kota yang mengalami laju inflasi tahunan di atas 1%.

Tabel 2.5. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota (qtq, %)

No.	Kota	2008	2009				Andil	
		Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.III	Tw.IV
1	Bandung	-0,07	0,11	-0,14	1,64	0,50	0,47	0,14
2	Bekasi	0,03	0,01	-0,26	1,76	0,41	0,50	0,12
3	Depok	0,18	-0,87	-0,20	2,43	-0,03	0,49	-0,01
4	Bogor	0,46	0,79	-0,27	1,72	-0,08	0,20	-0,01
5	Cirebon	0,19	0,91	0,04	2,49	0,62	0,10	0,03
6	Sukabumi	1,32	1,67	0,35	1,25	0,18	0,05	0,01
7	Tasikmalaya	1,22	0,78	1,09	1,09	1,15	0,03	0,03
		0,15	0,00	-0,15	1,87	0,29	1,87	0,29

Sumber: BPS Jawa Barat.

Faktor pendorong laju inflasi triwulanan di hampir seluruh kota di Jawa Barat adalah tibanya musim panen beberapa komoditas pangan sehingga seluruh kota mengalami deflasi kelompok bahan makanan (Tabel 2.6). Kelompok tersebut mengalami deflasi terbesar pada Kota Bogor dan Sukabumi, yakni masing-masing sebesar 2,43% dan 1,43%. Deflasi terutama terjadi pada subkelompok ikan segar. Hal ini disebabkan produksi ikan air tawar yang lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain kelompok bahan makanan, kelompok transpor, komunikasi, dan jasa keuangan juga mengalami deflasi. Di antara 7 kota, deflasi yang terjadi di Kota Tasikmalaya cukup besar, yakni sebesar 1,25% karena andil deflasi subkelompok transpor dan jasa komunikasi yang cukup besar. Hal ini diduga terutama disebabkan oleh penurunan tarif angkutan antar kota serta tarif pulsa telepon seluler.

Tabel 2.6. Inflasi Triwulanan di Jawa Barat Menurut Kota & Kelompok Barang dan Jasa Triwulan IV-2009 (qtq,%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	-0,71	-1,20	-1,26	-2,43	-0,12	-1,43	-0,29	-1,20
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1,13	2,26	1,57	1,93	1,00	2,06	5,04	3,47
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1,59	0,62	0,32	0,67	0,84	0,73	0,15	0,86
4	Sandang	0,67	3,30	1,50	0,96	3,63	0,91	1,68	1,68
5	Kesehatan	0,54	1,32	0,19	2,80	0,91	0,14	-0,12	0,86
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,45	0,30	0,11	0,07	0,33	-0,42	0,23	0,25
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-0,47	-0,21	-0,66	-0,39	-0,21	-0,44	-1,25	-0,45
	Umum	0,50	0,41	-0,03	-0,08	0,62	0,18	1,15	0,29

Sumber: BPS Jawa Barat.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI INFLASI

Kenaikan laju inflasi tahunan terutama disebabkan oleh berkurangnya deflasi *administered price* (Tabel 2.7). Sementara, laju inflasi inti meningkat secara terbatas. Namun demikian kenaikan laju inflasi Jawa Barat dapat ditahan oleh turunnya tekanan dari beberapa komoditas bahan pangan (*volatile foods*).

Tabel 2.7. Inflasi Tahunan Menurut Faktor Penyebab (yoy, %)

Komponen	2009		
	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Inti	3,33	1,83	1,87
<i>Administered Price</i>	-2,45	-1,49	-0,91
<i>Volatile Foods</i>	1,00	1,46	0,98
Umum	3,13	1,87	2,02

Sumber: BPS Jawa Barat, diolah

Keterangan: dihitung dengan menggunakan *exclusion method* menurut subkelompok.

Secara triwulanan, penurunan inflasi terjadi pada seluruh komponen faktor penyebab inflasi (Tabel 2.8), terutama inflasi *volatile foods* yang turun, yakni dari 1,17% (qtq) menjadi deflasi 0,29%. Sementara, penurunan inflasi baik inflasi inti maupun *administered price* relatif kecil.

Tabel 2.8. Inflasi Triwulanan Menurut Faktor Penyebab (qtq, %)

Komponen	2008				2009			
	Tw.I*	Tw.II*	Tw.III**	Tw.IV**	Tw.I**	Tw.II**	Tw.III**	Tw.IV**
Inti	1,38	1,34	2,10	0,52	0,59	0,12	0,60	0,56
<i>Administered Price</i>	0,37	2,37	-0,88	-0,57	-1,08	0,08	0,08	0,01
<i>Volatile Foods</i>	1,43	0,69	0,71	0,19	0,49	-0,39	1,17	-0,29
Umum	3,17	4,41	3,14	0,15	0,00	-0,15	1,87	0,29

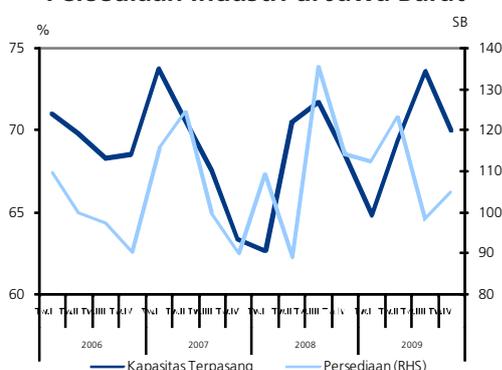
Sumber: BPS Jawa Barat, diolah

Keterangan: *) dihitung dengan menggunakan *exclusion method* menurut komoditas, **) dihitung dengan menggunakan *exclusion method* menurut subkelompok.

2.1. FUNDAMENTAL

a. Interaksi Permintaan dan Penawaran

Grafik 2.18. Kapasitas Terpakai dan Persediaan Industri di Jawa Barat



Sumber: SKDU-KBI Bandung

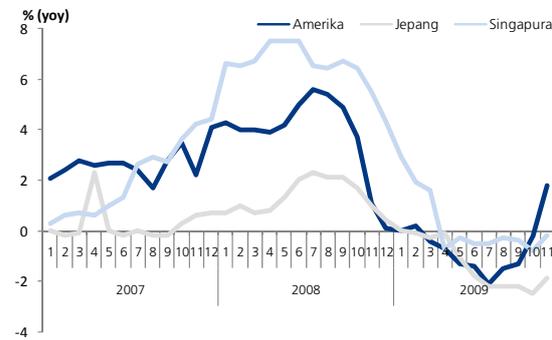
Pertumbuhan volume permintaan masyarakat Jawa Barat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya diperkirakan melambat, setelah berlalunya perayaan bulan Ramadhan dan Idul Fitri pada triwulan sebelumnya. Hal ini terlihat dari penurunan kapasitas terpakai industri di Jawa Barat serta peningkatan persediaan barang (stok) pada perusahaan responden Survei Kegiatan Dunia Usaha. Kapasitas terpakai industri di Jawa Barat turun dari 73,57% pada triwulan III-2009 menjadi 69,9% pada triwulan IV-2009 (Grafik 2.18).

Penurunan terjadi pada seluruh jenis industri di Jawa Barat. Sementara itu, persediaan industri pertanian naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sebagaimana terlihat dari angka SBT hasil SKDU dari triwulan III-2009 yang sebesar 98,21 menjadi 104,79 pada triwulan IV-2009.

b. Eksternal

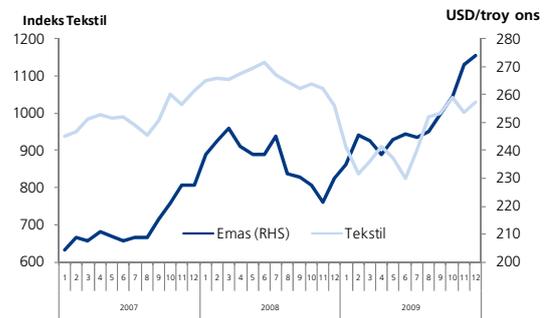
Pada triwulan III-2009 tekanan eksternal cenderung meningkat meskipun apresiasi nilai tukar rupiah relatif mampu meredam tekanan tersebut. Inflasi dari eksternal cenderung meningkat sebagaimana terlihat pada peningkatan laju inflasi negara mitra dagang utama serta kenaikan beberapa harga komoditas strategis di pasar internasional. Sementara itu, nilai tukar rupiah mengalami penguatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari level Rp9.800/USD menjadi Rp9.500/USD.

Grafik 2.19. Laju Inflasi di Negara Mitra Dagang



Sumber: DSM

Grafik 2.20. Perkembangan Harga Emas dan Tekstil di Pasar Internasional

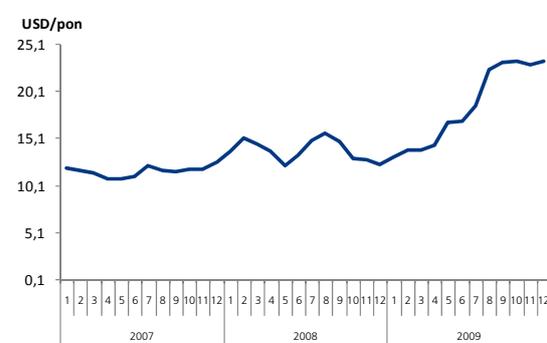


Sumber: DSM

Laju inflasi beberapa negara mitra dagang utama mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Grafik 2.19). Amerika Serikat mengalami peningkatan laju inflasi yang cukup tinggi. Kenaikan laju inflasi tersebut sejalan dengan pemulihan perekonomian serta naiknya harga beberapa komoditas strategis di pasar internasional.

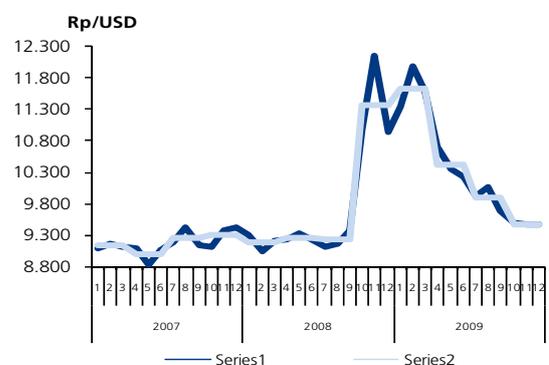
Harga emas di pasar internasional masih melanjutkan tren kenaikan (Grafik 2.20). Naiknya harga komoditas strategis tersebut disebabkan pesimisme investor atas kondisi perekonomian global serta penyesuaian portofolio kepada emas yang dipersepsikan sebagai *safe heaven*. Selain itu, harga produk tekstil di pasar internasional naik ke level normal seperti pada tahun 2008.

Grafik 2.21. Perkembangan Harga Gula di Pasar Internasional



Sumber: DSM

Grafik 2.22. Perkembangan Kurs Rupiah



Sumber: DSM

Harga gula pasir di pasar internasional meningkat dan berada pada level yang cukup tinggi (Grafik 2.21). Dampak kenaikan harga gula pasar internasional menjalar di pasar domestik karena ketergantungan yang tinggi kepada gula pasir impor. Harga gula pasir di Jawa Barat telah mencapai Rp10.000/kg hingga Rp11.000/kg pada triwulan IV-2009 atau lebih tinggi 10% dari harga normal yang sebesar Rp7.000/kg.

Namun demikian, tekanan eksternal terhadap laju inflasi Jawa Barat juga relatif tertahan karena apresiasi nilai tukar rupiah (Grafik 2.22). Apresiasi nilai tukar rupiah disebabkan oleh membaiknya transaksi berjalan maupun transaksi modal neraca pembayaran Indonesia. Selain itu, besarnya penawaran valuta asing di Indonesia terutama disebabkan oleh membaiknya ekspektasi investor atas perekonomian Indonesia terkait krisis keuangan global dibandingkan negara-negara lain. Sejalan dengan hal tersebut, harga barang-barang yang diimpor mengalami penurunan. Penurunan harga terutama terjadi pada barang-barang konsumsi yang diimpor oleh Jawa Barat seperti makanan dan minuman serta barang konsumsi tahan lama.

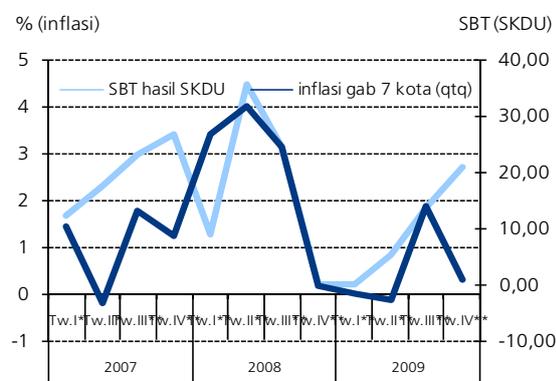
c. Ekspektasi Inflasi

Pada triwulan IV-2009 ekspektasi para pelaku ekonomi (khususnya pengusaha dan pedagang eceran) di Jawa Barat terhadap harga barang dan jasa meningkat meskipun relatif kecil.

Peningkatan ekspektasi disebabkan oleh faktor musiman di akhir tahun (Natal dan Tahun Baru) serta pemulihan perekonomian Jawa Barat. Perkembangan ekspektasi tersebut diindikasikan oleh hasil beberapa survei yang dilakukan oleh KBI Bandung, yaitu Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU), Survei Penjualan Eceran (SPE), dan Survei Konsumen (SK).

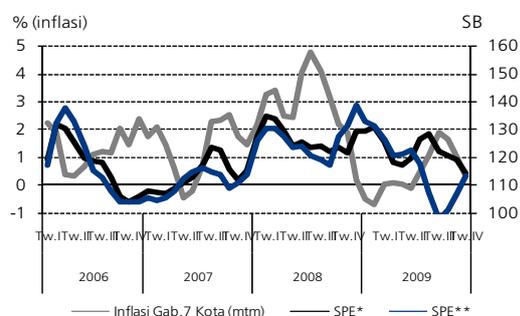
Kalangan pengusaha (responden SKDU) memprediksi bahwa masih terjadi kenaikan harga jual/tarif barang/jasa. Hal ini diindikasikan oleh kenaikan angka SBT (saldo bersih tertimbang) hasil survei dari 13,63 menjadi 20,93 (Grafik 2.18). Kenaikan ekspektasi pengusaha terhadap harga terjadi di sebagian besar jenis industri yang disurvei, dengan peningkatan tertinggi terutama terjadi pada industri pertambangan dan pembangunan.

Grafik 2.18. Perkembangan Harga Barang dan Jasa Menurut Pengusaha di Jawa Barat



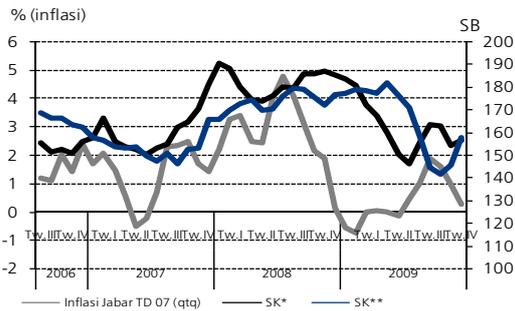
Sumber: Bank Indonesia.
Keterangan: *) Inflasi Jabar TD 02, **) Inflasi Jabar TD 07

Grafik 2.19. Ekspektasi Pedagang Eceran Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung



Sumber: SPE-KBI Bandung; BPS Jawa Barat.
Keterangan: SPE*=Moving Average (3 bulan) Ekspektasi pedagang terhadap harga pada bulan tsb. menurut SPE pada 3 bulan sebelumnya

Grafik 2.20. Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung



Sumber: SK-KBI Bandung, BPS Jawa Barat

Keterangan: SK*= *Moving Average* (3 bln) Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 3 bulan sebelumnya; SK**= *Moving Average* (3 bln) Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 6 bulan sebelumnya.

Di sisi lain, konsumen memiliki ekspektasi harga atas stabilitas harga barang dan jasa (Grafik 2.20). Ekspektasi atas stabilnya harga barang dan jasa secara umum pada triwulan IV-2009 diduga karena telah tibanya musim panen bahan pangan. Angka SBT *moving average* 3 bulan terhadap ekspektasi konsumen terhadap harga dibandingkan dengan 6 bulan yang lalu dalam Survei Konsumen stabil pada angka 151,78. Namun demikian, ekspektasi konsumen terhadap harga dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu turun dari 162,44 pada akhir triwulan III-2009 menjadi 153,67 pada akhir triwulan IV-2009.

Ekspektasi pedagang terhadap harga 6 bulan yang akan datang relatif mengalami peningkatan pada triwulan IV-2009. Hal ini disebabkan oleh faktor musiman akhir tahun, yakni kenaikan harga bahan makanan serta penentuan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Angka SBT *moving average* 3 bulan terhadap ekspektasi pedagang terhadap harga dibandingkan dengan 3 bulan yang lalu dalam Survei Penjualan Eceran naik dari 97,63 pada akhir triwulan III-2009 menjadi 113,10 pada triwulan IV-2009 (Grafik 2.19).

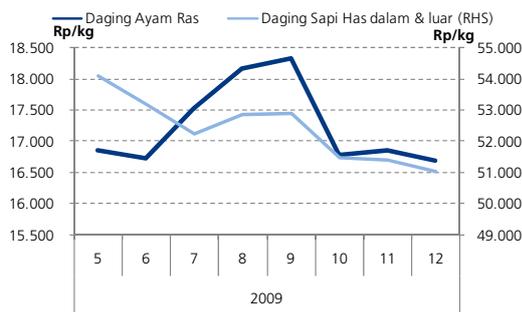
Seperti yang terjadi setiap triwulan IV, biaya kontrak rumah juga mengalami kenaikan pada triwulan IV-2009. Kenaikan biaya kontrak rumah pada umumnya terjadi setelah tahun ajaran baru atau pada saat peningkatan jumlah pendatang ke daerah tertentu. Pada bulan Oktober 2009 kontrak rumah memberikan andil inflasi sebesar 0,11% (mtm). Sementara itu, berdasarkan kota penyumbang inflasi, Kota Bandung menyumbangkan inflasi subkelompok biaya tempat tinggal tertinggi.

2.2. NON FUNDAMENTAL

a. Volatile Foods

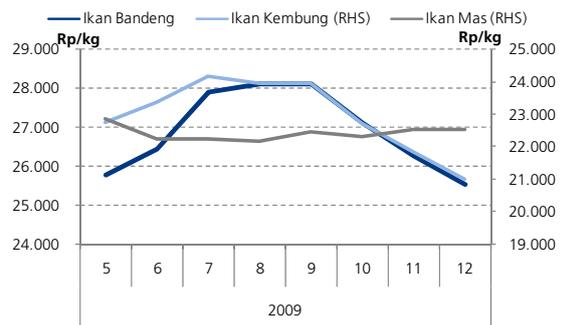
Hasil Survei Pemantauan Harga Mingguan (SPHM) di Kota Bandung menunjukkan bahwa harga sebagian besar *volatile foods* pada triwulan IV-2009 mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya. Kondisi ini disebabkan pada triwulan IV-2009 Jawa Barat sedang mengalami panen dan telah berlalunya bulan Ramadhan dan Idul Fitri. Penurunan harga daging-dagingan, selain karena berlalunya bulan Ramadhan dan Idul Fitri, juga disebabkan oleh masuknya daging sapi impor dari negara eksportir baru. Berdasarkan data Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, produksi daging ayam ras naik 10,45% dari 335 ribu ton pada tahun 2008 menjadi 370 ribu ton pada tahun 2009.

Grafik 2.21. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Daging-dagingan



Sumber: SPHM KBI Bandung

Grafik 2.22. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Ikan Segar

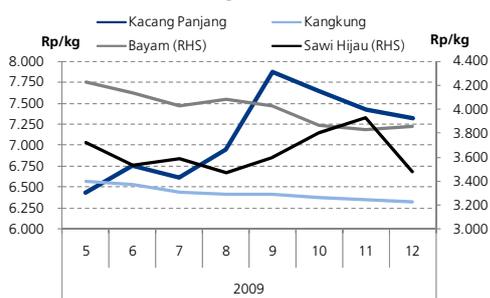


Sumber: SPHM KBI Bandung

Penurunan harga ikan segar disebabkan oleh naiknya produksi ikan budidaya tambak dan kolam karena cuaca yang mendukung pada triwulan IV-2009. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Barat menginformasikan bahwa terjadi peningkatan produksi perikanan budidaya di Jawa Barat sebesar 12,2 ribu ton atau naik 2,83% selama tahun 2009. Hal ini disebabkan oleh program penanaman terumbu karang di pantai selatan serta penanaman bakau di pantai utara yang merupakan habitat ikan. Selain itu, pemerintah daerah juga meningkatkan budidaya dan mutu bibit ikan, memberikan alat-alat penangkapan ikan untuk kelompok-kelompok pembudidaya ikan, serta menyediakan dan membantu pembangunan *cold storage* di beberapa daerah.

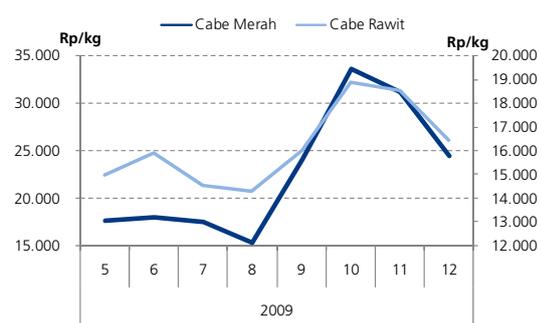
Subkelompok sayur-sayuran, terutama bayam dan kangkung, mengalami penurunan laju inflasi pada triwulan IV-2009 (Grafik 2.20). Penurunan harga disebabkan oleh telah tibanya musim panen di beberapa sentra produksi. Selain itu, Dinas Pertanian Tanaman Pangan mengungkapkan bahwa produksi sayur-sayuran pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Grafik 2.20. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Sayur-sayuran



Sumber: SPHM KBI Bandung

Grafik 2.21. Perkembangan Harga Beberapa Komoditas pada Subkelompok Bumbu-bumbuan



Sumber: SPHM KBI Bandung

Setelah mengalami kenaikan harga yang cukup tinggi pada bulan Oktober 2009, harga cabe merah dan cabe rawit turun pada 2 bulan terakhir triwulan IV-2009 (Grafik 2.21). Penurunan harga cabe menyebabkan penurunan laju inflasi kelompok bumbu-bumbuan pada triwulan IV-2009. Faktor penyebab turunnya harga cabe-cabean adalah pada bulan November 2009 petani cabe Jawa Barat telah melakukan panen.

b. Administered Price

Pada triwulan IV-2009 *administered price* (harga barang yang diatur oleh pemerintah) relatif stabil sebagaimana ditunjukkan pada andil inflasi yang sebesar 0,01%. Pemerintah Kota Bekasi menaikkan tarif air sebesar 15%. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Bekasi menaikkan tarif air sejak bulan November 2009 sebesar 15% dari semula sebesar Rp1.610/m³ menjadi Rp1.825/m³. Kenaikan tarif didorong oleh naiknya harga komponen bahan baku seperti bahan kimia, suku cadang peralatan, serta komponen biaya jasa produksi. Selama ini air PDAM dijual (harga jual rata-rata sebesar Rp3.175/m³) dibawah biaya produksi (biaya operasional rata-rata Rp3.917/m³). Sementara itu, kota lain di Jawa Barat telah menaikkan tarif air pada triwulan III-2009. Namun demikian, kenaikan tarif air tersebut dapat dikompensasi dengan penurunan tarif angkutan antar kota di hampir seluruh daerah. Penurunan tarif angkutan antar kota pada triwulan IV-2009 disebabkan oleh penyesuaian kembali tarif angkutan setelah terjadi kenaikan saat Idul Fitri. Hal ini sebagaimana terlihat pada perubahan inflasi subkelompok transpor, yaitu pada saat Idul Fitri (bulan September 2009) mengalami inflasi sebesar 0,1% (mtm), selanjutnya pada bulan Oktober 2009 deflasi 0,01%.

BOKS 2

PERTEMUAN TINGKAT TINGGI

FORUM KOORDINASI PENGENDALIAN INFLASI (FKPI) JAWA BARAT



SEKDA Provinsi Jawa Barat, Bp. Lex Laksamana, berbincang dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat

Pada tanggal 13 November 2009, FKPI Jawa Barat telah mengadakan Pertemuan Tingkat Tinggi (*high level meeting*) di Kota Cirebon. Pertemuan tersebut merupakan rapat koordinasi FKPI di bawah koordinasi Provinsi Jawa Barat, yakni FKPI Kota Cirebon dan Tasikmalaya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat membuka pertemuan tersebut dan menyampaikan penanganan inflasi tingkat regional. Selain itu, Pemimpin Bank Indonesia Bandung, Kepala

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, beberapa unsur Muspida Kota Cirebon, serta Tim Pengendalian Inflasi Pusat (Bank Indonesia Pusat, Kantor Menteri Perekonomian, Departemen Keuangan, dan Departemen Perdagangan) juga hadir dalam pertemuan tersebut.

Agenda pembahasan dalam rapat tersebut antara lain pemantauan harga komoditas hasil peternakan dan pertanian, upaya pengendalian atas potensi tekanan inflasi Jawa Barat pada akhir tahun, serta diskusi strategi pengendalian inflasi antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan anggota FKPI yang hadir.



Suasana rapat

Pokok-pokok hasil pertemuan tersebut, sebagai berikut:

a. Pemantauan Harga Komoditas Hasil Pertanian dan Ternak

- ✓ Berdasarkan data historis, beberapa komoditas berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang hari raya Idul Adha dan Natal serta Tahun Baru seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, sayur-sayuran, bawang merah, dan cabe merah.
- ✓ Berdasarkan hasil pemantauan FKPI Provinsi Jawa Barat maupun Kota Cirebon, harga sebagian besar komoditas hingga pertengahan bulan November 2009 relatif stabil kecuali cabe merah. Harga cabe merah masih cukup tinggi dan belum menunjukkan indikasi penurunan karena produksi cabe merah Jawa Barat masih relatif kecil. Harga cabe merah diperkirakan akan turun setelah bulan November karena telah memasuki masa panen.

- ✓ Secara umum, kondisi stok bahan pangan di Jawa Barat dalam kondisi aman sehinggaharga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan akan relatif stabil.

b. Upaya Pengendalian atas Potensi Tekanan Inflasi

- ✓ Mendiseminasikan hasil rapat kepada beberapa media massa sehingga diharapkan dapat menjaga ekspektasi masyarakat terhadap inflasi hingga akhir tahun 2009.
- ✓ Dinas Peternakan dan Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat akan meningkatkan produksi hasil ternak dan pertanian dengan beberapa program unggulan, yakni pemberantasan hama wereng melalui vaksinasi dan pemberian pestisida maupun peningkatan produktivitas, seperti melalui sistem pompanisasi dan penyuluhan oleh sarjana pendamping.
- ✓ Memantau perkembangan harga komoditas strategis yang diperkirakan naik menjelang perayaan Idul Adha, Natal, dan Tahun Baru seperti daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, cabe merah, beras, dan bawang merah. Pemantauan harga terutama dilakukan kepada produksi komoditas cabe merah yang belum dapat merealisasikan anggarannya dengan optimal.

Realisasi inflasi Jawa Barat pada bulan November dan Desember 2009 menunjukkan level yang lebih rendah masing-masing sebesar deflasi 0,06% (mtm) dan inflasi 0,22%, dibandingkan dengan inflasi rata-rata pada bulan-bulan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga kelompok bahan makanan yang dikhawatirkan terjadi pada akhir tahun dapat diredam oleh upaya pengendalian inflasi masing-masing anggota FKPI Jawa Barat, Kota Cirebon, dan Tasikmalaya.

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 3

PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

Pada triwulan IV-2009, perkembangan perbankan di Jawa Barat masih terus mengalami perlambatan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator perbankan seperti total aset, Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *outstanding* kredit, tumbuh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Peran intermediasi perbankan Jawa Barat yang ditunjukkan oleh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) mengalami sedikit peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, seiring dengan prospek perekonomian yang semakin membaik, risiko kredit perbankan semakin membaik. Hal ini terlihat dari semakin menurunnya persentase jumlah kredit bermasalah dibandingkan triwulan sebelumnya. Sementara itu, eksekusi likuiditas berupa penempatan dana bank pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) oleh perbankan Jawa Barat sedikit meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya.

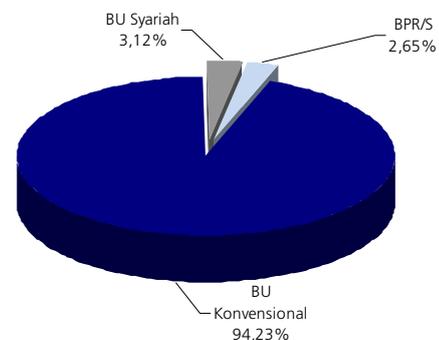
Berbeda dengan perkembangan perbankan di Jawa Barat, perkembangan bank umum khusus yang berkantor pusat di wilayah kerja KBI Bandung mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan oleh indikator utama seperti aset, DPK maupun *outstanding* kredit yang secara tahunan tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya, namun dengan risiko kredit tersebut relatif rendah. Pada triwulan laporan terdapat satu bank memindahkan kantor pusatnya ke Jakarta sehingga jumlah bank umum yang berkantor pusat menjadi enam bank.

1. STRUKTUR PERBANKAN DI JAWA BARAT

Aset bank umum konvensional masih mendominasi (93,98%) struktur aset perbankan di Jawa Barat. Sementara itu, pangsa bank umum syariah dan BPR konvensional masing-masing sebesar 2,95% dan 3,16% (Grafik 3.1.).

Sepuluh bank umum memiliki pangsa lebih dari 80% aset perbankan di Jawa Barat. Pada triwulan IV-2009, aset perbankan di Jawa Barat tumbuh 2,21% (qtq) atau 17,41% (yoy) menjadi Rp193,57 triliun. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 2,89% (qtq) atau 20,97%. Jika dibandingkan dengan nasional, aset perbankan di Jawa Barat memiliki pangsa sebesar 7,9%.

Grafik 3.1. Komposisi Aset Perbankan di Jawa Barat Triwulan IV-2009



Sumber: LBU, LBUS, LBPR KBI Bandung

2. BANK UMUM KONVENSIONAL

2.1 Pendanaan dan Risiko Likuiditas

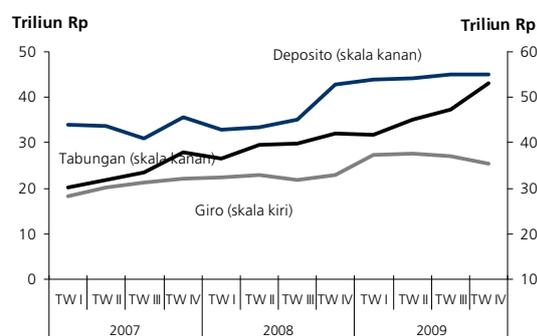
Perkembangan Dana Pihak Ketiga

Setelah tiga triwulan terakhir terus mengalami peningkatan, secara tahunan, pertumbuhan DPK pada triwulan IV-2009 mengalami perlambatan. DPK yang berhasil dihimpun bank umum konvensional di Jawa Barat mencapai Rp133,28 triliun atau tumbuh 13,18% (yoy) atau lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya (21,02%). Perlambatan ini terutama disebabkan oleh melambatnya jenis simpanan giro dan deposito, sedangkan tabungan justru mengalami peningkatan. Sementara itu, secara triwulanan, pertumbuhan DPK masih meningkat dari 2,01% (qtq) pada triwulan III-2009 menjadi 2,90% pada triwulan IV-2009. Hal ini disebabkan peningkatan yang cukup tinggi dari jenis tabungan yakni sebesar 12,14% (qtq), sedangkan giro dan deposito mengalami penurunan masing-masing sebesar 6,70% dan 0,32%. Suku bunga simpanan yang masih cukup menarik meskipun trennya turun, merupakan salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat memutuskan untuk menyimpan uangnya di bank, dibandingkan dengan penempatan lainnya seperti saham ataupun surat berharga.

Meskipun mengalami penurunan, jenis simpanan deposito masih mendominasi DPK bank umum konvensional di Jawa Barat. Pada triwulan IV-2009, pangsa deposito mencapai 41,20%, disusul tabungan 39,80% dan giro 19,00%. Perlambatan pertumbuhan DPK pada triwulan laporan terutama diakibatkan oleh melambatnya pertumbuhan deposito yang menjadi 4,23% (yoy) menjadi Rp54,91 triliun, dan pertumbuhan giro yang sebesar 10,15% menjadi Rp53,05 triliun. Sementara jenis simpanan tabungan mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yakni mencapai 26,05% menjadi sebesar Rp53,03 triliun. Secara triwulanan, simpanan deposito dan giro mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,32% (qtq) dan 6,70%, sebaliknya simpanan tabungan mengalami peningkatan sebesar 12,14% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Salah satu faktor penyebab meningkatnya tabungan diperkirakan adalah semakin gencarnya beberapa bank besar menawarkan tabungan berhadiah.

Berdasarkan jenis valuta, pada triwulan IV-2009, DPK dalam rupiah mengalami pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan DPK dalam valas. DPK dalam rupiah tumbuh 3,03% (qtq) atau 13,98% (yoy) menjadi Rp118,98 triliun. Sementara itu, DPK dalam valas mengalami pertumbuhan

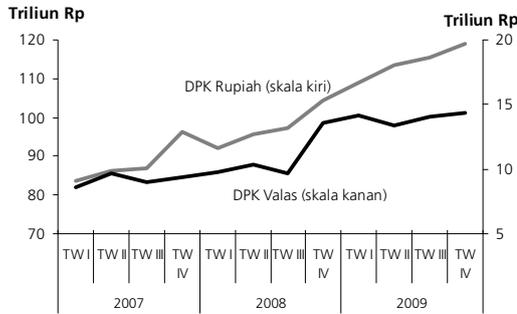
Grafik 3.2. Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Simpanan



Sumber: LBU KBI Bandung

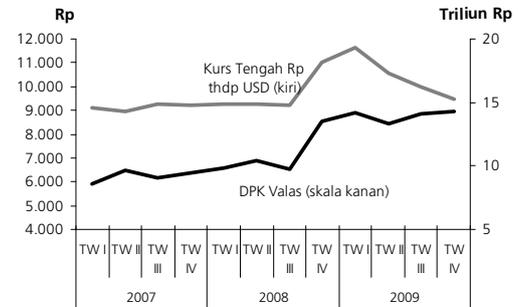
sebesar 1,78% (qtq) atau 5,74% (yoy) menjadi Rp14,30 triliun. Rata-rata kurs tengah rupiah terhadap USD pada triwulan IV-2009 terapresiasi 5,31% (qtq) menjadi sebesar Rp9.471,00 per USD.

Grafik 3.3. Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat berdasarkan Jenis Valuta



Sumber: LBU KBI Bandung

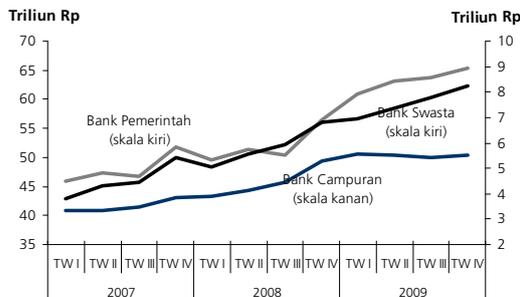
Grafik 3.4. Perkembangan DPK Valuta Asing & Kurs Tengah Rupiah Terhadap USD



Sumber: LBU KBI Bandung

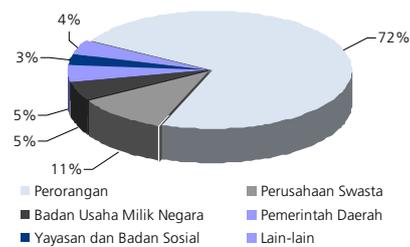
Pada triwulan IV-2009, berdasarkan kelompok bank, secara tahunan seluruh kelompok bank mengalami pertumbuhan DPK yang melambat, sebaliknya secara triwulanan, pertumbuhannya sudah mulai meningkat (Grafik 3.5.). Secara tahunan, pertumbuhan kelompok bank pemerintah, bank swasta dan bank asing/campuran melambat masing-masing menjadi sebesar 15,95% (yoy), 11,21% dan 4,47%, sehingga posisi DPK masing-masing menjadi Rp65,43 triliun, Rp62,35 triliun, dan Rp5,50 triliun. Secara triwulanan, semua kelompok bank sudah mulai mengalami peningkatan, setelah tiga triwulan sebelumnya mengalami perlambatan. Kelompok bank pemerintah tumbuh sebesar 2,56% (qtq), kelompok bank swasta tumbuh 3,38% dan kelompok bank asing/campuran tumbuh 1,45%. Dengan kondisi tersebut menyebabkan komposisi DPK tidak terlalu banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Pangsa DPK kelompok bank pemerintah turun dari 49,25% menjadi 49,09%, pangsa bank swasta naik dari 46,56% menjadi 46,78% dan pangsa bank asing/campuran berkurang dari 4,18% menjadi 4,13%.

Grafik 3.5. Perkembangan DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

Grafik 3.6. DPK Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Triwulan IV-2009 Berdasarkan Golongan Kepemilikan



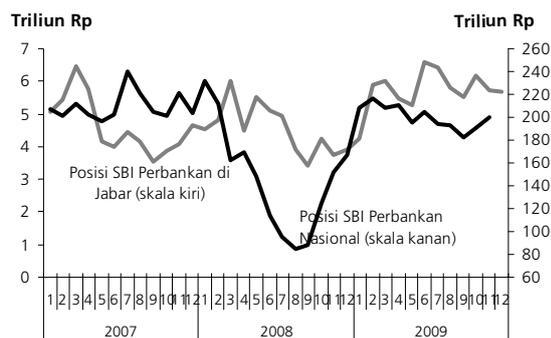
Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan golongan pemilik, pada triwulan IV-2009, DPK milik perseorangan masih mendominasi pangsa DPK bank umum konvensional di Jawa Barat yakni sebesar 72% (Grafik 3.6.). Sementara itu, jika dilihat pertumbuhannya, pertumbuhan triwulanan tertinggi terjadi pada DPK milik perusahaan swasta sebesar 17,36% (qtq). Pertumbuhan tahunan tertinggi terjadi pada DPK milik yayasan dan badan sosial sebesar 29,15% (yoy).

Ekses Likuiditas

Penempatan perbankan Jawa Barat pada Sertifikat Bank Indonesia (SBI) Posisi bulan Desember 2009, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan posisi triwulan sebelumnya. Jumlah penempatan SBI oleh perbankan Jawa Barat pada posisi bulan Desember 2009 mencapai Rp5,67 triliun atau sedikit naik 2,47% dibandingkan posisi September 2009. Sementara itu, posisi SBI perbankan nasional sampai bulan November 2009 mencapai Rp199 triliun, sehingga porsi penempatan SBI perbankan Jawa Barat terhadap perbankan nasional hanya sebesar 2,87% atau lebih rendah dibandingkan pangsa pada bulan September 2009 yang mencapai 3,03%.

Grafik 3.7. Perkembangan SBI Bank Umum Konvensional di Jawa Barat dan SBI Perbankan Nasional



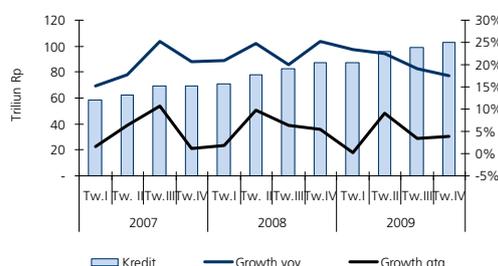
Sumber: LBU KBI Bandung

2.2 Perkembangan Kredit dan Risikonya

Perkembangan Kredit

Perkembangan kredit bank umum konvensional di Jawa Barat masih mengalami perlambatan terutama masih didorong oleh perlambatan kredit modal kerja (Grafik 3.8.). Outstanding kredit yang disalurkan posisi Desember 2009 adalah sebesar Rp102,62 triliun. Secara tahunan, kredit tumbuh 17,49% (yoy) melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang sebesar 19,20%. Sementara itu, secara triwulanan, kredit tumbuh 3,90% (qtq) atau sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 3,47%(qtq). Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit selama tahun 2009 lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2008 yang mencapai 25,25%.

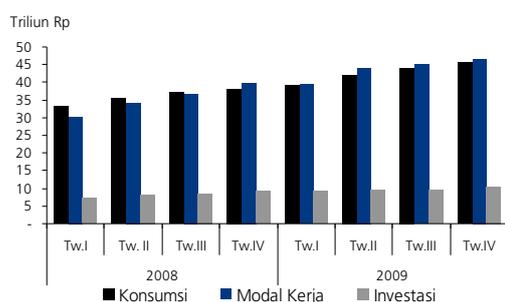
Grafik 3.8. Perkembangan Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat



Sumber: LBU KBI Bandung

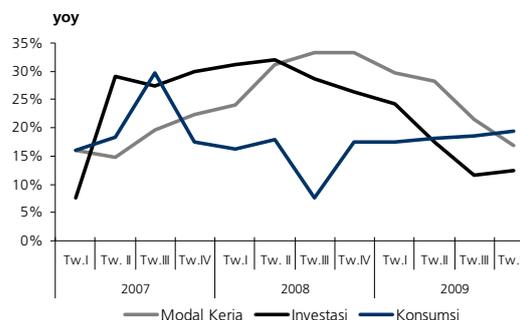
Berdasarkan jenis penggunaannya, pertumbuhan kredit modal kerja mengalami perlambatan, sebaliknya pertumbuhan kredit investasi dan konsumsi mulai menunjukkan peningkatan. *Outstanding* Kredit modal kerja tumbuh melambat dari 21,59% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 16,80% pada triwulan IV-2009 yang mencapai Rp46,68 triliun. Kondisi berbeda terjadi pada pertumbuhan *outstanding* kredit investasi yang mulai menunjukkan peningkatan dari 11,53% (yoy) menjadi 12,44% atau menjadi sebesar Rp10,36 triliun. Sementara pertumbuhan *outstanding* kredit konsumsi meningkat dari 18,61% (yoy) menjadi 19,42% atau menjadi sebesar Rp45,58 triliun.

Grafik 3.9. Perkembangan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU KBI Bandung

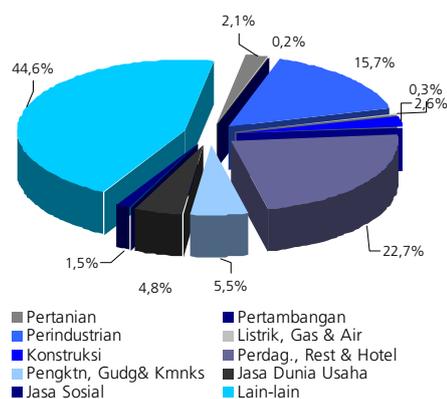
Grafik 3.10. Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU KBI Bandung

Sejalan dengan pangsa PDRB Jawa Barat, kredit yang disalurkan masih tetap didominasi oleh tiga sektor utama yakni sektor lain-lain (konsumsi), sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR) dan sektor industri pengolahan masing-masing dengan pangsa 44,6%, 22,7% dan 15,7%. Secara tahunan, kredit yang disalurkan sebagian besar sektor ekonomi mengalami perlambatan kecuali pada sektor PHR, sektor konstruksi serta sektor jasa dunia usaha. Kredit ke sektor pengangkutan dan komunikasi masih mengalami pertumbuhan sangat signifikan, yakni sebesar 82,07% (yoy) menjadi Rp5,63 triliun. Kredit ke sektor PHR yang menempati posisi kedua terbesar mengalami peningkatan dari 22,00% menjadi 23,93%. Sementara kredit ke sektor industri pengolahan yang melambat dari -1,09% menjadi -3,97%. Setelah pada triwulan III-2009 mengalami perlambatan, secara triwulanan, pertumbuhan kredit yang disalurkan mengalami mulai mengalami peningkatan kecuali sektor listrik, gas & air, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor lain-lain. Sektor pertanian mengalami pertumbuhan terbesar yakni 9,45% (qtq), sementara sektor listrik, gas dan air dan pengangkutan & komunikasi masing-masing mengalami kontraksi 8,93% dan 1,37%.

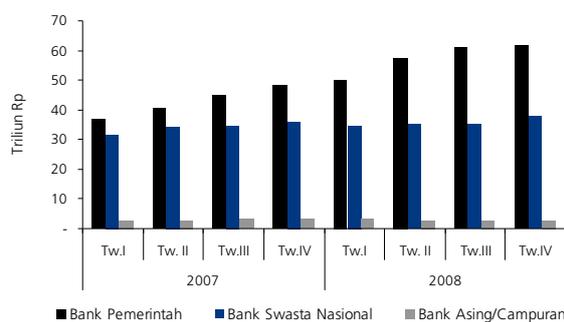
Grafik 3.11. Pangsa Kredit yang disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Sektor Ekonomi Triwulan IV-2009



Sumber: LBU KBI Bandung

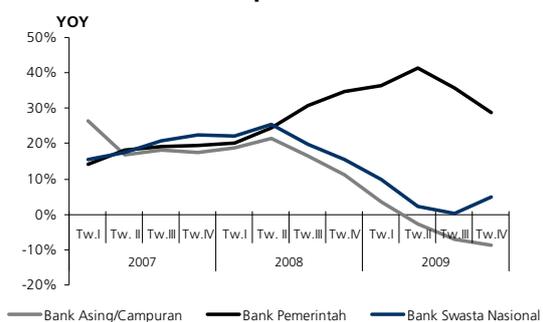
Berdasarkan kelompok bank di Jawa Barat, hanya kelompok bank swasta yang mengalami peningkatan. Pertumbuhan kredit kelompok Bank swasta pada triwulan laporan mulai meningkat setelah pada tiga triwulan sebelumnya mengalami perlambatan. Sementara itu, pada kelompok bank pemerintah dan bank asing/campuran masih terus mengalami tren perlambatan (Grafik 3.13.). Secara tahunan, pada triwulan IV-2009, pertumbuhan *outstanding* kredit kelompok bank swasta tumbuh 4,85% menjadi Rp34,65 triliun. Kredit yang disalurkan kelompok bank pemerintah tumbuh 28,65% (yoy) menjadi Rp60,94 triliun. Sementara kelompok bank asing/campuran mengalami kontraksi sebesar 8,66% menjadi Rp2,83 triliun.

Grafik 3.12. Perkembangan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

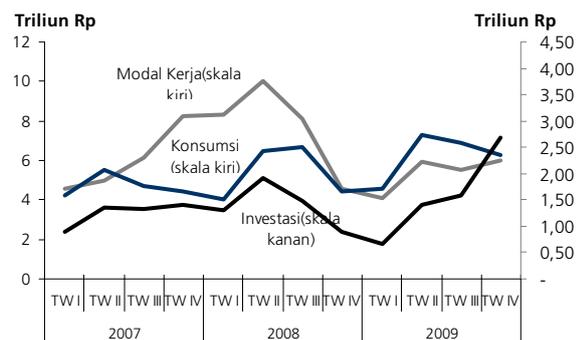
Grafik 3.13. Perkembangan Pertumbuhan Kredit yang Disalurkan Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

Pada triwulan IV-2009, persetujuan plafon kredit baru meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Jumlah persetujuan plafon kredit baru selama triwulan IV-2009 mencapai Rp14,96 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 6,87% (qtq) berbeda dengan triwulan sebelumnya yang mengalami penurunan sebesar 4,38% (qtq). Sementara secara tahunan, jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 51,77% (yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, persetujuan plafon untuk kredit investasi terus menunjukkan peningkatan. Pada triwulan IV-2009, persetujuan plafon kredit investasi tumbuh 70,04% (qtq) atau 201,35% (yoy) atau menjadi sebesar Rp2,69 triliun. Kredit untuk konsumsi dan modal kerja, secara triwulanan mengalami penurunan masing-masing sebesar 5,79% (qtq) dan 6,99%, menjadi Rp6,87 triliun dan Rp5,53 triliun. Secara tahunan, persetujuan plafon untuk kredit modal kerja mengalami penurunan sebesar 32,06% (yoy), sedangkan kredit konsumsi tetap tumbuh 3,15%.

Grafik 3.14. Perkembangan Persetujuan Plafon Kredit Baru Bank Umum Konvensional di Jawa Barat



Sumber: LBU KBI Bandung

Sebagian besar kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat masih terfokus di Kota Bandung (47,00% dari total *outstanding* kredit). Pangsa tersebut sedikit

mengalami penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya (46,35%). Tingginya pangsa kredit di Kota Bandung cukup beralasan mengingat sebagian besar unit usaha di Jawa Barat berada di Kota Bandung dan sekitarnya. Sementara itu, pangsa kabupaten dan kota lainnya di bawah 7%. Terbesar kedua adalah Kota Bekasi (6,90%), disusul Kota Bogor (6,67%) dan sisanya tersebar di 22 kabupaten dan kota lainnya.

Tabel 3.1. Jumlah Kredit Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota Triwulan IV-2009

KABUPATEN/KOTA	KREDIT (Juta Rupiah)	Pangsa
Kota Bandung	48.234.451	47,00%
Kota Bekasi	7.077.990	6,90%
Kota Bogor	6.840.459	6,67%
Kota Cirebon	6.303.960	6,14%
Kota Tasikmalaya	4.255.541	4,15%
Kab. Karawang	3.070.496	2,99%
Kota Sukabumi	2.703.694	2,63%
Kab. Subang	2.309.592	2,25%
Kab. Garut	1.915.873	1,87%
Kab. Bekasi	1.795.146	1,75%
Kab. Purwakarta	1.769.197	1,72%
Kota Depok	1.765.123	1,72%
Kab. Bandung	1.756.570	1,71%
Kab. Bogor	1.708.834	1,67%
Kab. Cianjur	1.597.014	1,56%
Kab. Indramayu	1.449.068	1,41%
Kota Cimahi	1.301.265	1,27%
Kab. Majalengka	1.269.469	1,24%
Kab. Sumedang	1.233.341	1,20%
Kab. Kuningan	1.054.149	1,03%
Kab. Ciamis	961.381	0,94%
Kota Banjar	866.837	0,84%
Kab. Sukabumi	802.951	0,78%
Kab. Tasikmalaya	363.747	0,35%
Kab. Cirebon	216.520	0,21%
JUMLAH	102.622.668	100%

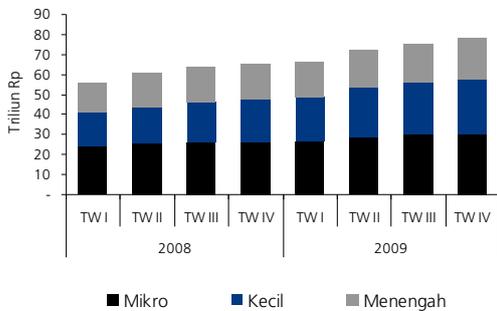
Sumber: LBU KBI Bandung

Kredit Mikro, Kecil dan Menengah (MKM)

Berbeda dengan perkembangan kredit secara keseluruhan, pertumbuhan kredit kredit MKM (Mikro, Kecil dan Menengah) yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat mulai mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sampai dengan posisi triwulan IV-2009, pertumbuhan outstanding kredit MKM meningkat dari 17,92% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 19,55% atau menjadi sebesar Rp78,04%. Jika dilihat berdasarkan skala nominalnya, kredit mikro (di bawah Rp50 juta) memiliki pangsa terbesar yakni 38,95%, kredit kecil (di atas Rp50 juta namun di bawah Rp500 juta) pangasanya mencapai 34,9%, dan sisanya 26,13% merupakan kredit menengah (di atas Rp500 juta namun di bawah Rp5 miliar). Sementara itu, berdasarkan jenis

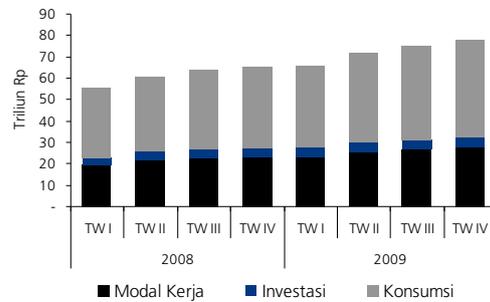
penggunaannya, kredit MKM masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan pangsa sebesar 58% sedangkan sisanya sebesar 42% merupakan kredit produktif (modal kerja dan investasi).

Grafik 3.15. Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Skala Usaha



Sumber: LBU KBI Bandung

Grafik 3.16. Perkembangan Kredit MKM Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU KBI Bandung

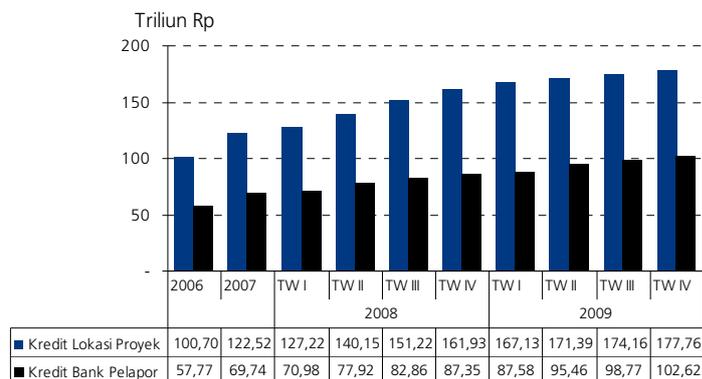
Kredit dengan Lokasi Proyek di Jawa Barat

Pertumbuhan kredit yang disalurkan ke Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat. Sampai dengan posisi triwulan IV-2009 (bulan November 2009), *outstanding* kredit yang berlokasi di Jawa Barat tercatat sebesar Rp177,76 triliun atau tumbuh 9,77% (yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan kredit bank pelapor yang

tercatat 17,49%. Lebih besarnya kredit yang disalurkan ke Jawa Barat menunjukkan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu tujuan utama perbankan nasional dalam penyaluran kredit.

Berdasarkan jenis penggunaannya, kredit berlokasi proyek di Jawa Barat masih didominasi oleh kredit produktif (modal kerja dan investasi) yang mencapai 61% dari total kredit, sedangkan sisanya sebesar 39% merupakan kredit untuk konsumsi. Sementara itu, berdasarkan sektor ekonominya, kredit masih didominasi oleh kredit konsumsi (39%), kredit sektor industri pengolahan sebesar 25%, serta kredit sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 18%.

Grafik 3.17. Perkembangan Kredit Lokasi Proyek dan Kredit Bank Pelapor



Keterangan:

Kredit Lokasi Proyek adalah kredit yang diberikan di wilayah Jawa Barat

Kredit bank pelapor adalah kredit yang diberikan oleh bank umum konvensional di Jawa Barat

Sumber: LBU KBI Bandung

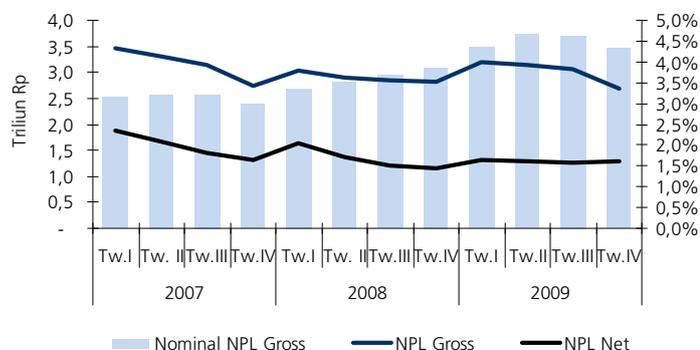
Risiko kredit

Risiko kredit yang disalurkan bank umum konvensional di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 menurun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Persentase jumlah kredit bermasalah kotor atau *Non Performing Loan* (NPL) Gross menurun dari 3,82% di triwulan III-2009 menjadi 3,37% pada triwulan IV-2009. Begitu juga dengan nominalnya, turun dari

Rp3,70 triliun menjadi Rp3,46 triliun. Sementara itu, persentase NPL net sedikit meningkat dari 1,58% menjadi 1,60%. Selain itu, seiring dengan membaiknya prospek perekonomian dunia di tahun 2010, diperkirakan risiko kredit perbankan akan semakin terkendali.

Grafik 3.18. Perkembangan Jumlah Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional di Jawa Barat

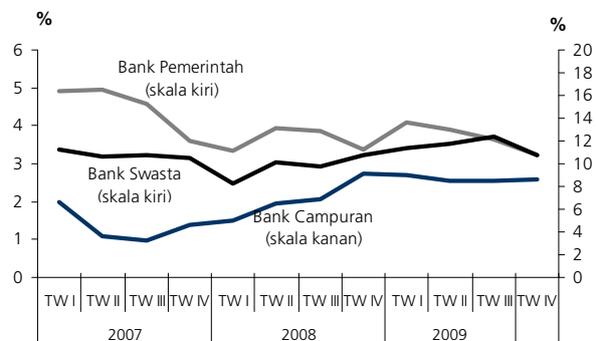


Sumber: LBU KBI Bandung

Pada triwulan IV-2009, berdasarkan kelompok bank, persentase NPL gross untuk kelompok bank pemerintah dan bank swasta menurun, sebaliknya kelompok bank asing/campuran meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Persentase NPL gross kelompok bank pemerintah mengalami penurunan dari 3,64% pada triwulan III-2009 menjadi 3,24% pada triwulan IV-2009. Hal yang sama terjadi pada NPL di kelompok bank swasta, yaitu turun dari 3,37% menjadi 3,23%. Sementara itu, persentase NPL gross pada kelompok bank asing/campuran terus mengalami peningkatan dari 8,44% menjadi 8,63%.

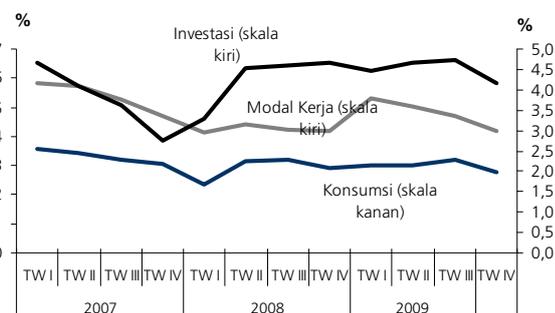
Grafik 3.19. Perkembangan Non Performing Loan Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kelompok Bank



Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan jenis penggunaannya, pada triwulan IV-2009, seluruh jenis penggunaan mulai mengalami penurunan NPL. Persentase NPL gross kredit investasi mengalami peningkatan dari 6,61% pada triwulan III-2009 menjadi 5,84%. Adapun NPL gross kredit konsumsi yang turun dari 2,29% menjadi 1,29%. Sementara itu, kredit modal kerja mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya dari 4,72% menjadi 4,20%.

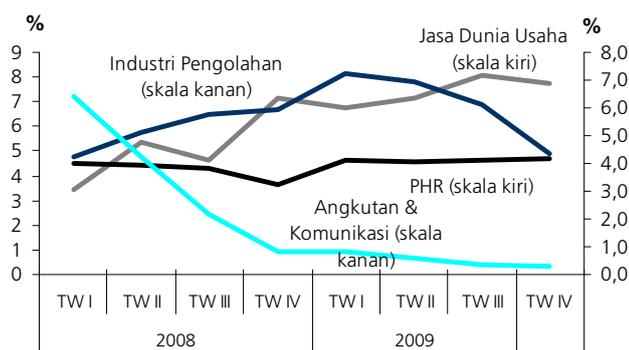
Grafik 3.20. Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Jenis Penggunaan



Sumber: LBU KBI Bandung

Pada triwulan IV-2009, risiko kredit pada seluruh sektor ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya kecuali sektor jasa sosial, sektor PHR, dan sektor listrik, gas & air. Persentase NPL gross kredit yang disalurkan kepada sektor industri pengolahan turun dari 6,14% pada triwulan III-2009 menjadi 4,33% pada triwulan IV-2009. Sedangkan NPL gross kredit kepada sektor PHR naik dari 4,64% menjadi 4,68%.

Grafik 3.21. Perkembangan NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Beberapa Sektor Ekonomi Utama



Sumber: LBU KBI Bandung

Berdasarkan lokasi kota/kabupaten, persentase kredit bermasalah terbesar terdapat di Kabupaten Purwakarta mencapai 13,17% terhadap kredit yang disalurkan di kabupaten tersebut. Dua daerah lainnya yang memiliki persentase kredit bermasalah di atas 4% adalah Kabupaten Subang yang mencapai 4,60%, dan Kabupaten Karawang mencapai 4,39%. Sementara itu, daerah yang memiliki persentase NPL terendah adalah Kabupaten Cirebon (0,30%).

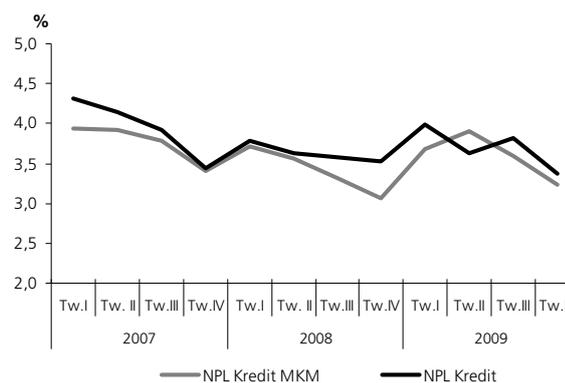
Tabel 3.2. NPL Gross Bank Umum Konvensional di Jawa Barat Berdasarkan Kabupaten/Kota

KABUPATEN/KOTA	KREDIT (Juta Rp)	NPL	
		NOMINAL (Juta Rp)	%
Kab. Purwakarta	1.769.197	232.971	13,17
Kab. Subang	2.309.592	106.170	4,60
Kab. Karawang	3.070.496	134.840	4,39
Kota Bekasi	7.077.990	260.595	3,68
Kota Bandung	48.234.451	1.731.715	3,59
Kota Depok	1.765.123	62.498	3,54
Kota Sukabumi	2.703.694	90.582	3,35
Kota Cirebon	6.303.960	208.244	3,30
Kab. Sukabumi	802.951	25.978	3,24
Kota Bogor	6.840.459	196.696	2,88
Kab. Tasikmalaya	363.747	9.755	2,68
Kab. Indramayu	1.449.068	37.990	2,62
Kab. Majalengka	1.269.469	32.127	2,53
Kab. Bekasi	1.795.146	43.638	2,43
Kota Banjar	866.837	18.389	2,12
Kota Tasikmalaya	4.255.541	89.241	2,10
Kab. Cianjur	1.597.014	30.379	1,90
Kab. Bogor	1.708.834	32.369	1,89
Kab. Sumedang	1.233.341	21.570	1,75
Kab. Garut	1.915.873	31.909	1,67
Kab. Bandung	1.756.570	25.272	1,44
Kab. Kuningan	1.054.149	12.697	1,20
Kab. Ciamis	961.381	10.856	1,13
Kota Cimahi	1.301.265	13.976	1,07
Kab. Cirebon	216.520	658	0,30
Jumlah	102.622.668	3.461.115	3,37

Sumber: LBU KBI Bandung

Risiko kredit mikro kecil dan menengah (MKM) pada triwulan IV-2009 masih lebih rendah dibandingkan risiko kredit keseluruhan. Persentase NPL gross kredit MKM mengalami penurunan dari 3,60% pada triwulan III-2009 menjadi 3,23%, sama halnya dengan persentase NPL Gross kredit total mengalami penurunan dari 3,82% menjadi 3,37%. Rendahnya NPL

Grafik 3.22. Perkembangan NPL Gross Kredit MKM dan Total Kredit



Sumber: LBU KBI Bandung

MKM menunjukkan bahwa sektor MKM memiliki ketahanan yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya.

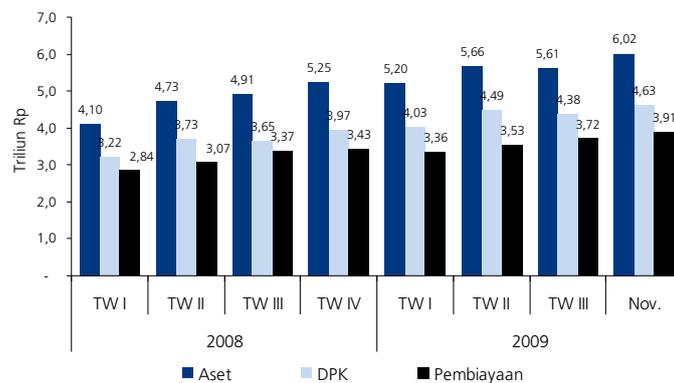
2.3 Risiko Pasar

Selama tahun 2009 suku bunga perbankan di Jawa Barat cenderung terjadi penurunan. Hal ini terlihat dari penurunan suku bunga deposito jangka waktu 1 bulan yang mendekati penurunan BI rate. Selama tahun 2009, BI rate sudah turun sebesar 275 basis poin dari 9,25% di Desember 2008 menjadi 6,50% di bulan Desember 2009, sedangkan rata-rata suku bunga deposito 1 bulan telah turun 273 basis poin dari 8,10% pada bulan Desember 2008 menjadi 5,37% pada bulan Desember 2009. Peluang penurunan suku bunga diperkirakan masih tetap terbuka sejalan dengan arahan Gubernur Bank Indonesia pada *Bankers Dinner* 2010 terhadap kebijakan perbankan di tahun 2010 yang meminta bank agar memaksimalkan efisiensi perbankan. Bank Indonesia akan melakukan *benchmarking* terhadap biaya dana untuk kredit, biaya *overhead*, premi risiko dan margin keuntungan. Dengan demikian bank dapat mencari area-area yang dapat ditingkatkan efisiensinya guna mendorong penetapan suku bunga kredit yang lebih wajar dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kewajaran pasar

3. BANK UMUM SYARIAH

Pada triwulan IV-2009, secara umum, perkembangan bank umum syariah di Jawa Barat mengalami peningkatan kecuali DPK. Secara tahunan, sampai dengan posisi bulan November 2009, pertumbuhan total aset bank umum syariah meningkat dari 14,09% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 14,55% atau menjadi sebesar Rp6,02 triliun. Pertumbuhan penyaluran

Grafik 3.23. Perkembangan Indikator Bank Umum Syariah Di Jawa Barat



Sumber: LBUS KBI Bandung

pembiayaan relatif stabil dari 10,40% (yoy) menjadi 14,05% atau menjadi sebesar Rp3,91 triliun. Sebaliknya pertumbuhan DPK melambat dari 20,01% (yoy) menjadi 16,40% atau menjadi sebesar Rp4,63 triliun. Sementara itu secara triwulanan, pertumbuhan total aset bank umum syariah meningkat dari -1,05% (qtq) pada triwulan sebelumnya menjadi 7,34%. Begitu juga dengan pertumbuhan DPK pada triwulan laporan yang mengalami peningkatan dari -2,52% (qtq), menjadi 5,60%. Sementara itu, pertumbuhan penyaluran pembiayaan yang mengalami perlambatan dari 5,35% (qtq) pada triwulan III-2009 menjadi 5,21% pada triwulan IV-2009. Dengan kondisi tersebut, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank umum syariah di Jawa Barat relatif tetap yakni sebesar 85% pada triwulan laporan. Di sisi lain, risiko pembiayaan mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah pembiayaan bermasalah/*Non Performing Financing* (NPF) yang mengalami penurunan dari 4,01% pada September 2009 menjadi 3,68% pada Desember 2009.

4. BANK UMUM YANG BERKANTOR PUSAT DI JAWA BARAT

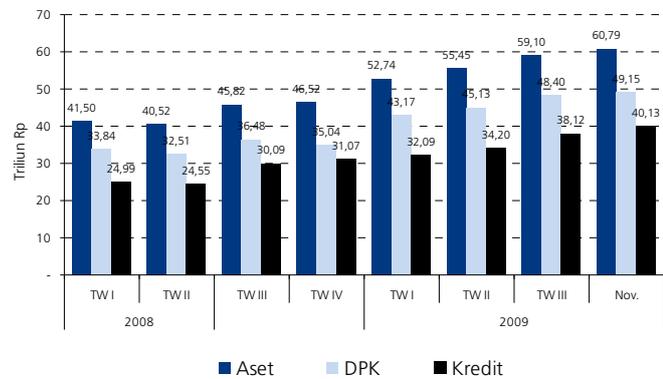
Pada triwulan IV-2009, indikator perkembangan bank umum berkantor pusat di Jawa Barat mulai menunjukkan peningkatan.

Secara tahunan, pertumbuhan aset meningkat dari 28,99% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 30,67% pada November 2009 atau menjadi Rp60,79 triliun. Demikian juga dengan kredit yang disalurkan mengalami peningkatan dari

26,68% menjadi 29,16% atau menjadi Rp40,13 triliun. Pertumbuhan DPK meningkat dari 23,66% menjadi 40,28% atau menjadi Rp49,15 triliun. Sementara itu secara triwulanan, perlambatan terjadi pada total aset, penyaluran kredit dan DPK. Pertumbuhan total aset melambat dari 6,58% (qtq) menjadi 2,87%. Pertumbuhan penyaluran kredit melambat dari 11,44% (qtq) menjadi 5,28% dan DPK tumbuh melambat dari 7,24% (qtq) menjadi 1,56%. Di sisi lain, LDR bank umum tersebut mengalami peningkatan dari 79% triwulan sebelumnya menjadi 82%. Sementara itu, risiko kredit sedikit meningkat seperti yang terlihat dari persentase kredit bermasalah yang naik dari 1,05% pada triwulan sebelumnya menjadi 1,10% pada triwulan IV-2009.

Sampai dengan posisi triwulan IV-2009, tujuh bank umum yang berkantor pusat di Jawa Barat menunjukkan kinerja yang cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari laba yang berhasil diperoleh selama tahun 2009. Sampai dengan bulan Desember 2009 *Net Interest Income* (NII) tercatat sebesar Rp4,42 triliun atau lebih tinggi dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,46 triliun. Persentase NII hanya mencapai 9,62% atau sedikit lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya (9,70%). Sementara itu, rasio *Return on Asset* (ROA) sampai dengan bulan Desember 2009 tercatat sebesar 2,89% lebih rendah dibandingkan dengan posisi Agustus 2008 (3,32%), sedangkan rasio efisiensi antara Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) 81,32% lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun 2008 yang sebesar 77,45%.

Grafik 3.24. Perkembangan Indikator Bank Umum yang Berkantor Pusat di Jawa Barat

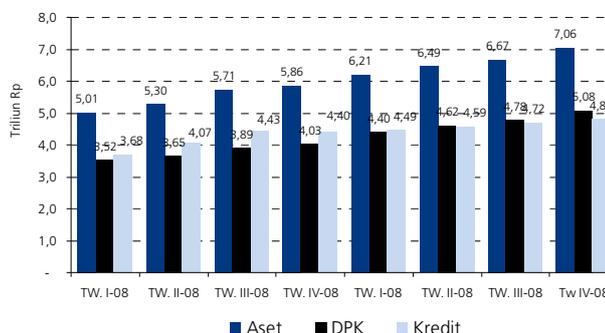


Sumber: LBU KBI Bandung

5. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Perkembangan indikator BPR konvensional di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 mulai mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya pertumbuhan beberapa indikator seperti aset, DPK dan kredit. Secara tahunan, pertumbuhan total aset meningkat dari 16,73% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 20,44% di triwulan IV-2009 atau menjadi sebesar Rp7,06 triliun. Demikian juga dengan

Grafik 3.25. Perkembangan Indikator BPR Konvensional di Jawa Barat



Sumber: LBPR KBI Bandung

pertumbuhan DPK yang tumbuh meningkat dari 22,99% (yoy) menjadi 26,17% atau menjadi Rp5,08 triliun. Sementara itu, penyaluran kredit BPR juga tumbuh dari 6,50% (yoy) menjadi 9,46% atau menjadi Rp4,81 triliun. Secara triwulanan, total aset dan DPK mengalami peningkatan, sebaliknya penyaluran kredit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan total aset meningkat dari 2,77% (qtq) pada triwulan III-2009 menjadi 5,87% pada bulan Desember 2009. DPK tumbuh dari 3,47% (qtq) menjadi 6,32%, sedangkan kredit yang disalurkan justru mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2,77% (qtq) menjadi 1,99%.

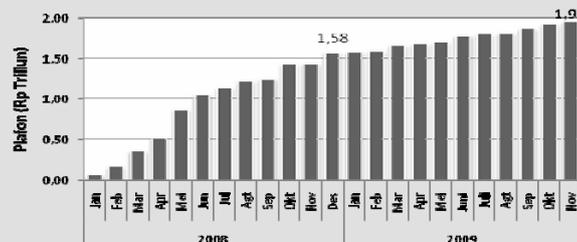
Sebagian besar kredit yang disalurkan BPR merupakan kredit produktif (modal kerja dan investasi). Pangsa kredit produktif tersebut mencapai 57,7% dari total kredit BPR, sedangkan sisanya merupakan kredit untuk konsumsi. Kredit modal kerja mengalami pertumbuhan sebesar 6,47% (qtq) atau 8,67% (yoy) menjadi Rp2,64 triliun, sementara kredit konsumsi tumbuh -2,24% (qtq) atau 12,47% (yoy) menjadi Rp2,03 triliun. Sebaliknya, kredit investasi mengalami penurunan sebesar 4,42% (qtq) atau 8,93% (yoy) menjadi Rp134,29 miliar. Di sisi lain, risiko kredit BPR masih cukup tinggi. Pada posisi bulan Desember 2009, persentase kredit bermasalah kotor (NPL Gross) mencapai 8,68% atau menurun dibandingkan dengan posisi bulan September 2009 yang mencapai 9,58%.

BOKS 3

PERKEMBANGAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) DI JAWA BARAT

Realisasi KUR di Jawa Barat telah disalurkan kepada 342.726 debitur dengan total plafon sampai dengan November 2009 sebesar Rp1,95 triliun atau tumbuh sebesar 24,01% (yoy). Total KUR yang disalurkan sepanjang tahun 2009 lebih rendah dibandingkan penyaluran selama tahun 2008. Beberapa kendala antara lain, dalam hal regulasi (ketentuan melampirkan BI-checking) maupun teknis (keterbatasan SDM bank), serta adanya faktor eksternal (keketatan likuiditas perbankan) menjadi penyebab tidak optimalnya penyaluran KUR oleh bank pelaksana.

Secara nasional, pangsa penyaluran KUR di Jawa Barat menempati posisi ketiga setelah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Walaupun secara ranking posisi Jawa Barat tersebut tidak mengalami perubahan tetapi berdasarkan pangsa plafonnya mengalami sedikit penurunan dari 12,48% menjadi sebesar 11,87% dari total penyaluran KUR secara nasional yang mencapai Rp16,45 triliun.



Grafik Posisi Plafon KUR Jawa Barat per Bulan

Sumber: Kantor Menko Perekonomian

NPL KUR mengalami kenaikan dari 1,32% pada akhir tahun 2008 menjadi 4,12% pada bulan November 2009. Meskipun demikian, besarnya NPL di Jawa Barat masih di bawah nilai NPL secara nasional yang mencapai 5,75%. Adapun sektor yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan NPL di Jawa Barat adalah sektor pertambangan (85,09%), sektor lain-lain (11,45%), dan sektor pengangkutan, perdagangan dan komunikasi (5,13%).



Perkembangan NPL KUR Jawa Barat

Sumber: Laporan Bulanan Bank Penyalur

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB 4

KEUANGAN DAERAH

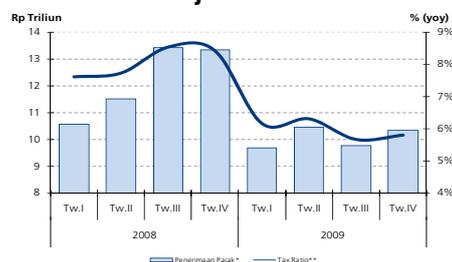
Pertumbuhan realisasi penerimaan APBN dan APBD di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Meskipun masih tumbuh negatif, kinerja penerimaan pajak untuk APBN di Jawa Barat telah membaik. Sementara itu, kinerja penerimaan pajak Pemerintah daerah di Jawa Barat naik sejalan dengan membaiknya perekonomian Jawa Barat. Namun demikian, penerimaan pajak pemerintah pusat dan daerah di Jawa Barat pada tahun 2009 tidak mampu menyamai tahun sebelumnya.

Di sisi belanja, baik realisasi APBD maupun APBN di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 meningkat drastis sebagaimana terlihat dari seluruh indikator keuangan daerah. Belanja Pemerintah Pusat di daerah meningkat terutama pada dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, sementara, realisasi dana yang berasal dari Pinjaman luar negeri pada periode laporan relatif terbatas. Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat diperkirakan naik drastis daripada triwulan sebelumnya karena percepatan realisasi keuangan proyek infrastruktur dan bantuan sosial ke tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, realisasi keuangan pemerintah pusat dan Provinsi diperkirakan belum sesuai target.

1. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT DI JAWA BARAT

Tax ratio¹ (rasio pajak terhadap PDRB) Jawa Barat naik dari 5,66% pada triwulan III-2009 menjadi 5,80% pada triwulan IV-2009 (Grafik 4.1). Kenaikan penerimaan pajak pemerintah pusat dan Provinsi masing-masing disebabkan oleh kenaikan realisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Kendaraan Bermotor sejalan dengan pemulihan perekonomian regional. Sementara itu, pertumbuhan realisasi dana perimbangan relatif stagnan.

Grafik 4.1. Tax Ratio dan Total Penerimaan Pajak di Provinsi Jawa Barat



Keterangan: *) Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat yang terdiri dari PPh, PPN, dan PBB serta perkiraan penerimaan pajak pemerintah daerah, **) Tax ratio adalah pembagian antara pajak dengan PDRB Jawa Barat (Atas Dasar Harga Berlaku)

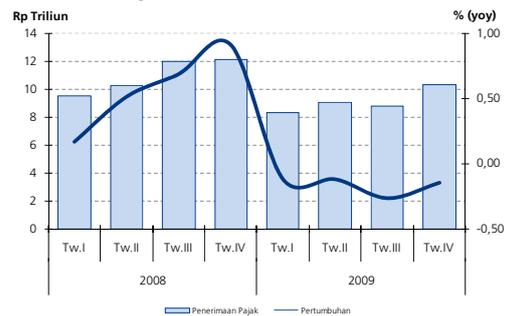
Sumber: BPS, Dipenda Provinsi Jawa Barat, & KBI Bandung

Pertumbuhan penerimaan APBN di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 naik dibandingkan dengan triwulan III-2009. Kenaikan penerimaan pemerintah pusat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya disebabkan oleh pembayaran pajak dari proyek pemerintah serta faktor musiman, yakni peningkatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada akhir tahun. Namun demikian, penerimaan pajak pemerintah pusat turun dari tahun sebelumnya karena insentif keringanan pajak pada tahun 2009 yang diberikan sebagai stimulus fiskal, serta melambatnya perekonomian Jawa Barat pada tahun 2009.

¹ Tax ratio adalah rasio penerimaan pajak terhadap PDRB (Atas Dasar Harga Berlaku)

Pertumbuhan tahunan pendapatan pajak pemerintah pusat masih mengalami kontraksi meskipun telah menunjukkan perbaikan, yaitu dari -26,72% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi -14,78% pada triwulan IV-2009 (Grafik 4.2). Kontraksi penerimaan pajak pada tahun 2009 disebabkan oleh dampak pelemahan permintaan. Kenaikan penerimaan pajak tersebut seiring dengan realisasi sebagian besar proyek pembangunan pemerintah serta pelunasan PBB di akhir tahun.

Grafik 4.2. Perkembangan Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat



Sumber: Mutasi Rekening Pemerintah Pusat di KBI Bandung

Tabel 4.1. Perkembangan Pendapatan Pemerintah Pusat di Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I

Jenis Pajak	2008	2009				2009
		Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	
A. Pajak Penghasilan	5.509,26	412,42	1.324,18	1.633,41	2.372,20	5.742,21
B. PPN dan PPN BM	2.242,96	191,99	641,01	736,71	1.454,70	3.024,40
C. PL dan PIB	148,70	11,08	40,99	39,79	69,59	161,45
D. PBB dan BPHTB	1.133,94	22,28	295,61	560,84	630,12	1.508,85
Jumlah	9.034,86	637,77	2.301,79	2.970,75	4.526,61	10.436,92
Pertumbuhan (% , yoy)		(64,94)	18,54	25,57	55,66	15,52

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I meliputi Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka

Penerimaan pajak pemerintah pusat pada periode laporan lebih besar dibandingkan triwulan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh peningkatan Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh dari realisasi anggaran proyek pembangunan pemerintah. Selain itu, pada akhir tahun masyarakat pada umumnya melakukan pelunasan PBB sebelum jatuh tempo.

Penerimaan pajak DJP Jawa Barat I pada tahun 2009 naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan penerimaan pajak DJP Jawa Barat II yang turun sebagaimana diindikasikan oleh jumlah mutasi rekening pemerintah pusat yang dicatat oleh KBI Bandung. Berdasarkan informasi dari DJP Jawa Barat I, kenaikan penerimaan pajak disebabkan oleh pengaruh *sunset policy* yang meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi, pelaksanaan PEMILU yang menyebabkan peningkatan omzet pengusaha atribut dan perlengkapan kampanye, serta peningkatan pajak yang berasal dari program stimulus fiskal pembangunan infrastruktur.

Sementara, insentif keringanan pajak PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) diperkirakan tidak akan terserap hingga akhir tahun. Wajib pajak di Jawa Barat hanya merealisasikan sekitar 10%-15% dari stimulus keringanan PPh 21. Beberapa pengusaha tidak merealisasikan stimulus tersebut disebabkan oleh jangka waktu penerapan stimulus yang pendek, dan ketidakpastian keberlanjutan stimulus fiskal tersebut yang dikhawatirkan berpengaruh terhadap upah bersih karyawan.

2. BELANJA DAERAH

Belanja pemerintah di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Belanja pemerintah terutama direalisasikan untuk pencairan anggaran proyek

pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh swasta. Namun demikian, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya realisasi keuangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi di Jawa Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2008.

2.1. BELANJA APBN DI JAWA BARAT

Baik pertumbuhan maupun tingkat realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Barat mengalami kenaikan. Pertumbuhan realisasi belanja dana dekonsentrasi serta program yang didanai Pinjaman luar negeri meningkat, sementara pertumbuhan realisasi dana dekonsentrasi relatif stagnan. Naiknya pertumbuhan realisasi belanja terutama terjadi untuk pelunasan pembiayaan proyek pembangunan fisik.

Belanja Dana Dekonsentrasi

Realisasi dana dekonsentrasi meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Dana dekonsentrasi berfungsi sebagai pembiayaan kegiatan pendukung dalam pelaksanaan program pemerintah pusat di daerah. Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh dana dekonsentrasi meliputi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan. Pada umumnya, anggaran yang dialokasikan pada dana dekonsentrasi lebih besar dibandingkan dengan dana tugas pembantuan yang bersifat pembangunan fisik. Pengalokasian dana dekonsentrasi juga ditujukan langsung kepada dinas/instansi di tingkat provinsi sementara wewenang dana tugas pembantuan diserahkan kepada pemerintah kota/kabupaten/provinsi untuk mengatur.

Peningkatan realisasi anggaran dana dekonsentrasi yang cukup tinggi terjadi pada hampir seluruh dinas. Pertumbuhan dana dekonsentrasi pemerintah daerah Jawa Barat meningkat dari 149,08% (qtq) menjadi 158,22% (Tabel 4.2). Realisasi terbesar dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat meskipun dengan persentase yang relatif rendah terhadap target/total anggaran. Sementara kenaikan realisasi belanja dinas lainnya hampir mendekati 40% dibandingkan dengan triwulan sebelumnya.

Tabel 4.2 Realisasi (ytd) Dana Dekonsentrasi Jawa Barat di Lima Dinas Penerima Anggaran Terbesar

Dinas	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.III		Tw.IV	
		Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan	Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan
Dinas Pendidikan	4540,44	904,46	19,92%	987,55	21,75%
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)	42,97	19,95	46,43%	35,00	81,45%
Dinas Pertanian	30,41	2,11	6,94%	15,30	50,32%
Dinas Sosial	25,21	13,13	52,10%	23,37	92,69%
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	14,5	6,24	43,01%	14,17	97,70%
Jumlah	4637,44	1190,89	25,68%	3075,09	66,31%
Pertumbuhan (qtq)		149,08%		158,22%	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Dinas Pendidikan mengalokasikan dana terbesar untuk program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, yakni sebesar Rp3,94 triliun (86,78% dari total). Program wajib belajar tersebut ditujukan kepada 6.394 siswa di Jawa Barat. Sementara itu, Departemen Pekerjaan Umum di

Jawa Barat hanya mengalokasikan dana dekonsentrasi kepada Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Provinsi Jawa Barat. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan program pembinaan penataan tata ruang.

Realisasi dana dekonsentrasi di Jawa Barat pada tahun 2009 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tingkat realisasi dana dekonsentrasi turun, yakni pada tahun 2008 sebesar 75,02% menjadi 66,31% pada tahun 2009 (Tabel 4.3). Dinas Pendidikan mengalami kesulitan dalam realisasi anggaran karena adanya perubahan penyaluran Biaya Operasional Sekolah dari sebelumnya secara langsung seperti melalui beasiswa, menjadi menggunakan kegiatan bimbingan belajar.

Tabel 4.3 Realisasi Dana Dekonsentrasi Jawa Barat Antar Tahun di Lima Dinas Penerima Alokasi Anggaran Terbesar

Dinas	2008		2009	
	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.IV	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.IV
Dinas Pendidikan	5.432,40	83,81%	4.540,44	21,75%
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD)	4,11	90,29%	42,97	81,45%
Dinas Pertanian	35,56	87,95%	30,41	50,32%
Dinas Sosial	30,24	95,58%	25,21	92,69%
Dinas Tata Ruang dan Pemukiman	0	0,00%	14,50	97,70%
Jumlah	3.226,94	75,02%	4.637,44	66,31%

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Belanja Dana Tugas Pembantuan

Dana Tugas Pembantuan merupakan dana yang dialokasikan untuk program pembangunan fisik pemerintah pusat di daerah. Tingkat realisasi dana tugas pembantuan meningkat dari 31,36% pada triwulan III-2009 menjadi 60,40% pada triwulan IV-2009 (Tabel 4.4). Namun demikian, pertumbuhan realisasi dana tersebut turun dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Dari 5 pemerintah daerah yang memperoleh dana tugas pembantuan terbesar, tingkat realisasi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah yang tertinggi yakni sebesar 92,80%.

Tabel 4.4 Realisasi Dana Tugas Pembantuan Jawa Barat di Lima Pemerintah Daerah Penerima Alokasi Anggaran Terbesar

Provinsi/Kabupaten/ Kota	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.III		Tw.IV	
		Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan	Realisasi (Rp Miliar)	Realisasi Keuangan
Provinsi Jawa Barat	204,89	51,43	25,10%	110,85	54,10%
Kabupaten Garut	117,34	35,99	30,67%	37,02	30,90%
Kabupaten Sukabumi	100,33	39,57	39,44%	40,33	40,20%
Kabupaten Tasikmalaya	87,94	54,53	62,01%	81,61	92,80%
Kabupaten Cianjur	75,29	42,48	56,42%	64,90	86,20%
Jumlah	1.145,16	359,12	31,36%	691,68	60,40%
Pertumbuhan (qtq)		159,17%		92,60%	

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Keterangan: *) Data sementara karena Kabupaten Majalengka belum melaporkan

Pemerintah daerah yang berhasil merealisasikan anggaran dana tugas pembantuan dengan jumlah tertinggi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hanya pada triwulan IV-2009 saja Pemerintah Provinsi telah merealisasikan anggaran sebesar 59,42 miliar. Berdasarkan informasi dari

BAPPEDA Provinsi Jawa Barat realisasi ditujukan untuk pembiayaan pembangunan proyek infrastruktur.

Namun demikian, tingkat realisasi dana tugas pembantuan di Provinsi Jawa Barat mengalami kenaikan dari 40,71% pada tahun 2008 menjadi 60,40% pada tahun sebelumnya (Tabel 4.5). Hal ini terutama disebabkan oleh kinerja realisasi anggaran Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Tasikmalaya yang naik cukup signifikan pada tahun ini. Kabupaten Tasikmalaya lebih cepat merealisasikan anggaran untuk program pembangunan pasca-gempa.

Tabel 4.5 Realisasi Dana Dekonsentrasi Jawa Barat Antar Tahun di Lima Pemerintah Daerah Penerima Alokasi Anggaran Terbesar

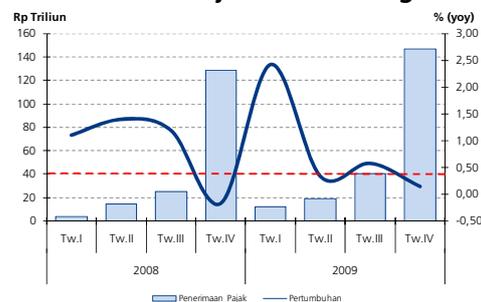
Provinsi/Kabupaten/Kota	2008		2009	
	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.IV	Anggaran (Rp Miliar)	Tw.IV
Provinsi Jawa Barat	176,89	35,05%	204,89	54,10%
Kabupaten Garut	48,39	41,76%	117,34	30,70%
Kabupaten Sukabumi	43,57	51,96%	100,33	39,40%
Kabupaten Tasikmalaya	33,38	60,66%	87,94	92,80%
Kabupaten Cianjur	33,08	74,49%	75,29	86,20%
Jumlah	705,46	40,71%	1.145,16	60,40%

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Belanja APBN yang Berasal dari Pinjaman Luar Negeri

Realisasi belanja pemerintah pusat di Jawa Barat yang dibiayai Pinjaman luar negeri turun dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 belanja pemerintah pusat di Jawa Barat dari Pinjaman luar negeri mencapai Rp40,13 miliar meningkat dibandingkan dengan triwulan III-2009 yang sebesar Rp146,81 miliar (Grafik 4.3).

Grafik 4.3. Perkembangan Belanja Pemerintah Pusat dari Pinjaman Luar Negeri



Sumber: KBI Bandung

Tabel 4.6 Perkembangan Belanja yang Berasal dari Pinjaman Luar Negeri

No.	Jenis	Triwulan III-2009	Triwulan IV-2009	Sumber Dana
1	Penelitian serta Partisipasi Pembangunan Irigrasi	3.558.978.106	26.289.028.334,00	International bank for Reconstruction and Development (IBRD)
2	Pendidikan	6.204.090.464	26.967.541.668,00	IBRD, BOS
3	Pemberdayaan Petani Miskin & Masyarakat Pedesaan serta Pengembangan Lingkungan Sekitar	30.365.455.538	93.546.016.935,00	IBRD, Asian Development Bank (ADB)
Jumlah		40.128.524.108	146.802.586.937,00	

Keterangan: IBRD = *International Bank for Reconstruction*; ADB = *Asian Development Bank*
 Sumber: Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) KBI Bandung

Meskipun pertumbuhan relatif melambat tetapi jumlah realisasi belanja program yang dibiayai Pinjaman luar negeri meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan IV-2009 pemerintah daerah paling besar merealisasikan belanja program pemberdayaan petani miskin &

masyarakat pedesaan serta pengembangan lingkungan sekitar. Program tersebut dibiayai oleh *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD) yakni lembaga yang menangani pembangunan di negara berkembang. Sementara, *Asian Development Bank* (ADB) masih melanjutkan pemberian pembiayaan seperti tahun sebelumnya (Tabel 4.6).

2.2. BELANJA APBD PROVINSI JAWA BARAT

Realisasi belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga triwulan IV-2009 diperkirakan sebesar 80% hingga 90% dari total anggaran. Pemerintah daerah meningkatkan realisasi anggaran pada triwulan IV-2009 terutama untuk belanja infrastruktur dan program pendidikan sehingga terjadi kenaikan realisasi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Namun demikian, tingkat realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang diperkirakan sebesar 93%.

Hambatan realisasi anggaran terutama disebabkan adanya perubahan kebijakan pemerintah pusat dalam penyaluran Bantuan Operasional Sekolah serta implementasi program manajemen pelayanan pendidikan. Di sisi lain, realisasi belanja untuk program infrastruktur berupa pembangunan serta pemeliharaan jalan dan jembatan telah mencapai lebih dari 90% baik secara fisik maupun keuangan (Tabel IV.7).

Tabel 4.7. Realisasi Belanja Langsung Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Jenis Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp Miliar)	Realisasi (%)	
			Keuangan	Fisik
Pembangunan Jalan dan Jembatan	11	347,74	81,25	93,03
Manajemen Pelayanan Pendidikan	17	322,38	73,19	87,76
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	8	308,09	93,6	99,87
Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur	100	242,46	75,7	86,53
Pelayanan Administrasi Perkantoran	150	212,73	86,64	92,85
Jumlah Keseluruhan	1537	3117,81	78,46	91,44

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

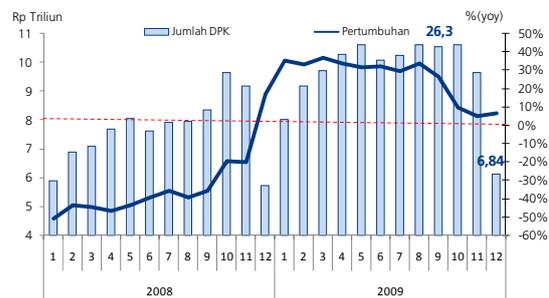
Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat telah merealisasikan anggaran sebesar Rp619 miliar dari Rp706 miliar yang dialokasikan pada tahun 2009. Jenis belanja yang memperoleh alokasi terbesar adalah Belanja Modal, yakni sebesar Rp342 miliar. Realisasi belanja pegawai serta barang dan jasa telah mencapai 93% hingga 97% pada akhir tahun 2009. Namun demikian, tingkat realisasi belanja modal relatif terbatas, yakni pada kisaran 80% hingga 82%.

Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Jawa Barat dijadikan percontohan bagi daerah lain. Dari 25,75% jumlah proyek yang dilelang menggunakan LPSE, sebanyak 79,10% telah terealisasi dengan baik. Angka ini merupakan pencapaian tertinggi dibandingkan dengan daerah lainnya. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat akan terus meningkatkan penggunaan LPSE dengan meningkatkan pemberian informasi kepada peserta pengguna LPSE.

3. SIMPANAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI BANK UMUM

Saldo rekening milik Pemerintah Daerah (Pemda) di bank umum turun dari Rp 26,3 triliun pada akhir triwulan III-2009 menjadi Rp6,84 triliun pada akhir triwulan IV-2009 (Grafik 4.4). Penurunan saldo rekening pemerintah daerah menunjukkan realisasi anggaran yang naik signifikan pada triwulan IV-2009. Khusus pada bulan Desember 2009, rekening milik pemerintah daerah ditarik dengan jumlah yang cukup besar.

Grafik 4.4. Perkembangan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat



Sumber: LBU, diolah

Pada triwulan IV-2009, realisasi belanja pemerintah daerah meningkat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari perlambatan pertumbuhan DPK dari 26,29% (yoy) pada triwulan III-2009 menjadi 6,84% pada akhir triwulan IV-2009. Perlambatan pertumbuhan DPK disumbangkan oleh laju pertumbuhan giro dan tabungan (Tabel 4.8). Hal ini mengindikasikan adanya percepatan realisasi belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Tabel 4.8 Perkembangan Pertumbuhan Simpanan Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Jenis Rekening (yoy, %)

	2008				2009			
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Giro	16,25	-6,41	-2,42	17,38	17,60	38,05	29,37	15,10
Tabungan	-48,93	-8,38	-12,29	18,14	141,87	19,70	18,24	-21,21
Deposito	115,51	-82,71	-9,27	-35,73	-57,67	-28,21	0,33	87,40
DPK	-44,31	-39,21	-35,65	16,91	36,84	32,37	26,29	6,84

Sumber: LBU, diolah

Hampir seluruh pemerintah daerah mengalami perlambatan pertumbuhan *outstanding simpanannya*. Pertumbuhan simpanan milik pemerintah daerah yang berlokasi di Kota Bandung (Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kota Bandung) melambat cukup drastis, yakni dari tumbuh 52,35% pada triwulan III-2009 menjadi -16,38% pada triwulan IV-2009 (Tabel 4.9). Terdapat beberapa kabupaten/kota lainnya mengalami peningkatan pertumbuhan saldo rekening. Hal ini disebabkan peningkatan alokasi dana perimbangan kepada pemerintah daerah tersebut dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 4.9 Perkembangan Pertumbuhan Rekening Milik Pemerintah Daerah di Jawa Barat Menurut Lokasi Rekening (yoy, %)

Pemerintah Daerah	2008				2009			
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV
Kota Bandung	-59,78	-59,09	23,09	33,17	41,63	63,66	52,35	-16,38
Kab. Bandung	-20,31	2,23	-3,14	91,66	21,15	45,28	-0,60	93,99
Kab. Bekasi	-64,89	24,54	-68,19	86,56	429,26	15,92	7,97	-28,37
Kota Bekasi	-84,95	39,54	-39,11	74,27	1035,36	10,42	-11,27	-37,43
Kota Tasikmalaya	8,98	-30,93	-21,63	-14,89	1,04	24,66	0,68	6,82
Keseluruhan	-44,31	-39,21	-35,65	16,91	36,84	32,37	26,29	27,29

Keterangan: *) Pemerintah daerah dengan jumlah *outstanding* 5 terbesar, **) Termasuk di dalamnya rekening milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kota Bandung, ***) Termasuk didalamnya Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat

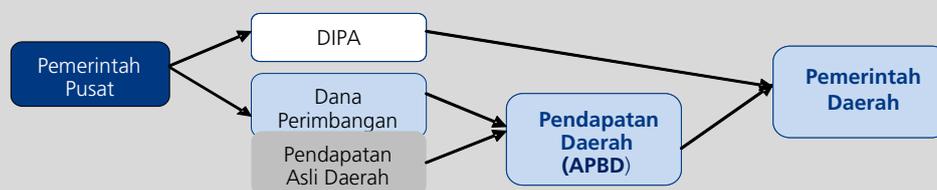
Sumber: LBU, diolah

BOKS 4

TRANSFER KEUANGAN DAERAH DI JAWA BARAT TAHUN 2010

Pemerintah daerah memperoleh sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun penerimaan pajak langsung dari masyarakat (Grafik 1). Pada tahun 2010 pemerintah daerah di Jawa Barat menerima dana dari APBN sebesar Rp45,44 triliun. Dana tersebut terdiri dari alokasi anggaran program pemerintah pusat di Jawa Barat dalam bentuk Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebesar Rp25,48 triliun serta dana transfer/perimbangan sebesar Rp19,96 triliun. Sementara, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan lain dari berbagai jenis pajak tingkat provinsi/kota/kabupaten yang termasuk dalam klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Grafik 1. Sumber Penerimaan Pemerintah Daerah di Jawa Barat



Alokasi DIPA di Jawa Barat

Pemerintah daerah di Jawa Barat memperoleh alokasi DIPA lebih tinggi dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp23 triliun menjadi Rp25,48 triliun atau naik 6,52%. Meskipun demikian, kenaikan DIPA di Jawa Barat lebih rendah dibandingkan dengan alokasi DIPA nasional yang tumbuh 9,82%. Pada tahun 2010 pemerintah pusat menambahkan jenis DIPA baru, yakni kewenangan/urusan bersama. Kewenangan bersama diterbitkan khusus untuk membiayai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) pada tahun 2010. Kenaikan DIPA terjadi untuk di instansi vertikal yang berada di Jawa Barat, sementara alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 1. DIPA Jawa Barat Tahun 2010

Jenis Belanja	Anggaran (Rp Miliar)		Pertumbuhan (%)
	2009	2010	
Dekonsentrasi	4.680	4.067	-13,10%
Tugas Pembantuan	1.144	442	-61,36%
Kewenangan Bersama	N/A	932	N/A
Instansi Vertikal	18.100	20.043	10,73%
Jumlah	23.924	25.484	6,52%

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

Penurunan dana dekonsentrasi terutama karena alokasi dana dekonsentrasi Dinas Pendidikan turun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari Rp4,51 triliun menjadi Rp3,85 triliun. Namun demikian, beberapa dinas/instansi di Provinsi Jawa Barat memperoleh peningkatan alokasi dana dekonsentrasi yang cukup signifikan, yakni Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Badan Ketahanan Pangan Daerah (BKPD). Sementara, penurunan dana tugas pembantuan terutama disebabkan oleh dana yang diterima Kabupaten Garut turun dari Rp117,34 miliar menjadi hanya Rp17,06 miliar. Sementara Provinsi Jawa Barat juga menerima dana dekonsentrasi yang terbesar ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, Sosial, Tenaga

Kerja dan Transmigrasi, Bina Marga, dan Pengelolaan Sumber Daya Air, serta BKPD, naik dari Rp204,89 miliar menjadi Rp215,36 miliar.

Khusus untuk alokasi dana instansi vertikal, 5 kementerian/lembaga/satker penerima alokasi dana tertinggi adalah Departemen Agama, Departemen Pertahanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan serta Kepolisian Negara, yang masing-masing memperoleh anggaran lebih dari Rp2 triliun. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja yang memperoleh dana instansi vertikal di Jawa Barat sebanyak 40 buah dengan alokasi DIPA sebesar 1.160 unit.

Alokasi Dana Perimbangan di Jawa Barat

Dari Rp19,96 triliun dana perimbangan yang dialokasikan di Jawa Barat, sebesar Rp18,22 triliun merupakan dana alokasi umum (DAU) dan Rp1,74 triliun adalah dana alokasi khusus (DAK). Kabupaten Bogor memperoleh dana perimbangan baik dalam bentuk DAU maupun DAK terbesar dibandingkan dengan daerah lain. DAK Kabupaten Bogor terutama digunakan untuk bidang Pendidikan.

Tabel 2. Pemerintah Daerah Penerima Dana Perimbangan Terbesar di Jawa Barat Tahun 2010

Jenis Belanja	Dana Perimbangan (Rp Miliar)	
	DAU	DAK
Kabupaten Bogor	1.115	143,081
Provinsi Jawa Barat	1.086	38,57
Kabupaten Bandung	1.086	118,91
Kabupaten Garut	1.031	119,55
Jumlah	18.217	1.740

Sumber: BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Gubernur Provinsi Jawa Barat dalam Pengantar Nota Keuangan perihal RAPBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 menyampaikan tema pembangunan periode 2008-2013, yakni "Mewujudkan Satu Kesatuan Pembangunan Jawa Barat yang Bermutu dan Akuntabel Dalam Rangka Pencapaian Jawa Barat yang Mandiri, Dinamis, dan Sejahtera". Khusus untuk tahun 2010, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan isu strategis, sebagai berikut : (i) penanggulangan penduduk miskin dan pengangguran; (ii) kinerja pemerintah daerah dan desa; (iii) ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah; (iv) intensitas bencana alam, pencemaran, dan kerusakan lingkungan; (v) mutu dan kesempatan pendidikan; (vi) ketersediaan dan diversifikasi energi; (vii) ketahanan pangan; (viii) optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi; (ix) intensitas dan penyebaran penyakit; (x) perilaku hidup bersih dan sehat; (xi) investasi daerah dan pembiayaan UMKM; (xii) pengarusutamaan jender; (xiii) ketersediaan lapangan pekerjaan; serta, (xiv) peran budaya dan kearifan lokal dan kepariwisataan dalam pembangunan. Selain itu, Pemprov juga akan memfokuskan anggaran sebesar 20% untuk sektor pendidikan dan Rp1 triliun untuk infrastruktur jalan.

Tabel 3. R-APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2010

Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp Miliar)	Jenis Belanja/Pembiayaan	Jumlah (Rp Miliar)
I. PAD	5.147	I. Belanja Tidak Langsung	6.123
a. PKB	1.919	a. Pegawai	1.929
b. BBNKB:	1.936	b. Subsidi	16,05
c. PBBKB	1,2	c. Hibah	77,88
d. PPABT	91,2	d. Bantuan Sosial	382,78
e. Retribusi	29,17	e. Bagi Hasil	2.072
f. Hasil BUMD	204,17	f. Bantuan Keuangan	1.569
g. Lain-lain	242,32	g. Tak terduga	75
II. Dana Perimbangan	2.105	II. Belanja Langsung	2.903
a. DAU	1.086		
b. DAK	38,57	Pembiayaan	1.290
c. DBH	980,66	SILPA	1.290
III. Lain-lain	8,29	Pengeluaran	0.01
Jumlah	7.260	Jumlah	9.026

Keterangan: Data RAPBD belum melalui evaluasi Departemen Dalam Negeri, PBBKB: Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; BBNKB: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; PKB: Pajak Kendaraan Bermotor; PPABT: Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

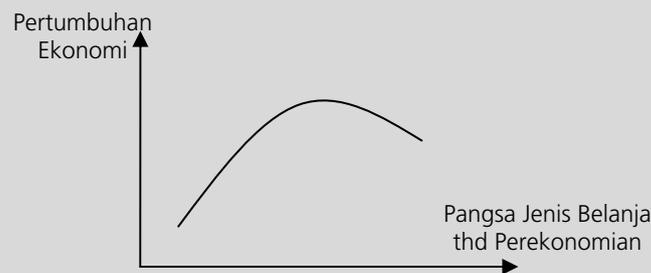
Sumber: Pemerintah Provinsi Jawa Barat

BOKS 5

RISET PERAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI JAWA BARAT

Sejak tahun 2001, desentralisasi telah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk menerima dana yang relatif besar serta melakukan pengelolaan keuangannya secara independen. Desentralisasi tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan (*drawbacks*). Berdasarkan salah satu riset mengenai keuangan daerah, desentralisasi fiskal berpotensi menimbulkan risiko perubahan perilaku pengendalian fiskal, yakni jika pemerintah daerah mengalokasikan dananya kepada kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, spekulatif, dan konsumtif yang dapat menimbulkan *idle money* maka akan berdampak pada pengendalian moneter (Ismal, 2002). Selain itu, secara umum kebijakan desentralisasi fiskal di Indonesia belum mampu mengurangi ketimpangan antar daerah (Brodjonegoro, 2001), (Sinaga & Hendranata, 2002), dan (Waluyo, 2007)². Selain itu, dalam pengalokasian belanja pemerintah perlu mempertimbangkan pengaruh *diminishing return*, yakni terdapat sebuah titik dimana alokasi belanja pada sektor tertentu tidak lagi optimal (Grafik 1).

Grafik 1. Keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Pemerintah



Sumber: Solow, R. 1956. *A Contribution to the Theory of Economic Growth*. Quarterly Journal of Economics, 70, 65-94

Beberapa riset mengenai keuangan daerah menyimpulkan bahwa perlu kajian lebih lanjut atas efektivitas belanja pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, riset-riset tersebut memiliki ruang lingkup nasional dan belum ada riset dengan ruang lingkup Provinsi Jawa Barat. Padahal, pemerintah daerah di Jawa Barat merupakan salah satu pengelola keuangan daerah terbesar di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, KBI Bandung bekerja sama dengan Laboratorium Penelitian, Pengkajian Ekonomi dan Pengabdian Masyarakat (LP3E) Universitas Padjajaran melakukan riset "Peran Belanja Pemerintah Daerah terhadap Perekonomian Jawa Barat" yang diharapkan dapat memberikan gambaran atas efektivitas belanja daerah (belanja pegawai, barang dan jasa, serta barang modal) serta belanja di beberapa sektor ekonomi.

² Brodjonegoro, B. (2001). *The Impact of Fiscal Decentralization Process to The Indonesian Regional Economies: A Simultaneous Approach*. Vanersborg, Sweden: Udavella Symposium, Regional Economies in Transitions.

Ismal, R. (2002). Apakah Penerapan Otonomi Daerah Khususnya Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) dan Non-PKPD Selama Tahun 2001 telah Memberikan Dampak kepada Pengendalian Moneter. Jakarta: Buletin Ekonomi dan Moneter Vol.5 No.2.

Sinaga, B. M., & Hendranata, A. (2002). Dampak Alokasi Anggaran Pengeluaran Pembangunan terhadap Perekonomian Indonesia: Suatu Analisis Simulasi Kebijakan. Jakarta: Universitas Indonesia.

Waluyo, J. (2007). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Indonesia. Fiscal Decentralization.

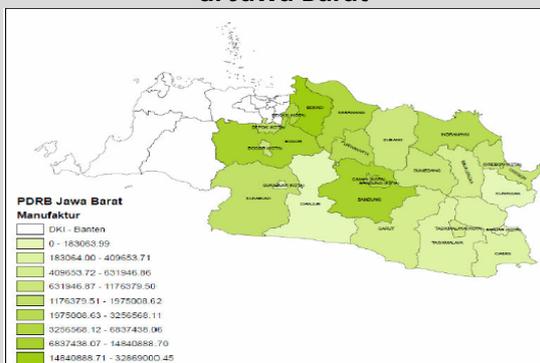
Tujuan riset dimaksud adalah (i) mengetahui peran belanja daerah menurut jenisnya (pegawai, barang dan jasa, serta modal) terhadap pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten di Jawa Barat; serta

(ii) mengetahui besar pengaruh belanja daerah secara sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi Kota/Kabupaten di Jawa Barat. Riset dimaksud merupakan langkah awal untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah daerah di Jawa Barat mengingat terdapat keterbatasan dalam pengumpulan data. Data yang digunakan riset ini adalah data APBD Pemerintah Provinsi serta 25 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat³ sejak tahun 2005 hingga 2007.

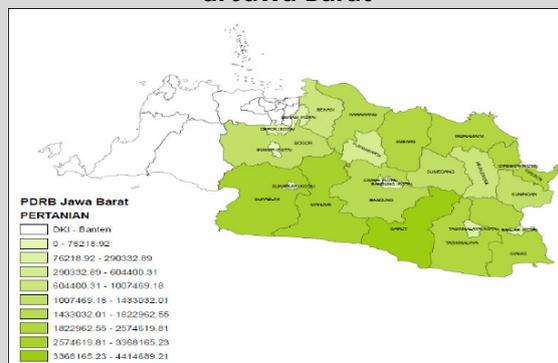
Perekonomian dan Belanja Pemerintah Daerah di Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat memiliki 3 buah sektor unggulan, yakni industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, serta pertanian. Industri pengolahan di Jawa Barat terkonsentrasi pada daerah sekitar DKI Jakarta dan Bandung, sementara sentra pertanian tersebar di pantai utara dan selatan Jawa Barat.

Grafik 2. Sebaran PDRB Industri Pengolahan di Jawa Barat



Grafik 3. Sebaran PDRB Pertanian di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat

Dari aspek belanja pemerintah daerah, belanja Pemerintah Kabupaten Bandung, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor adalah yang terbesar di Jawa Barat. Belanja pegawai di kabupaten cukup tinggi, yakni lebih dari Rp200 miliar, sementara di tingkat kota pada umumnya lebih rendah. Hal ini diduga disebabkan oleh relatif luasnya wilayah kabupaten dibandingkan dengan kota. Namun demikian, pangsa belanja pegawai dari tahun ke tahun menunjukkan tren penurunan. Untuk belanja modal, daerah di sekitar DKI Jakarta seperti Kabupaten Bogor, Bekasi, dan Kota Bekasi memiliki belanja modal tertinggi. Di lain pihak, Kabupaten Purwakarta, Sukabumi, dan Sumedang memiliki belanja modal yang relatif kecil.

Model Jenis Belanja

Model jenis belanja menggunakan regresi panel *random effect* untuk mengetahui pengaruh *initial* jenis belanja terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode *random effect* digunakan untuk mengetahui kapasitas awal suatu daerah dibandingkan dengan lainnya. Persamaan yang digunakan dalam model adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Realisasi APBD Pemerintah Daerah di Jawa Barat Tahun 2007

No	Kab/Kota	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa	Belanja Modal	Total Belanja
1	Propinsi Jawa Barat	975,397.76	820,734.44	360,690.91	5,341,625.97
2	Kab. Bogor	703,978.41	256,586.15	340,917.89	1,482,581.30
3	Kab. Sukabumi	504,359.04	312,546.52	188,217.81	1,062,715.05
4	Kab. Cianjur	483,474.66	242,351.42	201,611.09	1,051,040.07
5	Kab. Bandung	1,011,482.30	191,372.40	370,894.04	1,799,975.72
6	Kab. Garut	653,319.42	148,340.36	218,555.52	1,185,778.46
7	Kab. Tasikmalaya	512,764.80	84,185.29	227,324.56	939,716.89
8	Kab. Ciamis	565,569.68	111,224.43	308,616.19	1,153,383.00
9	Kab. Kuningan	398,983.60	139,875.77	111,643.59	744,820.42
10	Kab. Cirebon	543,851.50	206,244.25	158,254.78	1,009,398.56
11	Kab. Majalengka	410,656.23	101,095.97	192,072.84	765,425.31
12	Kab. Sumedang	447,977.50	117,598.88	99,994.03	782,010.63
13	Kab. Indramayu	495,837.75	127,692.41	219,649.95	949,785.08
14	Kab. Subang	456,720.06	139,203.92	193,909.92	895,676.07
15	Kab. Purwakarta	301,833.85	120,461.15	78,309.82	570,061.28
16	Kab. Karawang	585,236.32	193,075.72	171,099.72	1,224,128.96
17	Kab. Bekasi	426,982.36	195,982.20	416,359.18	1,140,876.44
18	Kota Bogor	277,795.17	140,205.77	113,016.11	582,735.39
19	Kota Sukabumi	193,958.47	92,115.03	68,837.29	395,611.80
20	Kota Bandung	830,727.21	214,233.01	232,007.68	1,552,886.61
21	Kota Cirebon	224,230.78	118,772.51	89,749.74	488,037.89
22	Kota Bekasi	463,314.52	159,699.61	308,046.56	1,028,289.19
23	Kota Depok	315,857.16	120,044.88	170,022.94	719,181.87
24	Kota Cimahi	208,020.88	97,620.02	100,878.00	439,563.98
25	Kota Tasikmalaya	300,823.84	84,022.92	105,770.33	554,999.13
26	Kota Banjar	108,659.13	49,156.75	152,937.18	351,790.97

Sumber: Perda Pertanggungjawaban tingkat Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota di Jawa Barat

$$\log(Y^*) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(\text{jenis_belanja}) + \alpha_2 \text{AMH} + \alpha_3 \log(\text{Investasi}) + \alpha_4 \left(\frac{1}{\text{AHH}}\right) + \alpha_5 (Y^*_{t-1}) + \varepsilon$$

Keterangan: Y^* : Pendapatan Domestik Regional Bruto per kapita

Jenis_belanja : belanja pegawai, barang dan jasa, serta modal

AMH : Angka Melek Huruf

AHH : Angka Harapan Hidup

Investasi : Realisasi investasi dari investor asing dan dalam negeri

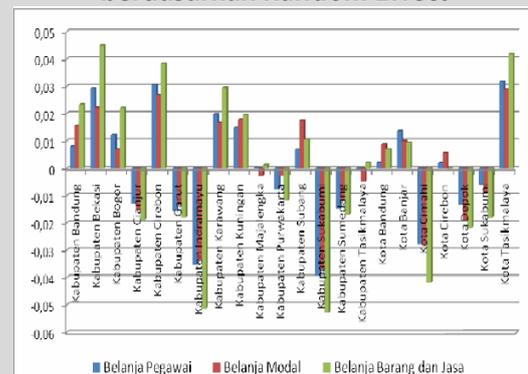
Berdasarkan hasil regresi, hanya belanja modal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan paling baik menjelaskan perkembangan pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pengaruh baik belanja pegawai maupun barang dan jasa belum terbukti signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Tabel 2). Oleh karena itu, jika secara umum pemerintah daerah menaikkan belanja modal sebesar 0,02% maka PDRB perkapita akan naik sebesar 1%.

Tabel 2. Hasil Regresi Panel Random Effect

Variabel	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang dan Jasa
Konstanta	-2,77 *** (-3,15)	-2,79 ** (-2,23)	-2,26 ** (-2,18)
Log(Belanja)	0,02 ** (2,52)	0,03 (1,09)	0,01 (0,72)
Log(Investasi)	0,01 (1,56)	0,01 (1,67)	0,01 (1,56)
AMH	0,014 *** (6,23)	0,01 *** (4,74)	0,01 *** (4,92)
1/AHH	43,53 * (1,79)	37,23 (1,17)	37,05 (1,34)
PDRB perkapita (-1)	-0,01 ** (-2,01)	-0,01 ** (-2,47)	-0,01 ** (-2,39)
R ²	0,33	0,29	0,27
F-Stat	4,37 ***	3,84 ***	3,34 ***
D-W Stat	1,71	1,71	1,75

Daerah-daerah yang memiliki *intercept* negatif adalah (atau nilai awal pertumbuhan ekonomi) adalah Kab. Cianjur, Garut, Indramayu, Purwakarta, Sukabumi, dan Sumedang serta Kota Cimahi, Depok, dan Sukabumi. Nilai *intercept* yang negatif berarti bahwa secara rata-rata nilai awal pertumbuhan ekonomi daerah lebih rendah daripada rata-rata keseluruhan daerah di Jawa Barat. Hal ini diduga disebabkan daerah tersebut tidak memiliki sektor ekonomi yang dominan dibandingkan dengan daerah lainnya.

Grafik 4. Intercept Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan Random Effect



Model Belanja Sektoral

Model belanja sektoral menggunakan regresi panel *fixed effect* untuk mengetahui pengaruh perubahan belanja sektoral terhadap pertumbuhan ekonomi secara sektoral. Persamaan yang digunakan dalam model adalah sebagai berikut :

$$\log(Y_i) = \alpha_0 + \alpha_1 \log(\text{Belanja}_i) + \sum_{j=1}^{25} \alpha_j d_j + \sum_{k=1}^{25} \alpha_k d_k \log(\text{Belanja}_i) + e$$

Keterangan: Y_i : PDRB sektor i

Belanja_i : Belanja pemerintah daerah untuk sektor i

$d_{j,k}$: dummy j atau k Kab./kota

Riset ini mengklasifikasikan belanja ke dalam 5 sektor, yakni (i) pertanian, (ii) pertambangan, industri dan perdagangan, (iii) konstruksi, (iv) publik (listrik, gas, air bersih, transportasi, dan komunikasi), serta (v) jasa lainnya. Setelah hasil regresi panel sektoral dijumlahkan dengan koefisien *dummy* diperoleh elastisitas belanja sektoral masing-masing kota/Kab. terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Regresi Panel Sektoral dengan *Fixed Effect*

Koefisien	Pertanian	Pertambangan, Industri, & Perdagangan	Konstruksi	Publik	Jasa Lainnya
Log (Belanja Sektoral)	-0,06	0,33	0,06	-0,07	0,09
t-stat	-2,6***	0,52	2,61***	-4,87***	5,67***
R-squared	0,99	0,99	0,99	0,99	0,99
DW Statistics	2,67	2,69	2,97	3,02	3,75
F-Statistik	1703	128	97	434	133

Hasil dari model tersebut adalah sebagai berikut :

- Pertanian : Belanja seluruh pemerintah kota di sektor pertanian berdampak negatif terhadap nilai tambah (PDRB) sektor pertanian, sebaliknya belanja pemerintah kabupaten berdampak positif. Oleh karena itu, pemerintah kota sebaiknya perlu mengevaluasi jumlah alokasi anggaran sektor pertanian
- Pertambangan, Industri, dan Perdagangan : Hanya elastisitas belanja Kota Tasikmalaya yang berpengaruh signifikan. Sementara, belanja kabupaten/kota lainnya belum dapat dibuktikan signifikan mempengaruhi PDRB. Hal ini mungkin akibat dari penggabungan 3 sektor yang memiliki karakteristik berbeda.
- Konstruksi : tingkat elastisitas Kab. Sukabumi, Kota Bogor, dan Kab. Garut sangat tinggi (lebih dari 1%). Namun demikian, hanya koefisien elastisitas Kota Tasikmalaya yang negatif. Hasil ini diduga akibat belanja Pemerintah Kota Tasikmalaya di sektor konstruksi masih relatif terbatas.
- Publik : Beberapa daerah yang memiliki pembangkit listrik dari panas bumi seperti Kab. Tasikmalaya, Kuningan, Majalengka, dan Kota Sukabumi memiliki elastisitas negatif yang diduga karena belanja swasta lebih berpengaruh dibandingkan belanja pemerintah.
- Jasa Lainnya : Hanya Kab. Garut memiliki elastisitas negatif yang diduga karena masih besarnya pangsa belanja pegawai dibandingkan keseluruhan.

BAB 5

PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional baik tunai maupun non tunai merupakan salah satu tugas Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan undang-undang. Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, tepat waktu dan dalam kondisi layak edar (*clean money policy*). Sementara itu kebijakan di bidang instrumen pembayaran non tunai tetap diarahkan untuk menyediakan sistem pembayaran yang efektif, efisien, aman dan handal dengan tetap memperhatikan aspek perlindungan konsumen.

Pada triwulan IV-2009, transaksi sistem pembayaran di Jawa Barat mengalami perkembangan yang bervariasi. Jumlah aliran uang masuk (*inflow*) ke KBI di wilayah Jawa Barat, secara triwulanan mengalami peningkatan, namun aliran uang keluar (*outflow*) mengalami penurunan. Sementara itu, nilai transaksi pembayaran melalui kliring di wilayah Jawa Barat mengalami peningkatan, namun secara volume juga terjadi penurunan. Di sisi lain, transaksi pembayaran melalui Bank Indonesia - *Real Time Gross Settlement* (BI-RTGS), untuk wilayah Jawa Barat, secara nominal mengalami penurunan namun naik secara volume dibandingkan triwulan sebelumnya.

1. PENGEDARAN UANG KARTAL

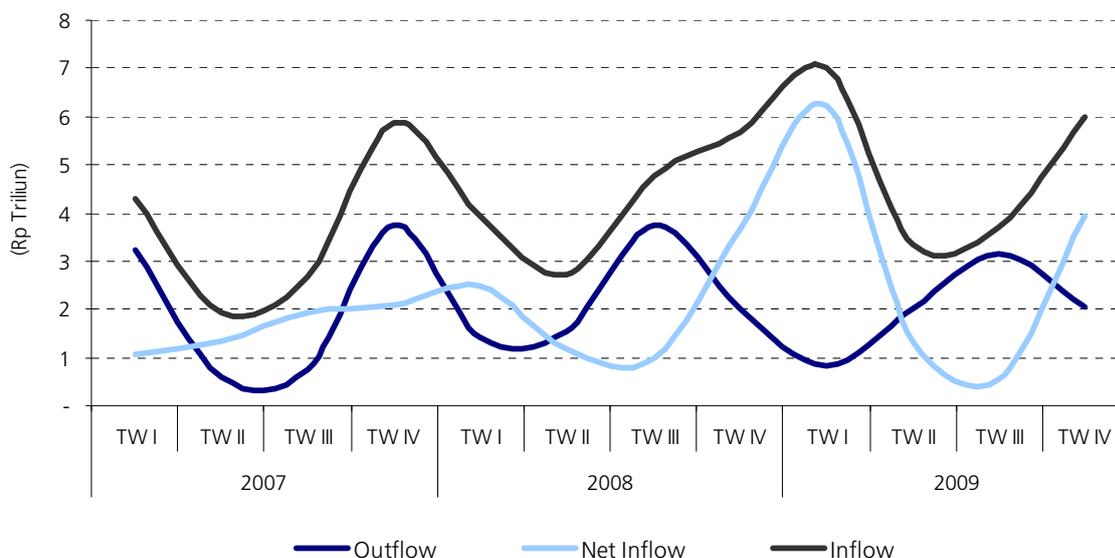
1.1. Aliran Uang Kartal Masuk/Keluar (*Inflow/Outflow*)

Perkembangan aliran uang kartal pada triwulan IV-2009 di wilayah kerja KBI Bandung dan KBI Tasikmalaya mengalami *net inflow*, sementara KBI Cirebon mengalami *net inflow*. Secara gabungan *Inflow* di KBI wilayah Jawa Barat naik sebesar 61,81% (qtq) atau 5,72% (yoy) menjadi Rp6 triliun, sementara *outflow* di KBI wilayah Jawa Barat turun sebesar 34,71% (qtq) namun naik secara tahunan 1,20% (yoy) menjadi Rp2,05 triliun (Grafik 5.1). Peningkatan *inflow* pada triwulan laporan merupakan siklus yang biasa terjadi setelah pada triwulan sebelumnya terjadi *outflow* yang cukup tinggi.

Peningkatan *inflow* di KBI wilayah Jawa Barat pada triwulan IV-2009 disebabkan oleh meningkatnya *inflow* di KBI Bandung sebesar 108,30% (qtq) menjadi Rp5,27 triliun dan KBI Tasikmalaya sebesar 10,53% menjadi Rp0,21 triliun; Sedangkan di KBI Cirebon *inflow* turun 47,17% menjadi Rp0,52 triliun. Penurunan *outflow* di KBI wilayah Jawa Barat pada triwulan IV-2009 akibat dari penurunan *outflow* di KBI Bandung sebesar 31,79% (qtq) menjadi Rp1,87 triliun; KBI Tasikmalaya 66,67% (qtq) menjadi Rp0,01 triliun; dan KBI Cirebon turun sebesar 53,78% (qtq) menjadi Rp0,17 triliun.

Pada triwulan IV-2009, kegiatan transaksi sistem pembayaran tunai di KBI Bandung, KBI Cirebon dan KBI Tasikmalaya mengalami peningkatan. KBI Bandung mengalami *net inflow* sebesar Rp3,40 triliun. Sedangkan KBI Cirebon dan KBI Tasikmalaya mengalami *net inflow*, masing-masing adalah sebesar Rp0,35 triliun dan Rp0,20 triliun.

Grafik 5.1. Perkembangan *Inflow* dan *Outflow* Uang Kartal Di Jawa Barat



Sumber: KBI Bandung, KBI Tasikmalaya & KBI Cirebon

Selama triwulan IV-2009, uang kertas yang keluar dari KBI Bandung mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (Tabel 5.1). Secara nominal, uang kertas yang keluar dari KBI Bandung selama triwulan IV-2009 adalah sebesar Rp1,86 triliun atau turun 33,63% (qtq), sedangkan uang logam yang keluar Rp0,777 miliar atau turun 63,24% (qtq). Sementara itu, jumlah bilyet uang kertas yang keluar mencapai 32,65 juta bilyet atau turun 62,95% (qtq), namun demikian uang logam yang keluar naik sebesar 10,59% (qtq) menjadi 6,11 juta keping.

Tabel 5.1. Perkembangan *Outflow* Uang Kertas dan Uang Logam melalui KBI Bandung

Jenis Pecahan	Tw. III-2009		Tw. IV-2009		Pertumbuhan (qtq)	
	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/Keping (Juta)	Nominal (Rp Juta)	Bilyet/Keping (Juta)	Nominal	Bilyet/Keping
Uang Kertas						
100,000	1,365,332.90	13.65	965,821.50	9.66	-29.26%	-29.26%
50,000	1,106,006.45	22.12	863,972.45	17.28	-21.88%	-21.88%
20,000	157,343.86	7.87	12,111.32	0.61	-92.30%	-92.30%
10,000	66,233.70	6.62	11,479.57	1.15	-82.67%	-82.67%
5,000	74,238.63	14.85	7,828.24	1.57	-89.46%	-89.46%
2,000	35,730.59	17.87	3,104.31	1.55	n/a	n/a
1,000	5,145.47	5.15	839.17	0.84	-83.69%	-83.69%
Total	2,810,031.60	88.12	1,865,156.56	32.65	-33.63%	-62.95%
Uang Logam						
1,000	286.01	0.29	-	-	-100.00%	-100.00%
500	1,605.01	3.21	24.77	0.05	-98.46%	-98.46%
200	54.09	0.27	458.00	2.29	746.74%	746.74%
100	160.07	1.60	213.29	2.13	33.25%	33.25%
50	7.10	0.14	79.05	1.58	1013.38%	1013.38%
25	0.48	0.02	1.51	0.06	213.61%	213.61%
Total	2,112.76	5.53	776.62	6.11	-63.24%	10.59%

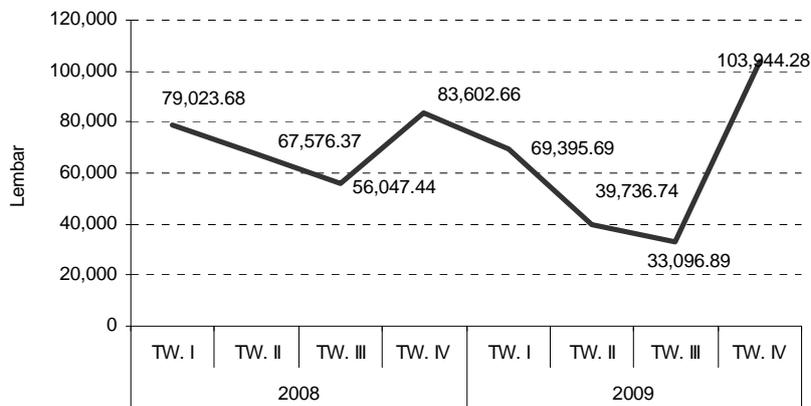
Sumber: KBI Bandung

1.2. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Bank Indonesia secara berkesinambungan melakukan pemusnahan atau kegiatan pemberian tanda tidak berharga (PTTB) terhadap uang kartal yang sudah tidak layak edar (lusuh/rusak) sebagai upaya untuk memelihara kualitas uang kartal yang diedarkan di masyarakat (*clean money policy*).

Selama triwulan IV-2009, KBI Bandung melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 103,94 juta lembar atau naik 214,06% (qtq) (Grafik 5.2). Berdasarkan jumlah lembar yang dimusnahkan, yang paling banyak adalah pecahan Rp1.000, Rp50.000, Rp5.000, dan Rp10.000 masing-masing sebesar 35,53%, 24,61%, 17,65%, dan 8,55%. Sementara itu, KBI Tasikmalaya melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 9,25 juta lembar atau naik 110,09% (qtq), dan KBI Cirebon melakukan pemusnahan uang kertas sebanyak 396,14 juta lembar atau naik 180,49% (qtq).

Grafik 5.2. Perkembangan PTTB Kantor Bank Indonesia Bandung



Sumber: KBI Bandung

1.3. Uang Palsu

Selama triwulan IV-2009, KBI Bandung telah menemukan uang rupiah palsu di wilayah kerjanya sebanyak 2.245 lembar atau turun 535 lembar dibandingkan triwulan sebelumnya. Pecahan uang palsu yang paling banyak ditemukan selama triwulan IV-2009, adalah uang kertas pecahan Rp50.000 yaitu sebanyak 46,19% dari total lembar uang palsu yang ditemukan. Meskipun demikian, KBI Bandung terus berupaya menekan perkembangan peredaran uang palsu, diantaranya melalui sosialisasi ciri-ciri keaslian uang rupiah kepada semua lapisan masyarakat, menyediakan sarana informasi *hotline service*, serta iklan layanan masyarakat.

2. SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI

2.1 Kliring lokal

Pada triwulan IV-2009, transaksi sistem pembayaran non tunai melalui kliring di wilayah Jawa Barat, secara volume turun namun secara nominal mengalami peningkatan dibandingkan

triwulan sebelumnya. Rata-rata volume transaksi kliring per bulan pada triwulan IV-2009, adalah sebanyak 481.440 warkat, turun sebesar 0,55% (qtq) namun secara tahunan naik 0,35% (yoy). Rata-rata nominal transaksi kliring per bulan pada triwulan IV-2009 naik 9,96% atau 7,04% (yoy) menjadi Rp11,70 triliun (Tabel 5.2).

Tabel 5.2. Perkembangan Transaksi Kliring Lokal Rata-rata per Bulan di Jawa Barat

Keterangan	2008				2009				Pertumbuhan (%)	
	TW I	TW II	TW III	TW IV	TW I	TW II	TW III	TW IV	qtq	yoy
Nominal (Rp Triliun)	9,60	10,23	11,48	10,93	9,94	10,38	10,64	11,70	9,96	7,04
Volume (Lembar)	506.234	516.866	544.327	479.764	504.311	476.875	484.106	481.440	-0,55	0,35

Sumber: Website BI

2.2 Real Time Gross Settlement (RTGS)

Transaksi RTGS masih mendominasi sistem pembayaran non tunai di Jawa Barat. Hal ini disebabkan BI RTGS mempunyai keunggulan dalam kecepatan penyelesaian transaksi (seketika) dan risiko penyelesaian transaksi yang dapat diperkecil. Perkembangan penyelesaian transaksi RTGS per bulan (dari dan ke Jawa Barat), selama triwulan IV-2009, secara nominal mengalami penurunan, namun secara volume naik dibandingkan triwulan sebelumnya. Selama triwulan IV-2009, rata-rata nominal transaksi RTGS per bulan adalah sebesar Rp49,06 triliun atau turun 7,74% (qtq). Di sisi lain, rata-rata volume transaksi RTGS per bulan adalah sebanyak 79.640 transaksi atau naik 2,56% (qtq) (Tabel 5.3). Total nominal dan volume transaksi RTGS pada triwulan IV-2009, masing-masing sebesar Rp147,18 triliun dan 238.919 transaksi.

Tabel 5.3. Perkembangan Transaksi RTGS di Jawa Barat

Bulan	From		To		From + To	
	Nominal (Triliun Rp)	Volume	Nominal (Triliun Rp)	Volume	Nominal (Triliun Rp)	Volume
Oktober	22.58	30,134	29.15	34,648	51.73	64,782
November	19.92	31,860	26.86	36,797	46.78	68,657
Desember	23.59	38,451	34.20	45,509	57.79	83,960
Rata2 Tw IV-08	22.03	33,482	30.07	38,985	52.10	72,466
Januari	17.58	25,993	24.19	33,736	41.77	59,729
Februari	18.33	29,266	22.77	34,240	41.10	63,506
Maret	18.73	31,282	28.97	34,346	47.70	65,628
Rata2 Tw I-09	18.21	28,847	25.31	34,107	43.52	62,954
April	20.58	31,562	27.91	32,396	48.49	63,958
Mei	16.52	28,440	23.16	36,509	39.68	64,949
Juni	21.33	31,807	29.14	35,819	50.47	67,626
Rata2 Tw II-09	19.48	30,603	26.74	34,908	46.21	65,511
Juli	25.54	36,708	32.92	46,480	58.46	83,188
Agustus	19.18	32,520	30.45	47,482	49.63	80,002
September	20.17	30,164	31.27	39,591	51.44	69,755
Rata2 Tw III-09	21.63	33,130.667	31.55	44,518	53.18	77,648
Oktober	15.72	30,323	25.30	34,783	41.01	65,106
November	17.32	31,508	28.52	41,202	45.84	72,710
Desember	22.63	42,739	37.70	58,364	60.33	101,103
Rata2 Tw IV-09	18.56	34,856.667	30.50	44,783	49.06	79,640
Pertumbuhan	-14.22%	5.21%	-3.30%	0.60%	-7.74%	2.56%

Sumber: www.bi.go.id

BAB 6

PERKEMBANGAN KETENAGAKERJAAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH

Kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat terus bergerak ke arah yang lebih baik, memasuki akhir tahun 2009. Penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka menurun. Peningkatan penyerapan tenaga kerja terjadi karena membaiknya kondisi perekonomian, yang mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi kenaikan permintaan, antara lain dengan menambah jumlah tenaga kerjanya. Dilihat dari lapangan usahanya, peningkatan jumlah pekerja terutama terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan serta sektor industri pengolahan.

Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat juga terindikasikan relatif mengalami perbaikan. Salah satu hal yang mencerminkan perkembangan positif tersebut adalah naiknya penghasilan masyarakat, seperti terlihat dari kenaikan Indeks Penghasilan Saat Ini selama triwulan IV-2009. Kenaikan penghasilan tersebut didukung pula oleh rendah dan stabilnya inflasi Jawa Barat, sehingga mampu menjaga perbaikan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Jawa Barat juga terindikasikan dari kenaikan Nilai Tukar Petani pada triwulan IV-2009 dibandingkan periode-periode sebelumnya.

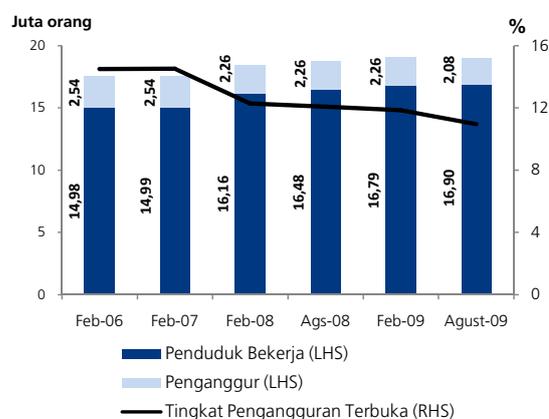
1. KETENAGAKERJAAN

Keadaan Ketenagakerjaan Jawa Barat

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Jawa Barat terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Jawa Barat, per Agustus 2009, angkatan kerja di Jawa Barat tercatat sebanyak 18,98 juta orang, atau bertambah 240.000 orang dibandingkan kondisi pada periode yang sama di tahun 2008. Peningkatan terbesar terjadi di daerah perkotaan, dibandingkan daerah pedesaan.

Meskipun jumlah angkatan kerja bertambah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami penurunan. Pada Agustus 2009, TPT adalah sebesar 10,96%, lebih rendah dibandingkan TPT pada Agustus 2008 yang sebesar 12,08% maupun Februari 2009 yang sebesar 11,85%. Penurunan angka TPT tersebut disebabkan karena jumlah penganggur mengalami penurunan, yaitu dari 2,26 juta orang, baik pada Agustus 2008 maupun Februari 2009, menjadi 2,08 juta orang pada Agustus 2009. Sementara itu, jumlah penduduk yang bekerja mengalami peningkatan, yaitu dari 16,48 juta orang pada Agustus 2008 menjadi 16,90 juta orang pada Agustus 2009. Jumlah tersebut juga lebih tinggi dibandingkan kondisi pada Februari 2009 yang sebanyak 16,79 juta orang. Sementara itu, Peningkatan jumlah penduduk yang bekerja sebagian besar terjadi pada tenaga kerja perempuan.

Grafik 6.1. Perkembangan Ketenagakerjaan di Jawa Barat



Sumber: BPS Jawa Barat

Dibandingkan kondisi pada periode yang sama di tahun 2008, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja berasal dari penyerapan tenaga kerja pada hampir seluruh sektor di Jawa Barat. Peningkatan penduduk yang bekerja terutama terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan dan industri, masing-masing sebesar 5,6% (yoy) dan 4,4% (yoy). Kenaikan tersebut, khususnya pada sektor industri, tidak terlepas dari pulihnya perekonomian domestik, setelah terimbas krisis keuangan global sejak paruh kedua tahun 2008 silam. Pada periode tersebut, banyak kinerja industri yang turun sehingga melakukan rasionalisasi terhadap tenaga kerja yang dimiliki, baik melalui PHK maupun merumahkan tenaga kerjanya. Saat ini, seiring dengan perbaikan perekonomian, penyerapan tenaga kerja kembali terjadi, khususnya pada sektor industri. Hal tersebut dilakukan pelaku usaha, karena mulai dinaikkannya kapasitas produksi, demi memenuhi peningkatan permintaan yang datang.

Tabel 6.1. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sektor		Aug-08	Aug-09
Pertanian	Jumlah (juta)	4,21	4,26
	Proporsi	25,6%	25,2%
Pertambangan	Jumlah	0,09	0,09
	Proporsi	0,6%	0,6%
Industri	Jumlah	2,94	3,07
	Proporsi	17,8%	18,2%
Listrik, Gas, dan Air	Jumlah	0,04	0,04
	Proporsi	0,2%	0,3%
Konstruksi	Jumlah	1,02	0,97
	Proporsi	6,2%	5,7%
Perdagangan	Jumlah	4,18	4,30
	Proporsi	25,4%	25,5%
Transportasi	Jumlah	1,39	1,44
	Proporsi	8,5%	8,5%
Keuangan dan Jasa Perusahaan	Jumlah	0,27	0,26
	Proporsi	1,6%	1,6%
Jasa Kemasyarakatan	Jumlah	2,33	2,46
	Proporsi	14,1%	14,5%
Total	Jumlah	16,48	16,90

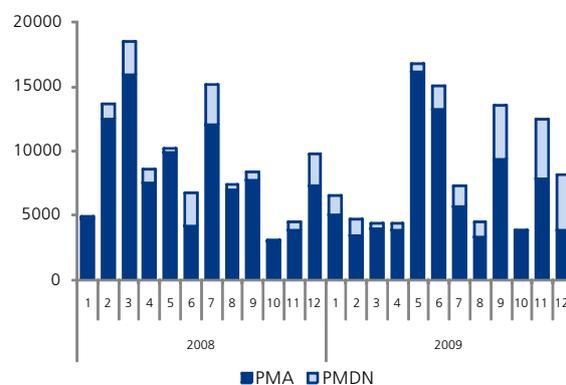
Sumber: BPS Jawa Barat

Data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat juga mencatat perkembangan ketenagakerjaan yang menggembirakan. Hingga pertengahan Desember 2009, tercatat penyerapan kerja sebanyak 502.958 orang. Mayoritas penyerapan tersebut terjadi pada Antar Kerja Lokal/AKL (penempatan kerja di lokal Jawa Barat). Pola pencatatan penyerapan kerja dengan metode *by name, by address, by job* adalah yang pertama kali dilakukan di Indonesia, dan saat ini menjadi model percontohan secara nasional. Sepanjang tahun 2009, Disnakertrans Jawa Barat melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Pertama, memberikan 1.260 kali pelatihan berbasis masyarakat pedesaan menggunakan *mobile training unit* sehingga mencapai 25.200 orang. Selain itu, Disnakertrans juga mengupayakan berbagai pelatihan berbasis kompetensi bagi

peningkatan kualitas tenaga kerja untuk keahlian tertentu kepada 2.600 orang, pola pelatihan “3 in 1” kepada 26.370 orang, melakukan pemagangan di perusahaan dalam dan luar negeri kepada 3.420 orang, pelatihan kewiraswastaan kepada 821 orang, serta melangsungkan uji kompetensi kepada 600 orang.

Realisasi investasi di Jawa Barat turut meningkatkan penyerapan tenaga kerja selama tahun 2009. Penyerapan tenaga kerja selama triwulan IV-2009 membaik dibandingkan periode yang sama di tahun 2008, dengan pertumbuhan sebesar 171,2% (yoy). Berdasarkan lokasinya, mayoritas tenaga kerja terserap di Kabupaten Bekasi (30,5%), diikuti oleh Kabupaten Purwakarta (17,4%), Kabupaten Sukabumi (12,4%), serta Kabupaten Bogor (11,1%). Apabila dilihat dari bidang usahanya, penyerapan tenaga kerja paling banyak terserap pada industri tekstil (42,1%), industri kimia dan farmasi (13,1%), serta industri logam, mesin, dan elektronik (8,1%). Selama tahun 2009, tercatat sebanyak 101.347 orang tenaga kerja terserap dalam 371 proyek yang direalisasikan. Mayoritas tenaga kerja terserap pada investasi PMA (78%) sementara sisanya (22%) terserap pada investasi PMDN. Secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi pada tahun 2009 menurun 8,2% (yoy), dibandingkan dengan penyerapan selama tahun 2008 yang mencapai 110.430 orang.

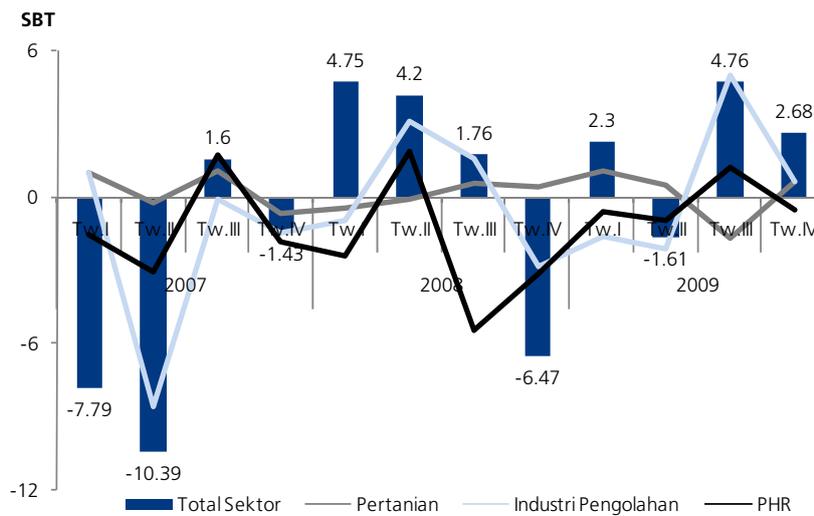
Grafik 6.2. Penyerapan Tenaga Kerja dari Realisasi Investasi PMA dan PMDN



Sumber: BKPPMD Jawa Barat

Terus membaiknya kondisi ketenagakerjaan di Jawa Barat hingga akhir tahun 2009 juga terindikasikan dari hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha. Nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) bagi indikator jumlah tenaga kerja terus bergerak naik. Pada triwulan IV-2009, nilai SBT untuk seluruh sektor adalah sebesar 2,68, yang berarti terjadi peningkatan jumlah tenaga kerja dibandingkan triwulan III-2009. Nilai tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan nilai SBT pada periode yang sama di tahun 2008 yang sebesar -6,47, atau mengalami penurunan dibandingkan triwulan III-2008. Tren positif kenaikan jumlah tenaga kerja tersebut terjadi pada sektor industri pengolahan serta pertanian, masing-masing karena peningkatan produksi untuk memenuhi permintaan pasar, serta masuknya musim tanam padi. Sementara itu, jumlah tenaga kerja pada sektor PHR mengalami sedikit penurunan dibandingkan triwulan III-2009, dengan nilai SBT -0,5, walaupun masih jauh lebih tinggi dibandingkan SBT pada triwulan yang sama di tahun 2008.

Grafik 6.3. Indikator Jumlah Karyawan



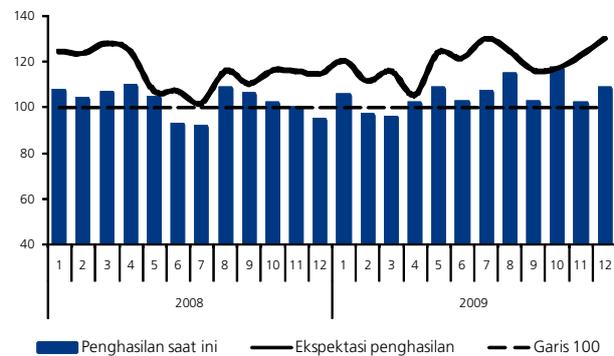
Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha, KBI Bandung

2. KESEJAHTERAAN

Tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Barat pada triwulan IV-2009 terindikasikan mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut

terjadi akibat membaiknya perekonomian, yang selanjutnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Kondisi tersebut tercermin dari naiknya Indeks Penghasilan Saat ini menurut Survei Konsumen di Kota Bandung. Indeks tersebut meningkat dari rata-rata 107,8 pada triwulan III-2009 menjadi rata-rata 108,9 pada triwulan IV-2009. Selain itu, indeks tersebut juga bergerak membaik, dari persepsi pesimis di triwulan yang sama di tahun 2008, dengan nilai indeks sebesar 98,56, menjadi bergerak optimis (di atas 100) pada triwulan laporan. Penghasilan masyarakat yang meningkat serta oleh inflasi Jawa Barat yang relatif terkendali, merupakan faktor utama yang menopang naiknya kesejahteraan masyarakat pada akhir tahun 2009. Selain itu, kesejahteraan di masa mendatang juga diperkirakan masih relatif baik, seperti diindikasikan oleh tren kenaikan Indeks Ekspektasi Penghasilan sejak bulan Oktober hingga November 2009.

Grafik 6.4. Indeks Penghasilan dan Indeks Ekspektasi Penghasilan

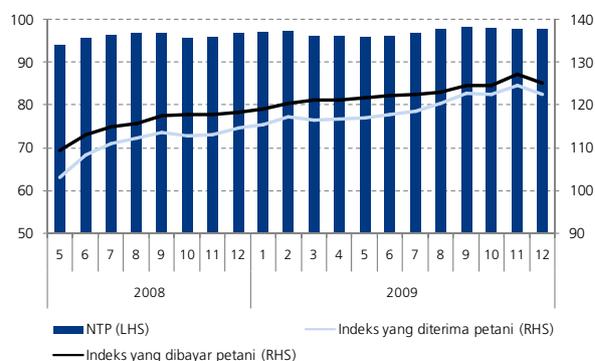


Sumber: Survei Konsumen, KBI Bandung

Dari sisi petani, daya beli petani juga diindikasikan mengalami peningkatan, seperti tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan pengukur kemampuan tukar produk pertanian dengan barang dan jasa yang diperlukan petani untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. NTP rata-rata selama triwulan IV-2009 mengalami kenaikan apabila

dibandingkan NTP pada triwulan III-2009, yaitu dari 97,7 menjadi 98,0. Kenaikan NTP tersebut terjadi karena kenaikan Indeks yang Diterima Petani (IT) lebih besar dibandingkan dengan kenaikan Indeks yang Dibayar Petani (IB). Adapun kenaikan IB terutama disebabkan oleh naiknya harga bahan makanan, makanan jadi, dan kesehatan dari sisi pembiayaan konsumsi rumah tangga, serta naiknya harga transportasi dan penambahan barang modal dari sisi pembiayaan produksi dan penambahan barang modal. Peningkatan tersebut juga diikuti oleh peningkatan pertumbuhan nilai NTP secara tahunan, yaitu dari tumbuh 1,0% (yoy) pada triwulan III-2009, menjadi tumbuh 1,8% (yoy) pada triwulan laporan.

Grafik 6.5. Nilai Tukar Petani



Sumber: BPS Jawa Barat

Tabel 6.2. Nilai Tukar Petani di Jawa Barat (2007 = 100)

No.	Sektor, Kelompok, & Subkelompok	Tw.I-09	Tw.II-209	Tw.III-09	Tw.IV-09
1	Indeks harga yang diterima petani	116,44	117,21	120,61	122,42
2	Indeks harga yang dibayar petani	120,20	121,79	123,43	124,90
2.1.	Konsumsi Rumah Tangga	121,86	123,46	125,34	126,96
	- Bahan Makanan	123,28	122,77	124,69	126,67
	- Makanan Jadi	117,05	119,85	120,97	122,72
	- Perumahan	132,27	137,99	140,99	141,88
	- Sandang	114,87	118,04	121,21	122,68
	- Kesehatan	113,90	117,51	118,96	120,97
	- Pendidikan, Rekreasi & Olahraga	112,92	116,47	118,27	119,20
	- Transportasi & Komunikasi	113,17	112,23	112,43	113,05
2.2.	Biaya Produksi & Penambahan Barang Modal	115,23	116,64	117,55	118,59
	- Bibit	113,94	115,38	116,64	117,75
	- Obat-obatan & Pupuk	111,64	112,12	112,47	113,37
	- Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	112,02	116,69	117,20	117,73
	- Transportasi	114,14	113,83	113,71	115,66
	- Penambahan Barang Modal	117,65	119,09	120,74	122,78
	- Upah Buruh Tani	116,74	118,12	119,36	120,55
3	Nilai tukar petani (NTP)	96,87	96,24	97,70	98,01

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Halaman ini sengaja dikosongkan

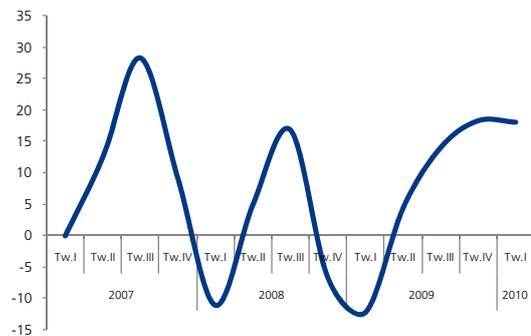
BAB 7

PROSPEK PEREKONOMIAN DAERAH

1. PROSPEK EKONOMI MAKRO

Memasuki tahun 2010, perekonomian Jawa Barat pada triwulan pertama diperkirakan berpotensi meningkat. Setelah diperkirakan tumbuh sebesar 4,9% (yoy) pada triwulan IV-2009, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat pada triwulan I-2010 diperkirakan berada pada kisaran 4,8% s.d. 5,4% (yoy). Berdasarkan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha yang dilakukan oleh KBI Bandung, ekspektasi para pelaku usaha dalam memandang kegiatan dunia usaha pada triwulan I-2010 relatif stabil, yaitu dengan Saldo Bersih Tertimbang (SBT) ekspektasi yang relatif sama dengan realisasi pada triwulan IV-2009, yaitu sebesar 18. Namun demikian, nilai ekspektasi SBT tersebut jauh lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi pada triwulan yang sama di tahun 2009 yang sebesar -12.

Grafik 7.1. Realisasi dan Ekspektasi Kegiatan Dunia Usaha



Sumber: Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) KBI Bandung

Keterangan:

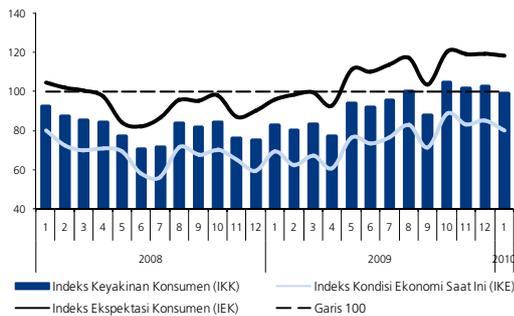
Tw.I-2007 s.d. Tw.IV-2009 merupakan angka realisasi
Tw.I-2010 merupakan angka ekspektasi

Dari sisi permintaan, potensi kenaikan pertumbuhan ekonomi dipicu oleh membaiknya kinerja ekspor serta investasi di Jawa Barat. Tren pemulihan perekonomian global yang semakin menguat, baik untuk negara maju maupun negara berkembang, serta terus meningkatnya volume perdagangan dunia, mendorong permintaan ekspor untuk kembali terakselerasi. Membaiknya iklim usaha seiring dengan kenaikan permintaan mendorong kalangan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi dan investasi. Biaya kredit yang diperkirakan lebih murah seiring penurunan BI rate pun turut mendukung upaya kalangan pengusaha untuk merealisasikan investasinya pada tahun 2010. Tingginya minat investasi tersebut antara lain ditunjukkan oleh penyerahan dua Izin Usaha Pertambangan (IUP) panas bumi kepada dua konsorsium perusahaan dalam negeri untuk Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Tampomas dan Tangkuban Perahu pada awal triwulan I-2010, dengan nilai investasi total Rp2,5 triliun. Sementara itu, pemberlakuan ACFTA membuka peluang bagi produk ekspor Jawa Barat untuk memasuki pasar Cina, sehingga mendorong terjadinya peningkatan ekspor. Namun di sisi lain, impor produk Cina, terutama barang konsumsi, diperkirakan juga akan meningkat.

Konsumsi diperkirakan masih tumbuh relatif stabil, walaupun dengan potensi sedikit melambat. Konsumsi rumah tangga berpotensi melambat, walaupun masih mampu tumbuh relatif tinggi. Perlambatan disebabkan oleh adanya *base effect*, karena tingginya nilai tambah konsumsi rumah tangga pada periode yang sama di tahun 2009, sehubungan persiapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Kondisi tersebut diindikasikan oleh Survei Konsumen di Kota Bandung, yang menunjukkan adanya penurunan nilai Indeks Keyakinan Konsumen (IKK). Penurunan IKK tersebut lebih disebabkan karena penurunan Indeks Ketepatan Waktu Pembelian *Durable Goods*, walaupun Indeks Penghasilan Saat Ini meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun penghasilan diperkirakan meningkat,

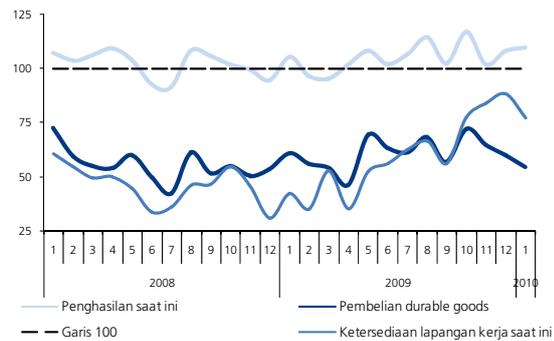
masyarakat masih menahan untuk melakukan konsumsi. Di sisi lain, konsumsi pemerintah diperkirakan mengalami sedikit peningkatan. Hal ini antara lain disebabkan inisiatif dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah beranggaran relatif besar, untuk mempercepat proses pelaksanaan proyek seawal mungkin, dengan mulai melakukan kegiatan lelang pada bulan Januari 2010. Hal ini dimaksudkan agar penyerapan anggaran berjalan sesuai perencanaan dan proses pembangunan berjalan dan selesai tepat pada waktunya.

Grafik 7.2. Indeks Keyakinan Konsumen



Sumber: Survei Konsumen di Kota Bandung

Grafik 7.3. Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini



Sumber: Survei Konsumen di Kota Bandung

Dari sisi penawaran, pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan menjadi penggerak perekonomian Jawa Barat pada triwulan I-2010. Terus membaiknya perekonomian, baik domestik maupun global, mendorong kinerja sektor industri pengolahan untuk tumbuh lebih tinggi. Namun demikian, Perdagangan Bebas ASEAN-China atau *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) diperkirakan akan menjadi tantangan yang cukup berarti bagi industri di Jawa Barat, khususnya subsektor tekstil, barang kulit, dan alas kaki. Dengan implementasi ACFTA, pasar domestik dikhawatirkan dikuasai barang-barang dari Cina dengan harga yang lebih murah (lihat Boks 6. Hasil Survei Dampak *ASEAN-China Free Trade Agreement* terhadap Kinerja Usaha di Jawa Barat). Walaupun demikian, ACFTA sebenarnya merupakan sebuah peluang bagi industri di Jawa Barat untuk lebih memperluas pasarnya ke negara lain, khususnya Cina. Potensi pasar di negara tersebut terletak pada jumlah penduduknya yang sangat besar. Untuk menghadapi dunia yang semakin kompetitif, maka sinergitas antara pelaku usaha, pemerintah daerah, serta instansi terkait sebaiknya terus ditingkatkan, melalui berbagai upaya sehat yang mendukung pelaku usaha, antara lain perbaikan infrastruktur (jalan, laut, maupun udara), penyederhanaan proses perizinan, serta gerakan “Cinta Produk Dalam Negeri.”

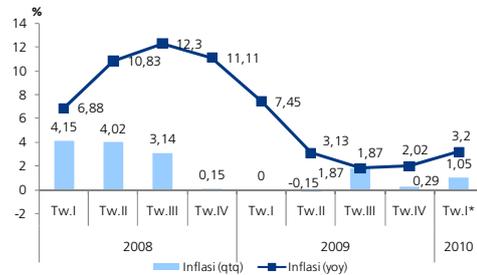
Dua sektor ekonomi dominan lainnya di Jawa Barat diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) melambat terutama disebabkan oleh adanya *base-effect*, karena tingginya volume perdagangan pada triwulan yang sama di tahun 2009 sehubungan persiapan penyelenggaraan Pemilu Legislatif. Sementara itu, perlambatan subsektor perhotelan disebabkan turunnya jumlah hari libur pada triwulan I-2010 dibandingkan triwulan yang sama di tahun 2009, sehingga jumlah wisatawan yang menginap mengalami penurunan. Sementara itu, sektor pertanian diperkirakan mengalami perlambatan akibat fenomena El Nino, yang diperkirakan menggeser masa tanam padi, walaupun tidak mengganggu produksi padi secara keseluruhan di tahun

2010. Musim panen raya yang biasanya terjadi pada Februari dan Maret, pada tahun 2010 ini diperkirakan akan mundur menjadi bulan Maret dan beberapa di bulan April.

2. PRAKIRAAN INFLASI

Inflasi Jawa Barat pada triwulan I-2010 diperkirakan akan meningkat dibandingkan triwulan IV-2009, yakni dari 2,02% (yoy) menjadi berkisar antara 2,7% hingga 3,7% (Grafik 7.2). Naiknya laju inflasi tahunan tersebut disebabkan oleh faktor teknis, yakni hilangnya pengaruh penurunan harga BBM bersubsidi dan tarif angkutan (*administered price*) triwulan I-2009, gangguan cuaca, tekanan eksternal, serta pemulihan perekonomian.

Grafik 7.2. Perkembangan dan Prakiraan Inflasi Jawa Barat Triwulan I-2010



Keterangan: *) Proyeksi KBI Bandung
Sumber: BPS, diolah

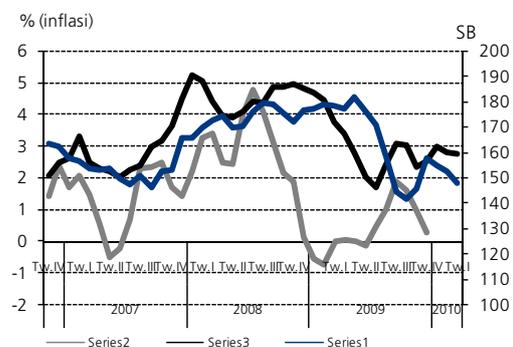
Di lain pihak, inflasi triwulanan Jawa Barat justru diperkirakan akan turun dari 0,29% (qtq) pada triwulan IV-2009 menjadi pada kisaran 0,8% hingga 1,3% pada triwulan I-2010. Hal ini disebabkan oleh hasil produksi padi yang terbatas, naiknya ekspektasi inflasi masyarakat, dan tekanan eksternal dari kenaikan harga komoditas di pasar internasional. Namun demikian, tekanan inflasi diperkirakan dapat tertahan oleh proses pemulihan perekonomian dari dampak krisis keuangan global.

Faktor Fundamental

Faktor fundamental diperkirakan akan menjadi salah satu faktor penyebab naiknya laju inflasi triwulanan Jawa Barat pada triwulan I-2010. Ekspektasi inflasi masyarakat diduga akan naik dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, sementara tekanan eksternal diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perubahan portofolio investor kepada komoditas dunia. Selain itu, tekanan interaksi permintaan-penawaran diperkirakan masih minimal karena perekonomian masih berada dalam masa pemulihan dan kapasitas terpasang masih dapat meredam kenaikan permintaan.

Ekspektasi konsumen terhadap inflasi naik pada triwulan I-2010 dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh faktor musiman, yakni berlakunya kebijakan pemerintah, yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dan gabah dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), serta hasil produksi padi yang relatif terbatas. Konsumen berpendapat bahwa harga akan cenderung naik pada triwulan I-2010 sebagaimana terlihat dari perkembangan hasil ekspektasi harga baik 3 bulan maupun 6 bulan

Grafik 7.4. Ekspektasi Konsumen Terhadap Harga Barang dan Jasa di Kota Bandung



Sumber: SK-KBI Bandung; BPS Provinsi Jawa Barat.

Keterangan: SK*=Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK pada 3 bulan sebelumnya (*Moving*

yang akan datang dalam Survei Konsumen (Grafik 7.4). *Average 3 bulan*; SK**= Ekspektasi konsumen terhadap harga pada bulan tsb. menurut SK 6 bulan sebelumnya (*Moving Average 3 bulan*);

Harga komoditas strategis di pasar internasional berpotensi meningkat sehingga turut mendorong kenaikan laju inflasi Jawa Barat. Kenaikan harga di pasar dunia terutama didorong oleh kenaikan harga minyak dunia. Hal ini kemudian mendorong naiknya harga komoditas bahan baku bio-etanol seperti kedelai, jagung, dan gandum. Selain itu laju inflasi negara mitra dagang utama diperkirakan akan meningkat sejalan dengan perbaikan perekonomian dunia.

Faktor Non Fundamental

Produksi padi diperkirakan akan naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada kisaran 5% hingga 10%. Namun demikian, Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Barat menginformasikan bahwa panen padi akan terjadi pada bulan Maret dengan perkiraan masa keterlambatan selama 10 hari dari waktu normal. Keterlambatan tersebut merupakan akibat dari dampak El-Nino.

Selain itu, secara musiman, pemerintah menetapkan kenaikan harga/tarif barang/jasa pada awal tahun. Tarif orang bukan mandor naik sesuai dengan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota, sementara harga beras akan sejalan dengan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras. Selain itu, laju inflasi berpotensi meningkat karena kapasitas fiskal untuk beban biaya pembangkit listrik yang relatif terbatas.

BOKS 6

HASIL SURVEI DAMPAK ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) TERHADAP KINERJA USAHA DI JAWA BARAT

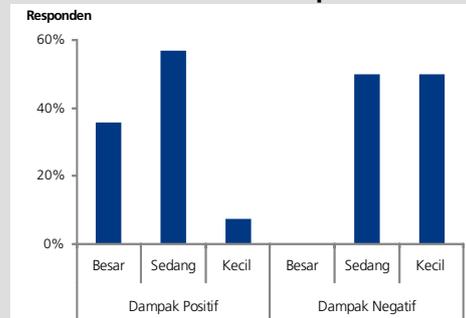
Terhitung 1 Januari 2010, *Free Trade Agreement* antara negara-negara ASEAN dengan China diberlakukan. Dengan FTA tersebut, mayoritas pos tarif bea masuk diturunkan hingga 0% dan maksimal 5% untuk produk-produk yang diperdagangkan antara negara-negara ASEAN dan China.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada bulan Januari 2010, KBI Bandung melakukan survei singkat terhadap 21 perusahaan di wilayah Jawa Barat, dengan tujuan untuk mengetahui dampak ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA), atau Perdagangan Bebas ASEAN-Cina, terhadap kinerja usaha di Jawa Barat. Responden survei merupakan perusahaan berskala besar dari sektor industri pengolahan, khususnya subsektor industri tekstil, barang kulit & alas kaki, serta subsektor alat angkutan, mesin dan peralatannya.

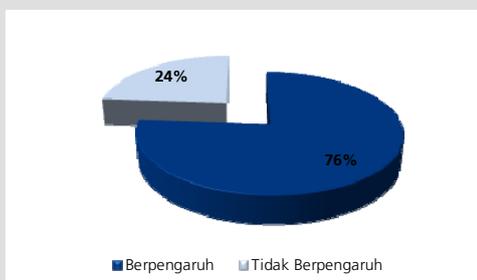
Gambaran Umum Mengenai Dampak ACFTA Pada Kinerja Usaha Di Jawa Barat

Mayoritas responden (76,19%) berpendapat bahwa pembebasan tarif bea masuk dalam skema ACFTA telah berpengaruh terhadap kegiatan usahanya, dan mayoritas (87,50%) mengatakan bahwa secara keseluruhan, ACFTA berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan mereka. Namun demikian, masih terdapat 12,5% perusahaan yang merasakan bahwa ACFTA berdampak positif terhadap kinerja perusahaan. 57% dari responden yang merasakan dampak negatif, menyatakan bahwa dampak negatif yang dirasakan tergolong “sedang”, sedangkan 36% lainnya menyatakan dampak yang dirasakan “besar”.

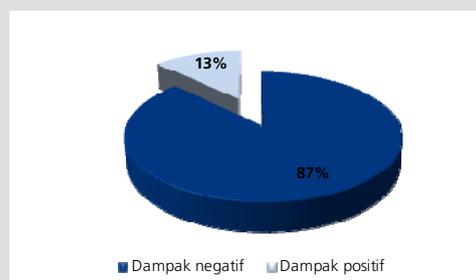
Grafik 1. Besaran Dampak ACFTA



Grafik 2. Pengaruh ACFTA



Grafik 3. Dampak yang Dirasakan



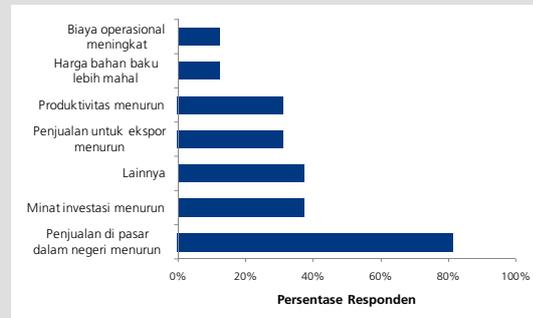
Dampak negatif yang paling dirasakan oleh para responden adalah dalam bentuk penurunan penjualan di pasar dalam negeri, yaitu sebanyak 81,25% dari total responden yang merasakan dampak negatif ACFTA. Selain itu, ACFTA dirasakan juga berdampak negatif terhadap penurunan

minat investasi (37,5%). Di lain pihak, dampak positif yang paling banyak dirasakan oleh responden adalah peningkatan penjualan ekspor (50%), peningkatan produktivitas (37,5%), serta kemungkinan mendapatkan bahan baku yang berharga lebih murah (37,5%). Sementara itu, dari sisi kesiapan, proporsi perusahaan yang menjawab bahwa perusahaannya siap menghadapi ACFTA (50%) sama besar dengan perusahaan yang tidak siap dalam menghadapi ACFTA (50%).

Grafik 4. Dampak Positif ACFTA



Grafik 5. Dampak Negatif ACFTA



Indikator Kinerja Perusahaan Pasca ACFTA

Secara umum, baik dalam jangka pendek (1 tahun ke depan) maupun jangka panjang (di atas 1 tahun ke depan), responden memperkirakan bahwa kinerja perusahaan mereka pasca implementasi ACFTA akan mengalami penurunan. Namun demikian, kinerja perusahaan mereka diperkirakan akan lebih stabil pada jangka pendek (37,5%) dibandingkan pada jangka panjang (25%).

Berdasarkan ekspektasi responden untuk tahun 2010, rata-rata tingkat penjualan ekspor tumbuh -0,2% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2009 yang sebesar -12,4%, walaupun belum dapat dikatakan pulih seperti pada kondisi normal. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi karena semakin luasnya pasar. Di sisi lain, penjualan domestik mengalami sedikit perlambatan pertumbuhan, dari tumbuh 5,0% pada tahun 2009, menjadi tumbuh 4,8%. Dari sisi keuntungan, terjadi sedikit peningkatan pertumbuhan, yaitu dari tumbuh 2,8% menjadi tumbuh 2,9%. Dampaknya terhadap perusahaan juga terlihat dari turunnya perkiraan produksi serta investasi yang akan dilakukan oleh perusahaan pada tahun 2010.

Grafik 6. Prediksi Pertumbuhan Beberapa Indikator Kinerja Perusahaan Pasca FTA



Antisipasi Menghadapi ACFTA

Dalam rangka menghadapi ACFTA, perusahaan mempersiapkan beberapa langkah-langkah antisipasi, yang dilakukan dari sisi produksi, pemasaran, maupun tenaga kerja. Langkah-langkah tersebut antara lain:

- a) Sisi produksi:
 1. Meningkatkan kualitas produk (87,5%)
 2. Menekan biaya *overhead* (75,0%)
 3. Menggunakan sumber daya/bahan baku yang lebih murah (56,25%)
 4. Menekan biaya tenaga kerja (50%)
- b) Sisi Pemasaran
 1. Mencari konsumen baru di luar negeri (62,5%)
 2. Mencari konsumen baru di dalam negeri (50,0%)
 3. Meningkatkan aktivitas pemasaran di dalam negeri, melalui iklan, *direct selling*, menambah gerai baru, dll. (50,0%)
- c) Sisi Ketenagakerjaan
 - Meningkatkan produktivitas tenaga kerja, melalui pelatihan-pelatihan (68,75%)

Dalam menghadapi ACFTA, pelaku mengharapkan beberapa upaya dari Pemerintah, antara lain menghilangkan pungutan atau pajak-pajak yang menghambat kegiatan usaha (81,25%), melakukan optimalisasi Standar Nasional Indonesia (SNI), khususnya bagi produk luar negeri yang masuk ke Indonesia (68,75%), aktif mempromosikan dan memasyarakatkan penggunaan produk dalam negeri (62,50%), serta memberikan kepastian hukum dan perizinan yang jelas dan sederhana (62,50%).

Grafik 7. Harapan terhadap Pemerintah



Halaman ini sengaja dikosongkan

LAMPIRAN

1. EKONOMI MAKRO

Tabel 1.A. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Sektor Ekonomi (Triliun Rupiah)

Sektor	2008				2009			
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV*)
Pertanian	11,01	8,23	9,05	8,10	11,38	9,08	9,35	8,47
Pertambangan & Penggalian	1,45	1,49	1,73	1,72	1,72	1,78	1,91	1,96
Industri Pengolahan	31,16	33,47	34,26	35,08	31,59	32,94	33,86	35,45
Listrik, Gas, & Air Bersih	1,52	1,48	1,50	1,54	1,58	1,65	1,83	1,89
Bangunan / Konstruksi	2,24	2,27	2,62	2,60	2,33	2,46	2,68	2,68
PHR	13,37	14,04	14,82	14,71	14,25	14,98	16,66	16,61
Pengangkutan & Komunikasi	3,07	3,08	3,15	3,10	3,18	3,27	3,48	3,18
Kuangan, Persewaan, & Jasa Perusahaa	2,09	2,25	2,42	2,31	2,14	2,35	2,55	2,46
Jasa-jasa	4,69	4,68	4,82	4,87	4,82	4,87	4,99	4,93
PDRB	70,59	71,01	74,38	74,02	72,98	73,39	77,31	77,62

*) Proyeksi KBI Bandung

Tabel 1.B. Perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Barat Menurut Jenis Penggunaan (Triliun Rupiah)

Komponen	2008				2009			
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV*)
Konsumsi rumah tangga	45,64	45,93	47,73	48,00	48,89	48,60	50,60	51,96
Konsumsi pemerintah	3,15	4,11	4,71	6,19	3,78	4,44	4,86	6,39
Pembentukan Modal Tetap Bruto	12,35	12,59	13,28	13,46	11,61	12,03	12,09	12,95
Perubahan Inventori	1,85	1,83	1,90	1,86	2,20	2,43	2,80	1,87
Diskrepansi Statistik	3,03	1,21	(0,62)	1,12	3,71	(2,95)	(1,91)	-
Ekspor	31,18	29,28	29,18	28,86	25,25	32,11	31,94	32,20
Impor	26,62	23,94	21,81	25,50	22,47	23,26	23,07	27,74
PDRB	70,59	71,01	74,38	74,02	72,98	73,38	77,31	77,62

*) Proyeksi KBI Bandung

2. INFLASI

Tabel 2.A. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Oktober 2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	-0,47	0,56	0,16	-1,32	-0,27	-1,03	0,41	-0,10
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,54	0,28	0,71	0,00	0,13	1,08	1,83	2,20
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1,48	0,19	0,02	0,19	0,45	0,48	0,17	0,58
4	Sandang	0,27	0,46	0,77	0,34	1,02	-0,76	-0,05	0,40
5	Kesehatan	0,00	0,68	0,23	0,04	0,00	0,00	0,09	0,24
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,05	0,06	0,00	0,00	0,34	0,00	0,19	0,04
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-0,72	-0,35	-0,75	-0,92	-0,21	-0,67	-1,46	-0,63
	Umum	0,30	0,23	0,05	-0,44	0,12	-0,08	0,40	0,13

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Keterangan: Bd= Bandung, Bks=Bekasi, Dpk=Depok, Bgr=Bogor, Cn=Cirebon, Skbm=Sukabumi, Ts=Tasikmalaya

Tabel 2.B. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan November 2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	-0,57	-0,49	-1,56	-1,15	-0,82	-0,40	-1,27	-0,86
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,02	0,21	0,46	1,29	0,18	0,32	2,91	0,38
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	0,13	0,14	0,11	-0,19	0,35	0,07	-0,05	0,10
4	Sandang	0,08	1,04	0,68	0,10	0,94	0,54	0,83	0,53
5	Kesehatan	0,31	0,16	0,00	-0,12	0,08	0,03	-0,16	0,13
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,38	0,05	0,11	0,04	-0,01	-0,22	0,05	0,16
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,11	0,13	0,06	-0,03	0,06	0,00	0,12	0,09
Umum		-0,02	0,02	-0,23	-0,14	0,01	-0,01	0,50	-0,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.C Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Bulanan (mtm) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Desember 2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	0,33	-1,27	0,14	0,02	0,98	0,00	0,57	-0,24
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	0,57	1,75	0,39	0,63	0,68	0,65	0,23	0,86
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	-0,02	0,29	0,19	0,67	0,03	0,19	0,03	0,18
4	Sandang	0,32	1,77	0,04	0,51	1,62	1,14	0,89	0,74
5	Kesehatan	0,22	0,48	-0,04	2,89	0,82	0,11	-0,05	0,48
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,02	0,18	0,00	0,03	0,00	-0,20	-0,02	0,05
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	0,15	0,00	0,03	0,57	-0,06	0,24	0,10	0,09
Umum		0,22	0,17	0,14	0,49	0,49	0,26	0,24	0,22

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.D. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Triwulanan (qtq) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Triwulan III-2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	-0,71	-1,20	-1,26	-2,43	-0,12	-1,43	-0,29	-1,20
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	1,13	2,26	1,57	1,93	1,00	2,06	5,04	3,47
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1,59	0,62	0,32	0,67	0,84	0,73	0,15	0,86
4	Sandang	0,67	3,30	1,50	0,96	3,63	0,91	1,68	1,68
5	Kesehatan	0,54	1,32	0,19	2,80	0,91	0,14	-0,12	0,86
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	0,45	0,30	0,11	0,07	0,33	-0,42	0,23	0,25
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-0,47	-0,21	-0,66	-0,39	-0,21	-0,44	-1,25	-0,45
Umum		0,50	0,41	-0,03	-0,08	0,62	0,18	1,15	0,29

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

Tabel 2.E. Perkembangan Inflasi IHK Tahun Dasar 2007 Tahun Kalender (ytd) di Jawa Barat Menurut Kota dan Kelompok Barang dan Jasa Bulan Desember 2009 (%)

No.	Kelompok	Kota							Gab.
		Bd	Bks	Dpk	Bgr	Cn	Skbm	Tsm	
1	Bahan makanan	4,02	2,86	6,53	4,15	4,68	0,39	2,79	4,10
2	Makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau	5,85	6,86	7,60	8,07	5,99	7,70	13,14	6,66
3	Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	1,74	-0,29	-0,69	1,62	3,64	11,32	6,47	1,06
4	Sandang	5,09	5,49	4,97	2,72	10,77	1,25	4,63	4,94
5	Kesehatan	5,32	3,64	0,79	9,66	5,48	2,88	0,77	3,95
6	Pendidikan, rekreasi dan olahraga	3,31	3,56	3,91	3,33	8,15	2,83	2,45	3,61
7	Transpor, komunikasi dan jasa keuangan	-	-	-	-	-2,95	-6,59	-3,85	-5,74
	Umum	2,11	1,93	1,30	2,16	4,11	3,49	4,17	2,02

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat.

3. DATA PERBANKAN

Tabel 3.A. Indikator Bank Umum di Jawa Barat Posisi bulan Juni 2009 (Rp Triliun)

Bank Umum Konvensional

Pos Tertentu	2008				2009				Pertumbuhan	
	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	Tw. I	Tw. II	Tw. III	Tw. IV	q-t-q	y-o-y
Total Aset	133,59	139,72	145,03	154,91	162,80	170,85	178,02	181,92	2,19%	17,44%
DPK	101,76	105,98	107,03	117,76	123,03	126,97	129,53	133,28	2,90%	13,18%
Kredit bank pelapor	70,98	77,92	82,86	87,35	87,58	95,45	98,77	102,62	3,90%	17,48%
Kredit lokasi proyek	127,22	135,29	147,46	163,33	162,54	171,39	174,16	177,76	2,07%	8,83%
LDR %	69,75	73,52	77,42	74,18	71,19	75,17	76,25	77,00		
Rasio NPLs (%)	3,78	3,63	3,57	3,52	3,99	3,91	3,82	3,37		

Sumber: LBU KBI Bandung

Bank Umum Syariah

Indikator	2008				2009				Pertumbuhan	
	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV*)	qtq	yoy
Total Aset (Rp Triliun)	4,10	4,73	4,91	5,25	5,23	5,66	5,61	6,02	7,34%	14,61%
DPK (Rp Triliun)	3,21	3,73	3,65	3,97	4,09	4,49	3,72	3,91	5,21%	-1,50%
Pembiayaan (Rp Triliun)	2,84	3,07	3,37	3,43	3,41	3,53	4,38	4,63	5,60%	34,89%
- FDR (%)	88,40	82,28	92,21	86,26	86,26	78,50	84,83	84,52		
NPF (%)	5,63	5,14	4,81	3,55	2,92	3,31	4,01	3,68		

*) Posisi bulan November 2009

Sumber: LBU KBI Bandung

DAFTAR ISTILAH

<i>Administered price</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya diatur oleh pemerintah.
Andil inflasi	Sumbangan perkembangan harga suatu komoditas/kelompok barang/kota terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan.
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
Bobot inflasi	Besaran yang menunjukkan pengaruh suatu komoditas terhadap tingkat inflasi secara keseluruhan, yang diperhitungkan dengan melihat tingkat konsumsi masyarakat terhadap komoditas tersebut.
Dana Perimbangan	Sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi daerah.
Faktor Fundamental	Faktor fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang dapat dipengaruhi oleh kebijakan moneter, yakni interaksi permintaan-penawaran atau <i>output gap</i> , eksternal, serta ekspektasi inflasi masyarakat
Faktor Non Fundamental	Faktor non fundamental adalah faktor pendorong inflasi yang berada di luar kewenangan otoritas moneter, yakni produksi maupun distribusi bahan pangan (<i>volatile foods</i>), serta harga barang/jasa yang ditentukan oleh pemerintah (<i>administered price</i>)
<i>Imported inflation</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu inflasi yang berasal dari pengaruh perkembangan harga di luar negeri (eksternal)
Indeks Ekspektasi Konsumen	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap ekspektasi kondisi ekonomi 6 bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Harga Konsumen (IHK)	Sebuah indeks yang merupakan ukuran perubahan rata-rata harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat pada suatu periode tertentu.
Indeks Kondisi Ekonomi	Salah satu pembentuk IKK. Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini, dengan skala 1–100.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)	Indeks yang menunjukkan level keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi kondisi ekonomi enam bulan mendatang, dengan skala 1–100.
Indeks Pembangunan Manusia	Ukuran kualitas pembangunan manusia, yang diukur melalui pencapaian rata-rata 3 hal kualitas hidup, yaitu pendidikan, kesehatan dan daya beli.
Investasi	Kegiatan meningkatkan nilai tambah suatu kegiatan produksi melalui peningkatan modal.
Migas	Minyak dan gas. Merupakan kelompok sektor industri yang mencakup industri minyak dan gas.
Mtm	Month to month. Perbandingan antara data satu bulan dengan bulan sebelumnya.
Omzet	Nilai penjualan bruto yang diperoleh dari satu kali proses produksi.
PDRB	Produk Domestik Regional Bruto. Pendapatan suatu daerah yang mencerminkan hasil kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah tertentu.
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi suatu daerah seperti hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.
<i>Perceived risk</i>	Persepsi risiko yang dimiliki oleh investor terhadap kondisi perekonomian sebuah

	negara
Qtq	<i>Quarter to quarter</i> . Perbandingan antara data satu triwulan dengan triwulan sebelumnya.
Saldo Bersih	Selisih antara persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "meningkat" dengan persentase jumlah responden yang memberikan jawaban "menurun" dan mengabaikan jawaban "sama".
SBT	Saldo Bersih Tertimbang. Nilai yang diperoleh dari hasil perkalian saldo bersih sektor/subsektor yang bersangkutan dengan bobot sektor/subsektor yang bersangkutan sebagai penimbangnya.
Sektor ekonomi dominan	Sektor ekonomi yang mempunyai nilai tambah besar sehingga mempunyai pengaruh dominan pada pembentukan PDRB secara keseluruhan.
<i>Volatile food</i>	Salah satu disagregasi inflasi, yaitu untuk komoditas yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
<i>West Texas Intermediate</i>	Jenis minyak bumi yang menjadi acuan untuk transaksi perdagangan minyak dunia.
Yoy	<i>Year on year</i> . Perbandingan antara data satu tahun dengan tahun sebelumnya.